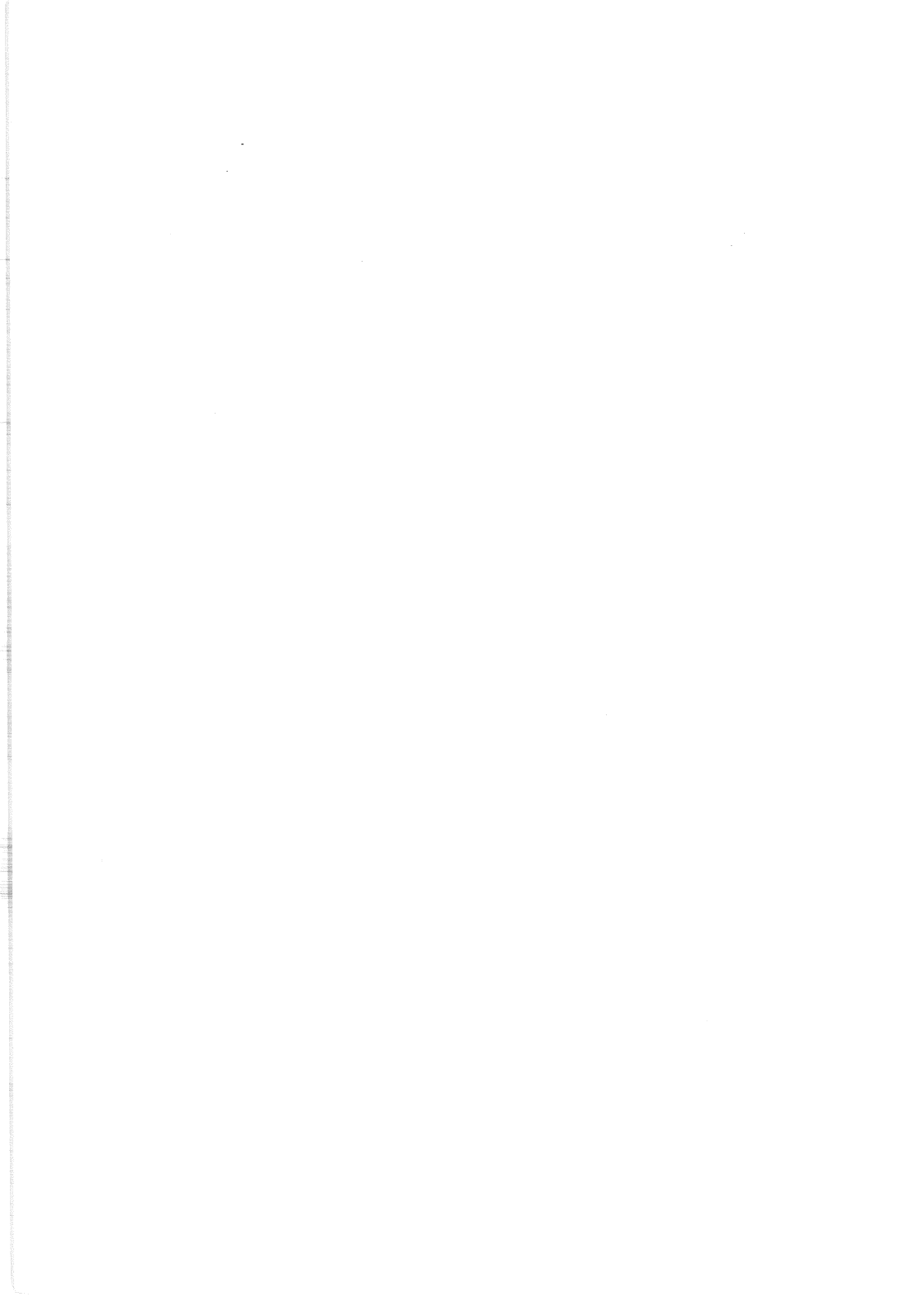


KONFLIK ACEH

**Analisis Atas Sebab-sebab Konflik
Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian**



KONFLIK ACEH

**Analisis Atas Sebab-sebab Konflik
Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian**

Oleh :

Moch. Nurhasim
Abdul Rahman Patji
Fadjri Alihar
Lamijo



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Proyek Pengembangan Riset Unggulan /
Kompetitif LIPI / Program Isu
Jakarta, 2003

Moch. Nurhasim, dkk

Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian/Moch. Nurhasim, Abdul Rachman Patji, Fadjri Alihar, Lamijo – Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI/Program Isu, 2003.

iv, 162 hlm., 23 cm

Bibliografi, lampiran

ISBN 979-3584-04-5

1. History, Modern-20th century
2. Social conflict-Aceh
3. Conflict management

I. Judul

II. Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI/Program Isu (seri penelitian)

909. 82

KATA PENGANTAR

Penelitian *"Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian"* ini merupakan bagian dari Penelitian Terpadu tentang *"Konflik Di Indonesia: Penyebab, Karakteristik dan Penyelesaian Jangka Panjang"*. Penelitian terpadu ini adalah salah satu program riset kompetitif dan diseminasi Iptek LIPI yang diharapkan dapat menghasilkan suatu hasil penelitian multidisipliner yang komprehensif dan terfokus, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar dan lebih baik bagi upaya pembangunan bangsa dan penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Kompleksitas permasalahan konflik di Indonesia, termasuk konflik berkepanjangan bernuansa separatisme yang terjadi di Aceh, tidak memungkinkan untuk dilakukan studi yang menyeluruh dalam waktu singkat. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk studi jangka panjang antara tiga sampai lima tahun; atau bahkan mungkin lebih dari lima tahun karena sifat konflik yang memang dinamis dan mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat. Walaupun demikian, sejauh memungkinkan tentu saja penelitian ini tidak mengabaikan upaya pencarian solusi alternatif yang cepat dan tepat bagi kondisi dan persoalan Aceh saat ini.

Kondisi perang yang ada di Aceh yang berlangsung sejak bulan April tidak memungkinkan para peneliti untuk melakukan studi lapangan, oleh karena itu hasil penelitian tahun pertama ini merupakan hasil studi literatur yang mendalam dan komprehensif untuk mengidentifikasi hal-hal yang sudah diketahui dan yang belum diketahui mengenai aktor, persepsi, posisi, isu dan kepentingan dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan sumber konflik di Aceh. Dari matrik dan skema yang dibuat dalam penelitian literatur ini

akan disusun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih terfokus dan mendalam untuk tahapan penelitian lapangan di tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya.

Secara keseluruhan, dari hasil penelitian tahun pertama ini telah dibuat *rapid assessment* dan *tentative academic guideline* yang bisa dijadikan dasar untuk pembentukan sistem (pre)manajemen konflik, khususnya konflik yang bernuansa kekerasan yang masih berlangsung di Aceh, antara lain melalui penghentian kekerasan, *treatment* dan relokasi. Diharapkan hasil penelitian yang menekankan sejarah dan spesifikasi daerah Aceh ini pada akhirnya bisa menjadi buku panduan manajemen konflik yang komprehensif untuk daerah yang bersangkutan. Untuk keperluan yang lebih mendesak, diharapkan pada tahun kedua atau ketiga sudah dapat dibuat sebuah model (pre)manajemen konflik yang bersifat *local-specific*, yang pada tahun-tahun berikutnya bisa diuji-cobakan secara berulang dan berkesinambungan agar di masa depan bisa terbentuk dan dikembangkan sistem manajemen konflik lokal yang selalu dinamis dan mengikuti perubahan masyarakat Aceh.

Penelitian ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, baik para tokoh Aceh dan non-Aceh pemerhati masalah Aceh yang berada di Jakarta maupun yang berada di daerah penelitian, khususnya para informan yang diundang ke Jakarta untuk wawancara mendalam. Untuk itu para peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak tersebut di atas. Di samping itu para peneliti juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan selama penelitian.

Sebagai penelitian tahap pertama, tentu saja laporan penelitian ini masih mempunyai banyak kekurangan, oleh karena itu para peneliti sangat mengharapkan kritik dan masukan yang

bermanfaat dari para pembaca agar hasil penelitian ini bisa lebih baik lagi.

Akhir kata, hasil penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para peneliti khususnya dan LIPI pada umumnya.

Jakarta, 19 Januari 2004

Proyek Penelitian “Konflik Di
Indonesia: Penyebab, Karakteristik
dan Penyelesaian Jangka Panjang”

Peneliti Utama,

Ttd.

Thung Ju Lan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK ACEH: PERSPEKTIF HISTORIS	12
BAB 3 KELOMPOK DAN AKTOR KONFLIK ACEH: ANALISIS ASAL-USUL, KEPENTINGAN DAN IDEOLOGI PERLAWANAN	32
BAB 4 UPAYA PENYELESAIAN ACEH SECARA DAMAI: PELUANG DAN KENDALA	113
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	142
DAFTAR PUSTAKA	159

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Permasalahan

Konflik Aceh tergolong dalam kategori konflik yang berlarut-larut, karena tidak pernah terselesaikan secara tuntas, baik konflik pada periode 1953, 1976, 1989-1990 maupun pada periode 1998-2003. Dari segi faktor penyebabnya, konflik Aceh dapat digolongkan sebagai konflik yang sangat kompleks (multidimensi), karena sumbernya tidak semata-mata persoalan separatisme, tetapi telah mengalami tumpang tindih dengan sumber-sumber konflik lainnya, baik faktor historis seperti: kekecewaan politis, dendam dan kebencian, ketidakpercayaan, lemahnya penegakan hukum, maupun sebagai akibat dari penyelesaian yang salah yang menyebabkan terjadinya korban-korban baru. Konflik yang berlarut-larut ini telah menyebabkan munculnya aktor-aktor baru yang sebagian besar dibesarkan oleh faktor kebencian atas kesalahan penanganan sebelumnya. Mereka kemudian memposisikan diri sebagai pihak yang paling berkepentingan dari konflik yang terjadi.

Banyak kalangan melihat bahwa Aceh adalah sebuah wilayah yang penuh dengan gegap gempita perlawanan yang sangat panjang dan melelahkan. Anehnya, dari segi sosiologis dan ekologisnya, masyarakat Aceh tetap dapat bertahan dengan mekanisme ketahanan hidupnya sendiri. Hal ini terlihat dari perkembangan konflik Aceh yang kini masih terus berlangsung, namun masyarakatnya tetap dapat bertahan hidup di tengah-tengah konflik dan pergolakan (baca: perang) yang telah beberapa kali terjadi di tanah yang acapkali disebut sebagai Serambi Mekkah. Bagaimana masyarakat Aceh dapat bertahan dalam suasana konflik yang terus menerus seperti itu?

Banyak yang menjawab bahwa hal itu harus dilihat dari faktor sosio-kulturalnya. Dengan memahami sosio-kultural masyarakat Aceh, jawaban terhadap pertanyaan tersebut baru dapat digambarkan melalui kerangka kultural mereka.

Dipandang dari konsepsi Ted Gurr, dimensi cakupan konflik Aceh sudah terlalu luas, mulai dari konflik yang paling lunak (pertentangan) hingga konflik yang paling keras (perang). Karena itu, pemetaan masalah konflik Aceh dari sejarah perlawanan mereka (1953 hingga sekarang) akan membantu kita dalam upaya melakukan resolusi konflik. Dari pemetaan tersebut, akan dibandingkan kendala dan peluang resolusi konflik atas pola-pola penyelesaian yang pernah dilakukan dan dampaknya bagi perkembangan konflik di Aceh selanjutnya. Pengalaman atas langkah-langkah penyelesaian dari kedua belah pihak yang berkonflik akan bermanfaat bagi upaya penyelesaian konflik secara hati-hati, terstruktur dan sistematis. Tujuannya adalah agar konflik dapat didekati dalam kerangka resolusi konflik yang maksimal, khususnya dalam rangka meminimalisir kesalahan-kesalahan sebelumnya. Mekanisme yang dapat digunakan ialah dengan menyusun tahap-tahap rekonstruksi sosial-politik paska konflik di Aceh sebagai agenda baru guna terciptanya perdamaian yang positif.

Melakukan rekonstruksi sosial paska konflik agar dimensi perkembangan konflik tidak meluas dan meningkat ke tahap berikutnya merupakan sesuatu yang amat penting. Berdasarkan teori resolusi konflik dan pengalaman-pengalaman beberapa negara, dalam hal ini, dimensi sosio-religius konflik di Aceh perlu mendapatkan perhatian utama. Di samping langkah-langkah politik yang telah dilakukan oleh pemerintah, gagasan rekonstruksi dari perdamaian negatif menjadi perdamaian positif yang ideal, sangat membutuhkan pemikiran yang serius dan kehati-hatian, bukan saja dari Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi sekaligus dari dalam masyarakat Aceh sendiri, aktor/pelaku, serta dari berbagai pihak lain

seperti pemerhati, intelektual/ilmuan sosial, agar Aceh terhindar dari konflik yang sama di masa yang akan datang. Oleh karena itu pula, rekonstruksi “pelaku,” atau stakeholders menjadi penting artinya bagi resolusi konflik yang dapat menciptakan rekonsiliasi sosial dan politik. Jelas, resolusi konflik tanpa melibatkan “pelaku,” akan berdampak timpang bagi upaya-upaya penyelesaian konflik secara komprehensif.

Atas dasar itulah, tim penelitian Konflik di Indonesia: Karakteristik, Penyebab dan Penyelesaian Jangka Panjang (khususnya tim penelitian konflik Aceh) hendak memahami konflik Aceh dengan memfokuskan pembahasannya atas dasar beberapa pertanyaan berikut: (1) Apa yang menjadi faktor utama munculnya “separatisme” di Aceh sejak 1953 hingga sekarang; (2) Apa keinginan dan harapan dari kelompok “separatis” di Aceh dan mengapa seperti itu? Siapa mereka ini dan apa tuntutan mereka serta mengapa demikian; (3) Bagaimana sikap dan posisi rakyat Aceh, LSM/NGO’s, Ulama, intelektual dalam konflik yang terjadi; (4) Sejauh mana kontribusi otonomi khusus bagi Aceh sejak 1963 dan NAD (1999) bagi penyelesaian konflik Aceh; (5) Apa saja langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah bagi penyelesaian konflik; (6) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegagalan upaya perdamaian; (7) Dampak positif dan negatif Operasi Militer 2003; dan (7) Apakah konflik Aceh dapat diselesaikan dengan cara damai? Langkah-langkah alternatif apa untuk menyelesaikan Aceh secara damai paska operasi terpadu?

Aceh dan Kehidupan Sosio-Kulturalnya

Aceh seringkali disebut dengan sebutan ejaan lama “Atjeh”. Menurut orang Aceh sendiri, Atjeh sebenarnya merupakan sebuah singkatan dari unsur osmosis suku bangsa yang menempati wilayahnya. Atjeh merupakan gabungan suku bangsa: “A” adalah Arab, “T” adalah Tionghoa, “J” adalah Jawa, “E” adalah Eropa, dan

"H" adalah Hindustan.¹ Namun dari segi historisnya, terutama sejak 400 SM, Atjeh sering disebut dengan *Lam Muri*, oleh sejarah Melayu disebut *Lambri (Lamiri)*, dan oleh Marco Polo disebut *Lambri*. Sesudah kedatangan Portugis dan Italia, mereka biasanya menyebut *Lambri* dengan istilah *Achem (Atjeh)*, sementara orang Arab menyebutnya *Asji*, dan penulis-penulis Perancis mengatakan: *Achem, Ache, Achin, Acheh*. Lama kelamaan, sebutan-sebutan itu akhirnya menjadi *Acheh* hingga sekarang. Ada pula yang mengatakan bahwa Aceh berasal dari kata *Atja, Atja, Atja* (Indah, Indah, Indah).² Inilah asal usul nama Aceh sekarang yang kita kenal.

Masyarakat Aceh dilihat dari segi suku bangsanya mempunyai keunikan tersendiri, karena menggambarkan suatu integrasi etnik atau campuran etnik yang akhirnya menjadi suatu etnik baru yang disebut Aceh. Etnik aslinya sendiri disebut sebagai suku Mante³ yang sekarang berdiam di pegunungan Bukit Barisan, dan diperkirakan jumlahnya sekitar 3.000an. Sementara sisanya yang lain adalah suku campuran

¹ Wawancara dengan narasumber sosiolog, intelektual dan sejarawan Aceh, Oktober 2003. Komentar narasumber ini juga dicantumkan/ditulisikan dalam bukunya A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 6

² H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm. 23. Dalam buku ini juga disebutkan sejumlah asal nama Atjeh yang dilihat dari segi mitos maupun asal-usul.

³ Bangsa Mante bertempat di sekitar Seumileuk. Letak Seumileuk antara kampung Djanthoe dengan Tangse. Bangsa Mante inilah yang berkembang biak ke seluruh lembah Aceh tiga segi dan kemudian berpindah ke tempat yang lain. Di Aceh sekarang ada Suku Gajo. Menurut *Tarich Atjeh*, pada awalnya mereka ini dikenal sebagai orang Kajo, yang artinya takut, lama kelamaan kata itu berubah menjadi Gajo. Orang-orang ini merupakan orang pindahan karena menghindarkan diri dari suatu ketakutan yang mungkin disebabkan oleh adanya ekspansi Kerajaan Sriwijaya, Siam dan Majapahit atau karena adanya perang saudara dari kerajaan-kerajaan kecil yang berkuasa di sekitar Pantai Aceh Timur dan Utara hingga melarikan diri ke pegunungan. Alasan lain mereka lari ke pegunungan, diduga karena mereka tidak mau masuk Agama Islam. Zainuddin, "*Tarich Atjeh...*," hlm. 15-16.

yang kemudian lebih dikenal dengan suku Aceh.⁴ Etnik Aceh diduga berasal dari India dan Timur Tengah. Suku bangsa Aceh ini memiliki kemiripan dengan etnik Melayu yang hidup di Nusantara maupun dengan semenanjung Melayu lainnya.⁵

Dalam catatan lain mengenai tarik Aceh dalam ejaan lama disebutkan bahwa bangsa Aceh termasuk dalam lingkungan rumpun Melayu, yaitu bangsa-bangsa: Mante (Bante), Lanun, Sakai Djakun, Semang (orang laut), Senui dan lain-lain yang berasal dari negeri Perak dan Pahang di Tanah Semenanjung Melaka. Ke semua bangsa ini menurut etnologi, ada hubungannya dengan bangsa Phonesia di Babylonia dan bangsa Dravida di lembah sungai Indus dan Gangga Negeri Baktria (Kabul, Afganistan sekarang).⁶ Bangsa ini, terutama yang dari sekitar Sungai Gangga, lari karena ketakutan, sebagian disebabkan karena perang, hingga ke selat Malaka, Peureulak, Pasai, Pidie (Poli) dan Lamuri/Aceh Besar.⁷

Secara demografis, wilayah Aceh seringkali lebih dibedakan secara vertikal dibandingkan secara horizontal, sehingga wilayahnya terbelah menjadi tiga bagian, yaitu: wilayah atas, wilayah tengah dan wilayah bawah. Secara sosio historis tampak ada unsur-unsur osmosis sosio-kultural yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya, daerah atas merupakan daerah yang sangat terbuka, karena bersentuhan dengan laut dan kondisinya agak gersang bila dibandingkan dengan daerah bawah. Pengaruh luar sangat kental dalam kehidupan orang-orang di atas. Orang-orang pesisir di daerah atas ini seringkali dianggap memiliki temperamen yang keras. Literatur suku bangsa di daerah atas ini menunjukkan pengaruh India-Hindustan (Tamil dan Keling) meskipun ada juga

⁴ Wawancara dengan sosiolog Aceh, Oktober 2003.

⁵ A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 7.

⁶ Zainuddin, "Tarich Atjeh...", hlm. 15.

⁷ *Ibid.*, hlm 17.

pengaruh Melayu, Jawa, Tionghoa dan lainnya. Tidak ada penjelasan tentang hubungan antara dominasi suku bangsa tertentu di daerah atas ini dengan sifat konflik di Aceh sekarang, namun ditengarai bahwa hal itu merupakan salah satu faktor penyebab mengapa perlawanan selalu tumbuh dan berkembang di daerah-daerah atas dibandingkan dengan daerah-daerah bawah.

Dalam perkembangannya sekarang, Aceh memang telah banyak mengalami perubahan dan sudah amat berbeda dengan masa historisnya dahulu. Meskipun dilihat dari proses osmosisnya ada perbedaan-perbedaan pengaruh budaya di setiap daerah, namun sesungguhnya osmosis itu yang justru menyebabkan ke-Aceh-an menjadi unsur pemersatu di antara mereka, karena seperti telah disinggung di atas, memang budaya campuranlah yang telah melahirkan bangsa Aceh. Selain itu, budaya campuran telah mengalami perkembangan yang sedemikian rupa, sehingga sulit untuk dibedakan lagi unsur-unsur asalnya,⁸ karena apa yang disebut dengan budaya Aceh telah menyatu dengan kehidupan mereka sehari-hari.⁹ Etnik Aceh memang sebagian besar hidup di daerah pesisir (atau wilayah atas Aceh), yaitu Pidie, Biruen, Lhokseumawe-Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat dan Aceh Selatan -- meskipun dua daerah yang disebut terakhir ini dianggap banyak dipengaruhi oleh budaya Minangkabau-Melayu. Mereka ini sangat dominan dalam bidang politik dan pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan.¹⁰ Sementara sub etnik yang lain, yaitu Aceh-Alas, kebanyakan berada di Aceh Tenggara dan di Aceh Singkil. Aceh Barat dan Selatan banyak dipengaruhi oleh etnik Minang yang kerap kali disebut sebagai etnik *aneuk Jamee* (etnik pendatang), yang

⁸ Meskipun demikian masih ada Aceh-Alas, Aceh-Gayo, Aceh-Tamiang, Aceh Simeulu, dan di pedalaman juga masih ada sebutan Aceh Singkil dan Pulau Banyak. Ini menandai bahwa unsur pengaruh pembentuknya masih ada hingga sekarang. Rani, "Sejarah Peradaban...", hlm. 3.

⁹ Wawancara, Oktober 2003.

¹⁰ Rani, "Sejarah Peradaban...", hlm. 39.

sebenarnya merupakan hasil perkawinan orang-orang Minang dengan orang-orang Aceh.¹¹

Wilayah Aceh sekarang, dihuni oleh kurang lebih 4,2 juta penduduk, berstatus otonom dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).¹² Wilayahnya sendiri sangat luas, sekitar 57.366,57 km² yang meliputi 119 pulau, 35 gunung, dan 73 sungai. Sebagian besar wilayah daratnya adalah kawasan hutan yang sangat luas, sekitar 4.130.000 ha (74,54%) dari sebagian dari kawasan hutan tersebut tergolong hutan lindung (25, 46%), sisanya adalah hutan produksi dan kawasan pemukiman serta pertanian.

Dari segi pemerintahan, NAD terdiri atas 18 kabupaten, satu kota, satu kota administratif, 454 kecamatan, 5.862 *gampong* (desa).¹³ Sensus Penduduk (SP) di Aceh tahun 2000 yang diumumkan Agustus 2001, menunjukkan jumlah penduduk Aceh tahun 2.000 tercatat sekitar 4.010.865 jiwa, dengan perbandingan jumlah perempuan mencapai 2.012.596 jiwa, dan jumlah penduduk laki-laki 1.998.269 jiwa. Kondisi penduduk Aceh ini cukup memprihatinkan karena dari 4.166.040 penduduk Aceh tahun 2002, 33, 84% atau 1.409.828 orang di antaranya kini masuk dalam klasifikasi miskin. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2000 atau 2001 yang hanya sebanyak 1.101.368 orang (26,50%) dan 1.223.704 orang (30,43%). Penyebabnya adalah *double impact*, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan imbas konflik bersenjata di Aceh. Sebagai imbas konflik, banyak yang kehilangan mata pencaharian, dan banyak pula yang tak berani melakukan pekerjaan apapun di desanya.

Dari segi pendidikannya, penduduk Aceh tergolong sangat terbelakang, karena 70, 65 persen dari penduduknya tahun 1993

¹¹ Wawancara, Oktober 2003.

¹² Aceh Dalam Angka, 2002.

¹³ *Ibid.*

berpendidikan rendah (tamatan Sekolah Dasar), walaupun pada tahun 2002 jumlah tersebut sudah menurun menjadi 65,3% (lihat table di bawah). Sebagian besar penduduk Aceh berada di pedesaan (74 persen), sisanya 8,7 persen di perkotaan. Tak mengherankan apabila sebagian besar dari penduduk pedesaan di Aceh adalah yang berpendidikan rendah, dan hanya sebagian kecil saja yang dapat mengenyam pendidikan tinggi.

Tabel 1
Tingkat Pendidikan Penduduk Aceh tahun 1993 dan 2002

Tingkat Pendidikan	1993 (Masa DOM)	2002
Tidak sekolah	8,88%	-
Tidak tamat SD	30,80%	-
Tamat SD	30,97%	65,3%
SMP	14,82%	17,9%
SMA	12 %	10,8%
D1-D3	1,32 %	-
Perguruan Tinggi	1,09%	5,79%
Total	100 %	100%

Perkembangannya pada tahun 2002 cukup memprihatinkan, karena dari 15 kabupaten dan kota di propinsi berpenduduk sekitar 4,3 juta jiwa itu terdapat tujuh daerah yang kualitas pendidikannya sangat memprihatinkan, yakni Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur, dan Aceh Tengah.¹⁴ Rasio anak yang sekolah dan anak tidak bersekolah lagi yang terburuk ditemukan di wilayah-wilayah Aceh basis konflik seperti di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Utara. Menurut data Syahbuddin AR, di kedua kabupaten ini tahun 2003 terdapat 25 persen anak yang dulu terdaftar di sekolah, sekarang "menghilang."¹⁵ Jumlah anak usia putus sekolah mulai dari SD sampai SLTA di Propinsi Nanggroe Aceh

¹⁴ www.smu.net

¹⁵ Kompas, 1 Mei 2003.

Darussalam (NAD), mencapai 25 ribu sampai 35 ribu orang. Sementara penderita buta aksara untuk usia 10-44 tahun sekitar 62 ribu orang, dan buta aksara di bawah usia 10 tahun ditaksir mencapai ratusan ribu orang.¹⁶

Dari segi budaya, budaya Aceh secara umum dapat dikatakan sebagai budaya yang sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Kultur Aceh menyangkut alam pikiran orang Aceh; keyakinan orang Aceh; dan rasa bersatu (*sense of belonging*) orang Aceh. Sebagai sebuah bangsa yang telah memiliki tatanan sosial sendiri sejak lama, maka sesungguhnya Aceh merupakan sebuah bangsa yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamkan pada 1945. Tatanan sosialnya, digambarkan dalam suatu konfigurasi sosial sebagai berikut: *Pertama*, menyangkut kepemimpinan, terbagi atas unsur eksekutif (*Poteu Meureuhom*); yudikatif (*Syiahkuala*); legislatif (*Putroe Phang*), dan pertahanan (*Lakseumana*). Sistem kekuasaan ini direkatkan oleh nilai-nilai dan norma-norma adat dalam tangkup kaidah Islam. Dari sini pemimpin agama merupakan salah satu simbol utama dalam konfigurasi sosial budaya Aceh. Unsur adat dan agama merupakan dua unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak hidup masyarakat Aceh.¹⁷

Kondisi ini secara derivatif menurun ke dalam sendi-sendi institusi Aceh yang lebih kecil seperti dalam struktur komunitas desa (*gampong*), yang terefleksi dalam tokoh *Imeum Meunasah* sebagai simbol hukum; tokoh *Keuchiek* sebagai simbol penataan adat; yang diayomi oleh semacam "dewan orang-orang tua" (*Tuha Peut*) sebagai cerminan derivatif unsur legislatif *gampong*. Orang Aceh memandang *Imeum Meunasah* sebagai "ibu" dan *Keuchiek* sebagai "ayah." Konfigurasi adat dan agama dalam tatanan hidup mereka ini menjadi benteng dan referensi orang Aceh dalam merepresentasikan dirinya, dan dalam menghadapi dan mempertahankan diri dari ancaman

¹⁶ www.koalisiham.com

¹⁷ Tim Peneliti LIPI, *Bara Dalam Sekam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 54.

luar.¹⁸ Namun, dalam sejarahnya konfigurasi sosial seperti itu berubah sesuai dengan perubahan zaman, terutama sejak adanya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Otonomi Daerah, di mana mulai ada penyeragaman dan pembedaan antara unsur-unsur adat/agama dengan unsur kekuasaan pemerintahan. Selain itu, akibat adanya eliminasi Islam dalam konteks kenegaraan oleh Orde Baru, maka terlihat pula bahwa ideologi Islam yang dulu merupakan bagian dari tatanan sosial Aceh dipinggirkan. Peminggiran peran ulama (PUSA) setelah peristiwa DI/TII 1953-1963, yang digantikan dengan Majelis Ulama Indonesia Aceh pada masa Orba, menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem kepemimpinan rakyat Aceh yang pada mulanya dipimpin oleh golongan Ulama Dayah atau ulama golongan tradisional.

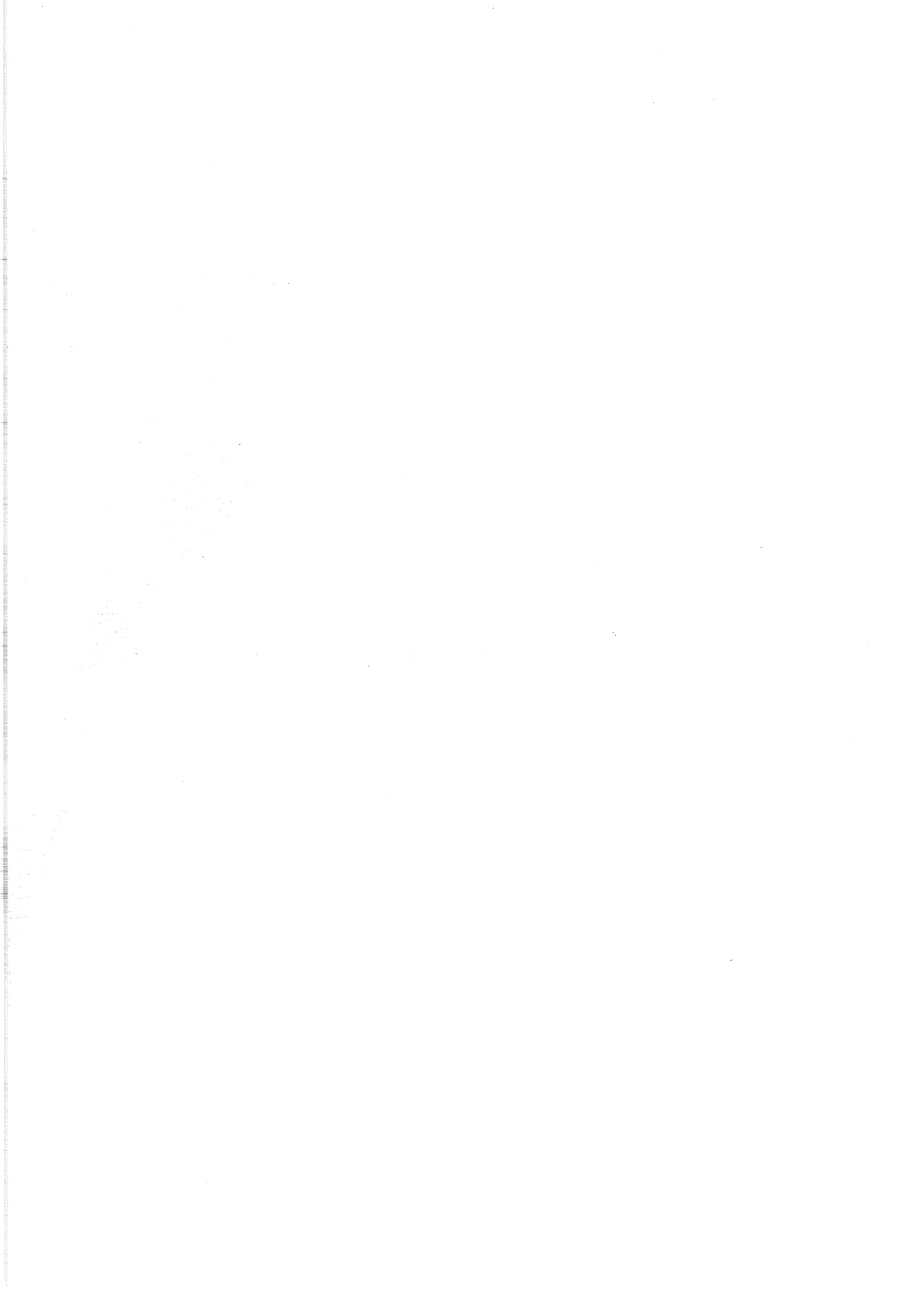
Perubahan peran ulama dalam politik sejak peristiwa DI/TII telah menyebabkan lembaga ini seperti "mati suri," bahkan PUSA yang didirikan sejak 1933 pun mengalami hal yang serupa. Tak mengherankan, konteks kepemimpinan kemudian diambil alih oleh birokrasi-birokrasi lokal dan pusat, melalui penerapan UU No. 5/1974, dan ini merupakan faktor penyebab mengapa ulama bergeser perannya dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh saat ini. Selain faktor tersebut, pendidikan dan mulai banyaknya lulusan perguruan tinggi telah pula mempengaruhi perubahan peran ulama dalam politik dan kekuasaan di Aceh. Meskipun demikian, bukan berarti peran mereka dalam kehidupan sosial sudah tidak ada lagi, tetapi mengalami pergeseran pengaruh, di mana sudah tidak ada ulama besar yang bisa ditemukan di Aceh paska Teungku¹⁹ Daud Beureueh dan paska peristiwa DI/TII 1953-1963. Namun demikian,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁹ Dalam budaya Aceh ada perbedaan gelar antara ulama dengan kaum bangsawan. Ulama sering dipanggil dengan teungku, sementara bangsawan sering dipanggil dengan teuku di depan nama mereka. Karena itu, apabila di dalam tulisan ini sebuah nama didahului oleh gelar Teungku berarti dia adalah ulama sementara jika didahului oleh gelar Teuku berarti yang bersangkutan adalah bangsawan.

dalam komunitasnya masing-masing, dan secara umum, peran mereka ini masih cukup dihormati dan masih dianggap sebagai lembaga yang paling terhormat dibandingkan dengan birokrasi dan partai-partai politik. Dengan kata lain, posisi ulama tetap penting, karena ia adalah simbol keagamaan dan adat bagi orang Aceh yang terus terpelihara hingga sekarang.

Tak mengherankan apabila akibat perubahan peran dan posisi ulama dalam politik, kekuasaan dan kehidupan sosial masyarakat Aceh tersebut, maka dalam situasi konflik seperti sekarang, tidak ada tokoh selenggaris Daud Beureueh yang mampu memimpin dan mengarahkan bangsa Aceh. Sekarang, kepemimpinan rakyat Aceh diambil alih oleh golongan-golongan baru yang semakin menguat seperti golongan intelektual, mahasiswa, GAM dan sebagainya, meskipun di beberapa daerah masih ada beberapa ulama yang cukup mempunyai pengaruh. Pergeseran ini tampak jelas dalam konflik yang terjadi sejak 1998 yang lalu, di mana walau ada keinginan untuk memperkuat posisi ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh dengan dibentuknya Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), namun peran mereka tetap masih terlalu kecil sehingga ada kesan ulama cenderung tidak dilibatkan dalam situasi konflik sekarang ini.



BAB 2

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK ACEH: PERSPEKTIF HISTORIS

Konflik merupakan suatu hal yang umum terjadi di dalam kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik akan terjadi apabila suatu keinginan atau tujuan tertentu tidak bisa terpenuhi atau dihalang-halangi oleh pihak lain. Konflik bisa bersifat horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara sesama kelompok individu, masyarakat dan/atau rakyat, sedangkan konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara masyarakat atau rakyat dengan pemerintah, antara “yang diperintah” dengan “yang memerintah.”

Sumber konflik sangat jarang diakibatkan oleh satu sebab, kebanyakan memiliki sebab-sebab ganda atau kombinasi dari masalah-masalah dalam hubungan antara pihak yang berkonflik. Bahkan, bukan suatu hal yang mustahil bila konflik yang terjadi disebabkan oleh akumulasi masalah multiaspek, seperti ekonomi, identitas kultural, kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya.

Berbicara tentang konflik di Indonesia, maka konflik Aceh merupakan salah satu konflik laten yang tunasnya telah tumbuh sejak masa-masa awal kemerdekaan dengan berbagai faktor penyebabnya. Konflik yang terjadi di Aceh bukan baru kemarin terjadi. Konflik di Aceh telah terjadi beberapa kali sepanjang sejarah. Dari masa ke masa, konflik yang terjadi di Aceh berbeda latar belakang penyebabnya. Sejarah Aceh memang sarat konflik. Bahkan, keseratan itu bukan hanya ketika Indonesia sudah terbentuk, tapi jauh sebelum itu, di masa ketika Islam pertama kali mencium bumi rencong itu.

Akar konflik dan ketahanan untuk menghadapi "agresor" dari luar, sudah menjadi watak asli bangsa Aceh.

Mencermati konflik di Aceh, mengharuskan pemerintah untuk memilah lebih jeli berbagai faktor yang melatarbelakanginya, agar ditemukan suatu ramuan solusi tepat bagi penyelesaiannya. Ketidaksederhanaan konflik di Aceh menuntut kehatian-hatian dan proses kesabaran untuk menanganinya. Benang kusut konflik Aceh yang telah tergulung sekian puluh tahun tidak bisa diurai dan diselesaikan dalam waktu singkat. Pendekatan militer (*security approach*)—sebagaimana yang diterapkan sejak tahun 1970-an di Aceh hingga sekarang—bukan merupakan jalan tepat bagi pemecahan konflik Aceh. Pendekatan militer semasa Orde Baru masih menyisakan trauma di kalangan masyarakat Aceh. Cara itu justru menghasilkan dendam turunan, yang pada akhirnya menciptakan konflik lingkaran setan yang tiada ujungnya.

Pemahaman akar masalah yang melatarbelakangi munculnya konflik di Aceh mutlak dilakukan, baik sejak masa-masa awal kemerdekaan, terjadinya pemberontakan DI/TII hingga munculnya GAM, masa DOM, maupun paska DOM. Pemahaman tentang faktor-faktor penyebab munculnya konflik di Aceh akan mempermudah dalam upaya mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik Aceh.

Faktor-Faktor Penyebab Konflik Aceh: Perspektif Historis

Dalam lintasan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Aceh merupakan wilayah yang memiliki kontribusi cukup besar bagi pertumbuhan Republik Indonesia. Aceh memiliki catatan yang panjang tentang perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Perjuangan Aceh dalam panggung revolusi nasional merupakan salah satu *icon* perjuangan yang paling menonjol dibandingkan daerah lainnya.

Selama masa revolusi fisik paska proklamasi kemerdekaan, Aceh merupakan satu-satunya wilayah Republik Indonesia yang benar-benar merdeka dan tidak bisa diduduki kembali oleh Belanda. Bahkan, ketika terjadi Agresi Militer Belanda I bulan Juli tahun 1947, Aceh dijadikan sebagai daerah militer khusus dan Daud Beureueh ditunjuk sebagai gubernur militernya. Begitu pun ketika Agresi Militer Belanda II pada bulan Desember 1948, Aceh sekali lagi “menyelamatkan” muka Indonesia sebagai daerah Indonesia yang tidak bisa dijamah oleh Belanda dan membuktikan bahwa Indonesia masih eksis. Kenyataan sejarah ini menjadikan rakyat Aceh merasa memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap pemerintah pusat.

Hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat menyajikan suatu gambaran yang unik dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Kekhasan sejarah dan kebudayaan masyarakatnya menjadikan Aceh sebagai daerah khas yang harus dihadapi secara arif oleh pemerintah pusat, terutama pada masa-masa awal kemerdekaan.²⁰

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh merupakan sebuah komunitas yang unik dengan tradisi perlawanannya yang kental. Nasionalisme yang dikumandangkan sejak abad XX pun bahkan tidak mampu menyurutkan primordial keacehan. Semangat primordial yang terpupuk oleh perlawanan yang terus-menerus sejak Belanda memaklumkan perang tahun 1873. Ini menjadi problem tersendiri dalam proses pembentukan *nation-state* Indonesia.²¹

Fenomena primordialisme keacehan ini menjadi lebih tampak ketika rakyat Aceh merasa disakiti dan dibohongi. Kenyataan ini terekam secara jelas dalam perjalanan hubungan politik Aceh dengan

²⁰ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik. Kasus Darul Islam Aceh*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 1.

²¹ Agus Sudiby, “Realitas Aceh dan Realitas Media,” dalam *KOMPAS*, 11 Juni 2003.

pemerintah pusat di masa revolusi. Ketika masa revolusi kemerdekaan berkecamuk, konsolidasi kekuasaan pemimpin pusat dengan para pemimpin Aceh sangat kuat dan bahkan mungkin saling tergantung. Namun, tatkala revolusi berakhir, hubungan Aceh dan pemerintah pusat pun “putus”. Pemerintah pusat seolah-olah mencampakkan pengorbanan Aceh dan melupakannya, bahkan yang lebih menyakitkan lagi bagi rakyat Aceh adalah dibatalkannya status propinsi Aceh dan kemudian disatukan dengan Sumatera Utara. Hal ini berakibat panjang dan menimbulkan rasa kedaerahan yang kuat, yang kemudian mengarahkan rakyat Aceh untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat.

Salah satu kenyataan yang sangat menonjol tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat adalah bahwa pemberontakan itu meletus kurang dari empat tahun sesudah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada Desember 1949. Dengan memperhatikan besarnya sumbangan yang telah diberikan rakyat Aceh dalam perjuangan kemerdekaan, sebagai wujud kesetiaan mereka pada pemerintah pusat pada saat yang sangat kritis di masa revolusi, menjadi terasa mengherankan apabila ternyata mereka kemudian berbalik menentang Pemerintah Pusat segera setelah kedaulatan penuh tercapai.²²

Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pemberontakan Aceh babak pertama terjadi pada September tahun 1953, ketika Teungku Daud Beureueh mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII). Pemberontakan Daud Beureueh, yang lebih dikenal dengan sebutan pemberontakan Darul Islam, merupakan embrio bagi gerakan separatis di Aceh pada masa-masa selanjutnya. Daud Beureueh, yang juga didukung oleh para pemimpin dan ulama Aceh, melakukan pemberontakan bukan tanpa sebab. Pemberontakan itu disebabkan oleh adanya perlakuan tidak adil itu dan rasa frustrasi yang telah meluas terhadap pemerintah pusat. Perlakuan tidak adil itu dirasakan

²² Nazaruddin Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 102.

sejak awal tahun 1950an, terutama sejak pemerintah pusat menggabungkan Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara, padahal pada bulan Desember tahun 1949 Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara telah menetapkan Aceh sebagai propinsi²³ untuk menggantikan status daerah militer sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa pada masa perjuangan revolusi kemerdekaan, rakyat Aceh telah dengan rela menyumbangkan harta mereka demi perjuangan Indonesia, sehingga berkat sumbangan itu Indonesia mampu membeli pesawat terbang yang kemudian diberi nama *Seulawah RI-001* dan *Dakota-002*.²⁴ Selain itu, dengan janji-janji Presiden Soekarno bahwa jika perjuangan kemerdekaan selesai Aceh diperbolehkan menjalankan syariat Islam, maka sekali lagi rakyat Aceh, dengan dorongan dari Daud Beureuh, turut aktif mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun, pada masa paska kemerdekaan, janji bahwa Aceh dapat menjadi suatu wilayah tersendiri yang menegakkan syariat Islam, ternyata tidak dilaksanakan. Bahkan status otonomi Aceh yang diterima sejak tahun 1949 dihapuskan, sementara Daud Beureuh beserta pengikutnya yang menuntut otonomi khusus bagi Aceh sebagai alternatif agar Aceh tak digabungkan dengan propinsi Sumatera Utara malah dicurigai²⁵

Penghapusan status propinsi Aceh yang kemudian hanya diberi status karesidenan, merupakan gejala pertama dari krisis kepercayaan rakyat Aceh yang merenggangkan hubungan harmonis Aceh dengan pusat. Krisis yang menggiring bawah sadar kolektif

²³ Ahmad Syafii Ma'arif, "Drama di Tanah Rencong, Dosa Kolektif", dalam Abdul Wachid B.S., Fikar W. Eda, dan Lian Sahar (eds.), *Aceh Mendesah dalam Nafasku. Bunga Rampai Menyemai Bumi Tumpah Darah*, (Banda Aceh: Penerbit kaSUHA, 1999), hlm. 233.

²⁴ Tim Peneliti LIPI, "Bara Dalam...", hlm. 33.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

masyarakat Aceh ini lalu cenderung mengulang pola sejarah perjuangan mereka. Ketika pengorbanan dan kesetiaan Aceh terhadap Republik Indonesia tidak dihargai, bahkan cenderung dilupakan, sementara ruang untuk kompromi dan tawar-menawar sangat terbatas, atau bahkan tertutup, maka orang Aceh terdorong untuk memilih dan berpikir secara hitam putih, yaitu: “*Meuhan ke Kee, bah keu Jih*,” (kalau tak untukku, biarlah untuknya).²⁶ Kalimat demikian muncul ketika seorang Aceh mendapatkan tantangan dan merasa dihina, dikhianati, seperti yang terjadi dengan dihapuskannya status Propinsi Aceh pada tahun 1950, di mana saat itu Aceh sebenarnya sudah meliputi Langkat dan Tanah Karo. Hal ini dapat dimengerti karena status propinsi bagi orang Aceh bukan hanya merupakan sumber kekuasaan bagi para pemimpin politik agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat, tetapi juga merupakan sumber proteksi bagi nilai-nilai agama rakyat Aceh.²⁷

Ketika salah satu sumber proteksi itu dicabut secara tidak adil, ditambah lagi dengan berbagai kebohongan yang diterimanya, di mana janji-janji pemerintah pada masa revolusi tidak menjadi kenyataan, maka semuanya akhirnya bermuara pada letupan besar pemberontakan sebagai bentuk protes keras, khususnya setelah jalan kompromi dan negosiasi tak dihiraukan pusat. Dengan demikian, apa yang pernah dikemukakan oleh Daud Beureueh bahwa berakhirnya otonomi Aceh yang memasukkan Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara akan menimbulkan reaksi dan dampak yang luas di Aceh,²⁸ menjadi suatu kenyataan. Rakyat Aceh sangat kecewa dan tidak bisa menerima perlakuan semena-mena pemerintah pusat. Karena alasan

²⁶ Hasballah M. Saad, “Aceh dalam Pangkuan Ibu Pertiwi”, dalam Musni Umar (ed.), *Aceh Win-win Solution*, (Jakarta: Forum Kampus Kuning, 2002), hlm. 39.

²⁷ Nazaruddin, “Pemberontakan Kaum Republik...,” hlm. 123.

²⁸ Clive J. Christie, *A Modern History of Southeast Asia: decolonization, nationalism, and separatism.*, (New York: Tauris Academic Studies, I.B. Tauris Publisher, 1996), hlm. 148.

itulah Daud Beureueh melakukan perlawanan, dan gerakan yang ia lakukan didukung oleh hampir seluruh masyarakat Aceh.

Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Darul Islam Daud Beureueh adalah para ulama yang memegang kekuasaan paska perang Cumbok.²⁹ Perang Cumbok merupakan “perang saudara” antara para *ulebalang*/birokrat lokal melawan para ulama yang tergabung ke dalam PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh, berdiri tahun 1939). Perang ini pecah di wilayah Pidie-Sigli bulan Desember 1945 dan berakhir pada bulan Januari 1946 dengan kemenangan dipihak ulama di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh. Paska perang Cumbok, sebenarnya pemerintah pusat memiliki banyak kesempatan untuk menanamkan pengaruhnya di Aceh. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi, walaupun pada pertengahan tahun 1947 Pemerintah Pusat sudah mengangkat Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat mayor jenderal, namun penghargaan yang demikian tinggi itu kemudian berubah menjadi penghinaan ketika Kabinet Hatta menghapus status propinsi Aceh dan memasukkan Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara.³⁰

Perubahan status Aceh tersebut merupakan pemicu utama lahirnya gerakan perlawanan Daud Beureueh dan pengikutnya untuk menentang pemerintah. Mereka menuntut agar Aceh diberi otonomi khusus sebagai alternatif penghapusan status propinsi Aceh, namun pemerintah tidak mengabulkannya. Mereka menggunakan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) sebagai media untuk melakukan perlawanannya. Untuk mendapatkan dukungan rakyat, mereka mengkampanyekan anti tentara dan NKRI. Selain itu, PUSA juga memperkuat gerakannya dengan cara melakukan kongres. Kongres PUSA pertama diadakan pada tanggal 22-27 Desember 1950 dan yang kedua pada tanggal 22-26 Maret 1951. Beberapa bulan paska

²⁹ Lihat Clive J. Christie, *Ibid.*, hlm. 146.

³⁰ Nazaruddin, “Pemberontakan Kaum Republik...,” hlm 192-193.

kongres PUSA kedua, terjadi pertentangan lagi antara para ulama (PUSA) dengan uleebalang yang dipicu oleh razia senjata oleh TNI pada bulan Agustus tahun 1951 melalui “Operasi Merdeka Territorium I”. Dalam razia ini, penguasa militer berhasil menyita kebanyakan senjata PUSA.³¹ Konflik horizontal antara PUSA dan uleebalang itupun berujung dengan terjadinya pembunuhan terhadap pendukung uleebalang oleh pemuda-pemuda dari kelompok PUSA pada tahun itu juga.³²

Perjuangan Daud Beureueh menuntut otonomi Aceh terus berlanjut semakin kuat. Pemerintah, dalam hal ini Kabinet Natsir, berupaya meredakan gencarnya tuntutan itu dengan menarik Daud Beureueh ke Jakarta sebagai gubernur yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, tetapi Daud Beureueh tak mau menerima pengangkatan itu. Daud Beureueh semakin kecewa ketika seorang menteri dalam negeri (dari PNI) menghentikan pangkat gubernurnya pada tahun 1952.³³ Puncak kekecewaannya terjadi tahun 1953, terutama setelah melihat perkembangan bahwa tuntutan otonomi Aceh tidak akan mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat. Silih bergantinya kepemimpinan di pusat pada saat itu juga menyebabkan kebijakan-kebijakan politiknya tentang status Aceh tidak jelas.

Dalam upaya melanjutkan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat, dan untuk menggalang kekuatan, Daud Beureueh melaksanakan Kongres PUSA ketiga di Medan pada tanggal 11 April 1953 yang dilanjutkan dengan Kongres PUSA keempat pada tanggal 25-29 April 1953 di Langsa. Di sana ia membentuk organisasi Bekas Pejuang Aceh (BPA). Akhirnya, kekecewaan yang telah terpendam sejak dihapuskannya status propinsi Aceh pun meledak menjadi sebuah pemberontakan Darul Islam pada 20 September 1953, dan

³¹ *Ibid.*, hlm. 122.

³² Tim Peneliti LIPI, “Bara Dalam...,”

³³ Nazaruddin, “Pemberontakan Kaum Republik...,”

sehari kemudian Daud Beureueh mengumumkan deklarasi Negara Islam Indonesia.³⁴

Satu karakter penting dari pemberontakan Darul Islam di Aceh ialah bahwa sejak semula para pemimpinnya tidak mempunyai niat memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Daud Beureueh hanya ingin membentuk Negara Islam, yaitu Negara Islam Federalis, tetapi masih dalam kerangka Negara Kesatuan RI,³⁵ sebab para pemimpin Darul Islam Aceh telah menerima bahwa transformasi kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada bulan Desember tahun 1949 membuka peluang perjuangan untuk bersatu dengan Indonesia seutuhnya dan tidak pernah berpikir bergabungnya Aceh ke Indonesia karena paksaan.³⁶ Pemberontakan Daud Beureueh ini murni konflik pusat dan daerah -- jauh dari istilah separatisme, ingin memisahkan diri -- yang bersumber pada persoalan identitas politik dalam perjalanan pembangunan *nation-state* Indonesia.

Pemberontakan Darul Islam Daud Beureueh ini pada awalnya disikapi pemerintah dengan kekuatan senjata, namun sejak tahun 1955 lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif melalui negosiasi-negosiasi, setelah dipandang tidak ada cara lain bagi penyelesaian masalah Aceh selain memberikan status propinsi dan membiarkan rakyat Aceh menyelesaikan persoalannya sendiri. Untuk itu, pemerintah mengambil dua langkah vital. Pertama, pemerintah berusaha meyakinkan para pemimpin Aceh dengan janji bahwa Aceh akan memperoleh status istimewa jika mereka mengakhiri pemberontakan.³⁷ Kedua, pemerintah mengirim Sjamaun Gaharu sebagai tokoh kunci untuk menyelesaikan konflik Aceh itu, dengan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁵ Wawancara dengan Otto Syamsuddin Ishak, M.Si., Rabu, 3 September 2003.

³⁶ Clive, "A Modern History of Southeast Asia ...," hlm. 158.

³⁷ Nazaruddin, "Pemberontakan Kaum Republik...", hlm. 292.

ditunjuknya ia sebagai pimpinan militer tertinggi di Aceh yang bertugas mensosialisasikan gagasan-gagasan penyelesaian DI/TII.

Sjamaun Gaharu merumuskan langkah-langkah penyelesaian politik, dan kebijakan keamanan yang ditempuhnya kemudian berdasarkan pada rumusan tersebut. Sjamaun Gaharu juga terbukti bersikap lebih lembut kepada para pemimpin pemberontak. Ia melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin pemberontak untuk berunding, termasuk dengan Daud Beureueh. Hasil dari pertemuan itu disepakati dalam *Ikrar Lamteh*, yang berbunyi, “*Kami putera-puteri Atjeh, di pihak manapun berada akan berdjuang sungguh-sungguh untuk mendjundjung tinggi kehormatan dan kepentingan rakyat Atjeh.*”

Seluruh upaya mengakhiri pemberontakan Darul Islam Daud Beureueh dianggap selesai dengan diberikannya status Aceh sebagai *Daerah Istimewa* dengan otonomi yang luas, khususnya dalam urusan agama, adat, dan pendidikan pada tahun 1959, ditambah pula dengan penyerahan diri Daud Beureueh secara suka rela dan terhormat pada tahun 1962. Status keistimewaan Aceh itu kemudian diformalkan melalui UU No.18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Aceh memperoleh keistimewaan di bidang agama, adat-istiadat, dan pendidikan.³⁸ Keberhasilan negosiasi untuk menyelesaikan pemberontakan DI/TII Aceh tersebut menjadikan Aceh kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan Aceh tetap menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Walaupun bisa diselesaikan, konflik selalu saja menimbulkan korban, dan korban jiwa akibat pemberontakan DI/TII Daud Beureueh yang berlangsung sekitar satu dekade tersebut memakan korban sebanyak 4.000 jiwa.³⁹

³⁸ Tim Peneliti LIPI, “*Bara Dalam...*,” hlm. 35.

³⁹ Al Chaidar, “sejarah Pergolakan Rakyat Aceh”, dalam *Republika*, 15 Februari 1999.

Faktor-Faktor Penyebab Konflik Aceh Periode DOM

1. Periode 4 Desember 1976-1989.

Belum hilang benar dalam ingatan rakyat Aceh tentang peristiwa pemberontakan Darul Islam, Aceh harus kembali mengalami gejolak yang lebih hebat lagi dengan lahirnya gerakan *Acheh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF), yang kemudian dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang diproklamkan oleh Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 di Pidie. Hasan Tiro memproklamasikan “kemerdekaan” Aceh dan menyebut wilayahnya sebagai “Negara Aceh, Sumatera.”⁴⁰

Dilihat dari sudut pandang Republik Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang wilayahnya mencakup dari Sabang sampai Merauke, proklamasi “Aceh Merdeka” itu merupakan “mendirikan suatu Negara dalam Negara”, atau dengan istilah lain sebagai bentuk pemberontakan atau gerakan separatisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang syah dan telah menjadi anggota PBB sejak tahun 1950.⁴¹

Faktor penyebab terjadinya konflik babak kedua di Aceh ini adalah kemarahan kelompok tersebut atas penyelenggaraan pemerintahahn Aceh di bawah orang-orang Jawa. Mereka menganggap orang Jawa sebagai penjajah Aceh. Gambaran tersebut terlihat nyata dalam ungkapan Tg. Abdullah Syafe’i, panglima GAM. Ia berpendapat bahwa antara bangsa Aceh dengan bangsa Indonesia Jawa tidak ada hubungan sama sekali. Secara historis Aceh adalah suatu bangsa yang memiliki struktur sendiri. Kalaupun Aceh sekarang

⁴⁰ Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 70.

⁴¹ Usman Hasan, “Konflik Aceh yang Multi Dimensional dan Penyelesaiannya Secara Damai”, dalam Musni Umar (ed.), *Aceh Win-win Solution*, *op.cit.*, hlm. 86.

di bawah Indonesia, itu karena kesalahan Belanda, sebab sejak tahun 1873 bangsa Aceh diberi kemerdekaan oleh Inggris.⁴²

Perbedaan persepsi historis ini, ditambah dengan adanya kegiatan eksplorasi alam besar-besaran di Aceh Utara dan Aceh Timur sejak awal tahun 1970an⁴³ yang merugikan rakyat Aceh karena penggusuran tanah, ganti rugi tanah yang tak sepadan, serta intimidasi, kemudian dijadikan modal kampanye oleh gerakan ini untuk menghasut rakyat agar melawan pemerintah dan berusaha memerdekakan diri. Hasan Tiro, sekembalinya dari Amerika pada awal Orde Baru, gencar menyerukan agar rakyat Aceh bergerilya melawan pemerintah. Ia mengaku telah mampu meyakinkan presiden Amerika, Nixon, untuk mendukung Aceh Merdeka. Kampanye Hasan Tiro mendapat dukungan para tokoh Aceh garis keras.⁴⁴

Selain itu, lahirnya gerakan Hasan Tiro ini juga disebabkan oleh pemberlakuan UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang juga diikuti oleh pencabutan UU No.18 tahun 1965. Pencabutan UU No.18 tahun 1965 -- sebagai salah satu perundangan yang memformalkan Aceh sebagai daerah istimewa -- dipahami oleh rakyat Aceh sebagai pencabutan Aceh sebagai daerah istimewa.⁴⁵

Namun, absennya sentimen keagamaan dalam penyebaran gagasan Aceh Merdeka menyebabkan gerakan ini pada masa-masa

⁴² *Rakyat Merdeka*, 22 Agustus 1999.

⁴³ Tahun 1974 Aceh mencatat sejarah baru dalam pembangunan daerahnya ketika ditemukan sumber gas alam yang tergolong terbesar di dunia. Penemuan ini bersamaan dengan krisis energi yang melanda dunia, sehingga usaha pengeksplorasianannya dipercepat dengan miliaran rupiah ditumpahkan untuk proyek ini. Dalam waktu 4 tahun, di Blang Lancang telah berdiri pabrik pencairan minyak terbesar di dunia. M. Mas'ud Said, "Sejarah Aceh dan Penyebab Gejolak, Republika, 13 Januari 1999.

⁴⁴ Soedarsono dan Arif Rusli, "Sejarah Hasan Tiro dan GAM", dalam *Forum Keadilan*, 25 Januari 1999.

⁴⁵ Tim Peneliti Aceh, "Bara dalam...". hlm. 36.

awalnya tidak mampu menarik simpati masyarakat luas, sehingga jumlah pengikut yang secara langsung terlibat di dalam pemberontakan diperkirakan tidak lebih dari 200 orang, dan gerakan mereka cenderung sporadis. Walaupun demikian, pemerintah tak mau ambil resiko. Operasi-operasi militer ditingkatkan dengan mengirimkan pasukan ke sana dan juga dilancarkan “operasi bakti” untuk mencegah menjalarnya pengaruh Gerakan Aceh Merdeka di kalangan penduduk. Kombinasi operasi militer dan operasi bakti berhasil mengatasi pemberontak. Banyak pemimpin gerakan ini yang terbunuh dan sisanya melarikan diri ke Malaysia, sedangkan Hasan Tiro sendiri berhasil kabur ke Singapura pada tahun 1979,⁴⁶ dan kemudian menetap di Swedia hingga sekarang.

Kaburnya pemimpin tertinggi GAM ke luar negeri dan suksesnya militer menumpas gerakan Aceh Merdeka bukan berarti padamnya gerakan pemberontakan. Bibit-bibit separatisme itu tetap bertahan walaupun tidak tampak di permukaan. Bibit-bibit separatisme itu mulai tampak berkecambah kembali tahun 1989 dengan membonceng gerakan-gerakan pengacau keamanan di wilayah industri Aceh Utara dan Aceh Timur. Kemunculan GPK ini bersamaan dengan menguatnya kembali tuntutan berbagai kalangan di Aceh untuk mendapatkan keadilan dalam proses pembangunan. Mereka memprotes dampak negatif dari menjamurnya industrialisasi di Aceh Utara dan Timur, seperti munculnya kemaksiatan, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya.

Tuntutan itu bukannya tanpa alasan. Tanah Aceh yang subur makmur dengan sumberdaya alamnya tidak dapat mereka nikmati, sebab sejak Repelita II kekayaan sumber daya alam Aceh dikuras untuk dibawa ke Jakarta, sementara sebagian besar rakyat Aceh

⁴⁶ Nazaruddin, “Integrasi Politik...”, hlm.78.

malah hidup dalam kemiskinan, karena tidak dilibatkan dalam berbagai proses industrialisasi.⁴⁷

Eskalasi rentetan peristiwa gangguan keamanan sejak tahun 1989⁴⁸ tersebut kemudian dipahami oleh elit penguasa lokal sebagai gangguan atas proses pembangunan yang sedang berjalan. Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan, kemudian melaporkan kejadian-kejadian kekacauan di pusat-pusat industri di Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Timur—terutama setelah terjadinya penyerbuan markas ABRI—ke pusat, dan meminta pusat mengirimkan pasukan ke Aceh. Kekuatan militer bersama mesin perangnya pun dikirim pemerintah Jakarta ke Aceh. Sejak Mei 1989 itulah, hingga Agustus tahun 1998, Aceh dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).⁴⁹

2. Periode DOM (1989-1998)

Pada masa DOM, pasukan yang ditugaskan ke wilayah Aceh yang bergolak adalah pasukan satuan organis (sebanyak 12 Kompi) dari Pangdam Bukit Barisan yang dibantu oleh Satgas Inteligen (Kopassus).⁵⁰ Pasukan yang dikirim untuk mengamankan wilayah yang bergolak tersebut, dalam perkembangannya mengalami penyimpangan dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Selama DOM berlangsung, hukum tidak berlaku, sehingga keadilan sosial tidak bisa diwujudkan. Segala sesuatu ditentukan sesuai dengan kehendak dan selera militer; senapan dan sepatu laras. Tiga wilayah

⁴⁷ Gazali Abbas Adan, "Win-win Solution Penyelesaian Aceh", dalam Musni Umar (ed.), *op.cit.*, hlm. .

⁴⁸ Awalnya adalah perampasan 18 pucuk senjata TNI yang melakukan program AMD di kota Makmur, Aceh Utara tahun 1989. Seorang desarter berpangkat kopral tiba-tiba muncul mengaku dirinya sebagai panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), sayap militer GAM. Dengan mengaku bernama Robert, ia melakukan terror dan kekacauan di daerah industri itu. Lihat Maruli Tobing, "Jejak Lahirnya Konflik Aceh-GAM", dalam *Kompas*, 14 Januari 2000.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵⁰ Wawancara, 9 Oktober 2003.

yang bergolak, yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur, merupakan wilayah yang paling menderita akibat kekerasan militer dan pelanggaran HAM. Ketidakmampuan aparat keamanan untuk membedakan antara rakyat biasa, GPK, maupun GAM menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Aceh.

Periode DOM betul-betul merupakan pengalaman paling buruk yang dialami oleh rakyat Aceh. Rakyat Aceh mengalami tindak kekerasan fisik dan nonfisik yang dilakukan oleh militer. Aceh telah benar-benar menjadi ladang pembantaian oleh militer Indonesia. Hal ini tampak dari pola penyebaran pos-pos satuan taktis untuk mengamankan Aceh. Masing-masing pos satuan taktis membawahi tiga kecamatan. Pos-pos satuan taktis itu selama masa DOM terkenal sebagai tempat “pembantaian” yang kejam dan sadis.⁵¹ Selama Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer, ada dua pos satuan taktis yang paling terkenal sebagai tempat penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kuburan massal, yaitu Rumoh Geudong di Pidie dan Rancong di Aceh Utara.⁵²

Akibat DOM tersebut, ribuan anak menjadi yatim piatu, banyak rumah rusak atau dibakar, banyak istri yang menjadi janda, banyak orang cacat karena penganiayaan, dan korban jiwa pun sulit diperkirakan jumlah pastinya (ada versi yang menyebutkan jumlah korban DOM sekitar 35.000 jiwa). DOM menyebabkan pula perekonomian Aceh mengalami stagnasi, sehingga kondisi kehidupan rakyat sangat memprihatinkan. Hal ini sebagai akibat bahwa selama masa DOM sebagian besar rakyat Aceh di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur merasa ketakutan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Apalagi di ketiga daerah tersebut masih sering terjadi perampasan harta benda, intimidasi, kekerasan dan bentuk-bentuk teror lainnya. Selain itu, DOM telah pula memperparah tingkat pendidikan di Aceh dibandingkan dengan daerah lainnya.

⁵¹ Tim Peneliti LIPI, *Bara dalam Sekam, op.cit.*, hlm. 39.

⁵² Gazali Abbas Adan, “Win-win Solution ...”

Pemberlakuan DOM dianggap oleh orang Aceh sebagai rencana sistematis dan rekayasa politik pemerintah Soeharto untuk menghancurkan mereka, dengan tujuan akhir agar Aceh tetap loyal dan takluk pada Pemerintah Pusat, dan kekayaan Aceh dapat dikuras dengan mudah. Agar Aceh tampak kacau, maka diberlakukanlah DOM.⁵³ Kepentingan politik Soeharto tampaknya juga memegang peranan dalam pemberlakuan DOM di Aceh. Sudah sekian lama dalam pemilu Orde Baru, Golkar tidak pernah memenangkan pemilu di Aceh, sehingga melalui gubernur Aceh militer diundang masuk ke Aceh untuk melakukan cara-cara yang memungkinkan kemenangan Golkar, dengan dalih keamanan dan rentannya Aceh karena ada kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam.⁵⁴ Kondisi ini pada akhirnya telah melahirkan kesadaran ideologis rakyat Aceh untuk melakukan sebuah perlawanan. Faktor yang mempengaruhi munculnya kesadaran politik menjadi kesadaran ideologis rakyat Aceh antara lain karena adanya berbagai intervensi pusat dalam bentuk penyeragaman politis dan kekerasan oleh negara, dan catatan-catatan duka masa lalu, di antaranya berbagai kebohongan pemerintah pusat kepada rakyat Aceh kurun waktu Daud Beureueh, serta adanya eksploitasi sumberdaya alam.⁵⁵ Hal-hal tersebut menimbulkan dendam kolektif rakyat Aceh yang meledak setelah DOM dicabut.

Faktor-Faktor Penyebab Konflik Aceh Periode Paska DOM

Status DOM Aceh dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998 (masa pemerintahan Presiden Habibie). Begitu DOM dicabut yang bertepatan pula dengan bergulirnya reformasi di Indonesia kondisi bukannya membaik, tetapi justru wilayah konflik bertambah luas. Jika pada kuartal pertama tahun 1999 wilayah konflik dan kekerasan

⁵³ HAR. Rasyidi, *Suara Karya*, 8 Januari 1999.

⁵⁴ *Republika*, 13 Nopember 1999.

⁵⁵ Wawancara, 3 September 2003.

hanya terjadi di tiga kabupaten, yaitu Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur, maka memasuki kuartal kedua tahun 1999 dan selanjutnya, maka wilayah konflik meluas menjadi 9 kabupaten/Dati II (termasuk dua kabupaten/Dati II yang baru dibentuk). Wilayah konflik baru tersebut, di samping tiga kabupaten/Dati II di atas, adalah kabupaten/Dati II Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Tengah, serta kabupaten/Dati II Aceh Singkil dan Aceh Jeumpa yang baru dibentuk. Dari 13 kabupaten/Dati II yang ada di Aceh, hanya Kodya Sabang (Pulau Weh) dan Kabupaten Simeulue (Pulau Simeulue) yang relatif aman. Relatif amannya kedua wilayah ini tidak terlepas dari terpisahnya keduanya dari daratan Aceh.

Perluasan wilayah konflik di Aceh tentu saja sangat kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus Aceh. Sebenarnya berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah, dengan menerapkan berbagai kebijakan paska DOM maupun upaya perundingan dengan pihak GAM, namun hingga sekarang belum juga ada titik temunya.

Dicabutnya status DOM di Aceh sebetulnya merupakan angin segar bagi masyarakat. Apalagi, ketika DOM dicabut, Wiranto meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh atas apa yang telah terjadi selama berlakunya DOM. Walaupun permintaan maaf itu bagi rakyat Aceh kurang etis, tidak sesuai dengan kultur mereka⁵⁶, rakyat Aceh berusaha untuk bisa menerima. Tetapi anehnya, tampaknya militer tidak mau pisah dengan Aceh. Terbukti dengan diadakannya operasi-operasi militer baru di Aceh paska DOM. Luka rakyat Aceh akibat yang DOM sangat mendalam dan belum sembuh semakin terluka dengan operasi-operasi militer paska DOM tersebut, sehingga muncul konflik yang lebih baru dan kompleks.

⁵⁶ Dalam kultur Aceh, meminta maaf itu biasanya dengan "menyeret" sesuatu, seperti membawa beras, kambing, dan datang langsung. Dalam budaya Aceh, bahkan bunuh-bunuhan pun bisa diselesaikan secara baik, apabila hal itu dilakukan dan duduk bersama. Wawancara dengan Pak Bahrien, 3 Oktober 2003.

Gerakan di Aceh paska DOM dimotori oleh mahasiswa dengan salah satu agendanya menuntut kemerdekaan. Tuntutan merdeka ini sebenarnya hanya sebagai strategi agar pemerintah Jakarta memperhatikan mereka, sebab tuntutan mereka yang sebenarnya adalah pengadilan atas korban-korban DOM. Karena tuntutan mereka tak direspon dengan baik, maka gerakan ini makin meluas, sehingga pada 1999 mereka mengangkat dua isupenting, yaitu merdeka atau referendum.

Kondisi demikian merupakan momentum yang tepat bagi pertumbuhan dan meluasnya pengaruh GAM paska DOM. Jika pada saat DOM dicabut basis GAM hanya ada di Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Timur, maka pada tahun 2001 pengaruh GAM sudah meliputi sekitar 70-80% wilayah Aceh termasuk Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, dan bahkan Sabang. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak siap mengantisipasi kondisi Aceh paska DOM, sehingga tidak ada upaya rehabilitasi ekonomi, sosial, dan penegakan hukum bagi korban-korban DOM.

Dalam hal ini kata kunci utamanya adalah ketidakadilan dalam berbagai aspek, seperti: ekonomi, hukum, sosial, dan budaya.⁵⁷ Pergantian kepemimpinan nasional dari Habibie, Abdurrachman Wahid, dan selanjutnya ke Megawati, serta kondisi politik yang labil sangat mempengaruhi keseriusan pemerintah dalam penyelesaian Aceh. Perbedaan pandangan dan pendapat antara DPR dengan pemerintah dalam upaya mencari solusi konflik juga semakin memperburuk situasi. Sepertinya mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab, atau setidaknya mereka tak punya *sense of crisis* dan *sense of belonging*.⁵⁸ Bahkan, tampak sepertinya konflik Aceh itu memang tidak akan diselesaikan. Ada kepentingan-kepentingan tertentu

⁵⁷ Wawancara, 22 Oktober 2003.

⁵⁸ Jony Lumintang, *Republika*, 21 Nopember 2000.

terhadap konflik Aceh yang membuat konflik tersebut tampak seperti sengaja dipelihara.⁵⁹

Keraguan pemerintah di dalam upaya penanganan konflik Aceh justru menyebabkan terkikisnya kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah. Kenyataan pahit yang terlalu banyak dialami oleh rakyat Aceh belum bisa diobati, sehingga persepsi mereka terhadap pemerintah Jakarta pada paska DOM pun belum berubah. Kesalahan-kesalahan kebijakan pemerintah pusat dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah Aceh semakin menjauhkan Aceh dari kondisi damai. Sebenarnya masyarakat awam di Aceh masih percaya pada pemerintah pusat, tetapi pusat justru menyerahkan persoalan Aceh pada militer. Hal ini menimbulkan keputusasaan rakyat Aceh, sehingga mereka merasa tidak punya lagi harapan pada pemerintah. Kondisi ini ternyata dimanfaatkan oleh GAM. GAM menjual ide-ide kemakmuran, kesejahteraan, sehingga rakyat sangat tertarik.⁶⁰

Tarik-menarik antara pihak-pihak tertentu dalam konflik Aceh paska DOM mengakibatkan timbulnya polarisasi di dalam masyarakat Aceh. Polarisasi itu mewakili dan mencerminkan keinginan dan kepentingan yang berbeda, yang teridentifikasi sebagai masyarakat korban, masyarakat birokrat, dan masyarakat agama. Polarisasi itu pula yang kemudian membentuk pola pergerakan di Aceh, di mana ada yang ingin merdeka, referendum, dan otonom. Dari berbagai pilihan itu, sebagian besar rakyat Aceh memilih referendum yang dianggap sebagai bentuk dan sikap yang demokratis.

Agar persoalan Aceh betul-betul dapat diselesaikan, maka yang harus ditempuh adalah jalan damai. Sejarah mencatat bahwa pendekatan militer tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah

⁵⁹ Wawancara, 3 September 2003.

⁶⁰ Wawancara, 1 Oktober 2003.

Aceh. Kekerasan yang dilawan dengan kekerasan justru menimbulkan kekerasan baru yang lebih kompleks. Selain itu, iktikad baik dan serius dari Pemerintah Pusat juga menjadi kunci pokok bagi penyelesaian konflik Aceh. Satu hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah perbaikan sistem di Aceh, baik sistem pendidikan, hukum, ekonomi dan sebagainya. Keseriusan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi korban DOM, memperbaiki ekonomi rakyat Aceh, dan membangun kembali Aceh, akan menjadi pintu gerbang untuk menciptakan Aceh yang damai.

BAB 3

KELOMPOK DAN AKTOR KONFLIK ACEH : ANALISIS ASAL-USUL, KEPENTINGAN DAN IDEOLOGI PERLAWANAN

Dalam rangka memberikan gambaran yang utuh mengenai konflik Aceh, ada baiknya dilakukan suatu pembahasan tersendiri mengenai kelompok konflik dan aktor konflik. Dalam pendekatan resolusi konflik, pemetaan mengenai kelompok konflik dan aktor konflik ini cukup penting artinya, selain sebagai bagian dari upaya untuk memahami kepentingan dan pemikirannya (termasuk ideologinya) serta asal usul munculnya kelompok tersebut dilihat dari berbagai isu dan perkembangan situasi yang melahirkannya, juga sekaligus untuk melihat perkembangan dan kapasitasnya dalam suatu konflik yang terjadi. Karenanya, ekologi perlawanan dari kelompok semacam ini penting pula untuk dibahas agar kita dapat mengenal berbagai gejala yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya perlawanan baik secara teoretik maupun empirik. Secara umum, kelompok dan aktor konflik Aceh dapat dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu: *pertama* adalah aktor dan kelompok yang terlibat langsung dalam konflik Aceh sejak 1976-2003 yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (baca: Pemerintah RI). Termasuk dalam kategori Pemerintah RI adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan aparatusnya, serta TNI dan Polri. *Kedua*, aktor dan kelompok yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik. *Ketiga*, aktor dan kelompok di luar kategori pertama dan kedua yang dapat disebut sebagai "aktor dan kelompok gelap" dalam konflik Aceh.

Singkatnya, sub bab ini akan membahas mengenai kepentingan aktor dan kelompok dalam konflik Aceh sesuai kategori-

kategori di atas, posisi masyarakat Aceh dalam situasi konflik yang terjadi, serta pertumbuhan dan ideologi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

GAM dan Pertumbuhannya

Gambaran mengenai GAM telah banyak ditulis oleh para penulis lain, baik sebagai hasil penelitian dalam bentuk buku, maupun hasil reportase liputan media massa. Namun, kebanyakan dari tulisan tersebut kurang menekankan faktor aktor serta menganalisis siapa aktornya, bagaimana keterlibatannya dan apa kepentingannya dalam konteks kelahiran GAM maupun pertumbuhannya sekarang. Untuk melengkapi kekurangan itu, maka dalam tulisan ini, GAM dan pertumbuhannya akan dianalisis atas dasar aktor yang melahirkannya (ideologi apa yang dibangun dan apa bentuknya), apa kepentingan dibalik lahirnya GAM dan konteks apa yang menyebabkan kelahirannya, bagaimana GAM dapat tumbuh dalam konteks konflik Aceh menjadi sebuah kekuatan bersenjata di tahun 2003.

A. Lahirnya Gagasan Gerakan Aceh Merdeka

Gerakan Aceh Merdeka, atau yang sekarang sering disebut dengan nama GAM, pada mulanya merupakan sebuah gerakan yang tumbuh di sekitar lokasi industri, tepatnya di daerah Pidie, dimotori oleh Dr. Hasan di Tiro. Gerakan ini muncul sejak adanya deklarasi tanggal 4 Desember 1976 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir GAM, pada waktu itu mereka lebih dikenal sebagai ASNLF (*Acheh Sumatra National Liberation Front*). Nama ini yang sering digunakan dalam dokumen-dokumen resmi mereka, meskipun oleh TNI -- (waktu itu ABRI dan Pemerintah) mereka cenderung disebut sebagai Gerakan

Pengacau Liar (GPL).⁶¹ Penggunaan nama ASNLF dan GAM ini, menurut keterangan dari Dr. Husaini Hasan,⁶² tidak mengandung perbedaan, karena keduanya berintikan sama. Sebuah petikan wawancaranya di Radio Nikoya-FM Banda Aceh, mengatakan sebagai berikut:

“... ASNLF adalah singkatan dari *Acheh Sumatera National Liberation Front* nama GAM dalam bahasa Inggris, yang selalu kami gunakan di luar negeri bila kami berhubungan dengan dunia Internasional. Pada mulanya kami menggunakan nama NLFAS (National Liberation Front of Acheh Sumatera), tetapi kemudian berubah menjadi ASNLF yang lebih sering kami gunakan. Kami menggunakan perkataan Sumatera untuk lebih mudah mempresentasikan letak Acheh secara geografis...”⁶³

Namun bila kita sandingkan dengan pernyataan resmi Hasan Tiro, jelas bahwa penggunaan Sumatera, pada awalnya diharapkan akan menarik dukungan yang lebih luas bukan hanya Aceh, tetapi sekaligus seluruh Sumatera. Selain itu, Sumatera dimasukkan ke dalam gerakan mereka karena sebagian besar pencetus GAM memahami bahwa Sumatera dalam sejarahnya termasuk wilayah Kerajaan Iskandar Muda. Meskipun belakangan ada persepsi lain dari

⁶¹Hampir semua dokumen yang berasal dari ABRI atau kalangan militer Indonesia sejak 1976, tidak pernah menyebutnya sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka selalu menyebut dengan variasi nama, tetapi selalu ada kaitannya dengan Gerombolan, Liar, Pengacau, dan lain sebagainya. Beberapa istilah yang pernah mereka keluarkan adalah GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan), GBPK (Gerombolan Bersenjata Pengacau Keamanan), GPLK (Gerombolan Pengacau Liar Keamanan), dan sebagainya. Dalam penyebutan itu pasti ada kata gerombolan dan pengacau. Dua sebutan ini tidak pernah ditinggalkan ABRI waktu itu atau TNI sekarang.

⁶² Lahir di Sigli (Pidie) tanggal 3 Juli 1944, pekerjaan sekarang, Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan (O&G Specialist) di Consultant Medical Centre Specialist Group, Stockholm, Swedia,

⁶³ Wawancara Dr Husaini Hasan, received on Mon Dec 27 13:40:38 MET 1999 Kabar dari Pijar Online.

Dr. Husaini bahwa Sumatera hanya dimaksudkan untuk merepresentasikan letak geografis Aceh, namun dari beberapa dokumen yang dianalisis, penggunaan Sumatera lebih untuk dukungan dan alasan historis yang disebut di atas. Selain itu, ada pula yang memperkirakan bahwa dengan nama ASNLF maka gerakan ini menjadi berbeda dengan DI/TII, baik dari segi ideologi maupun tuntutananya.

Hasan Tiro melalui ASNLF sejak awal sudah secara tegas menyatakan ingin mendirikan negara terpisah dari Republik Indonesia, berbeda dengan peristiwa⁶⁴ DI/TII Daud Beureueh di masa 1953-1963, bentuk negaranya adalah Islam, tetapi koridornya tetap Indonesia.⁶⁵ Ini yang seringkali kurang dipahami oleh berbagai kalangan yang membahas mengenai konflik Aceh saat ini. Menurut seorang intelektual Aceh, ketika Daud Beureueh ditawarkan oleh Perdana Menteri RIS setelah Konferensi Meja Bundar untuk bergabung dengannya, ia lebih memilih bergabung dengan Pemerintahan Darurat RI yang dibentuk di Yogya dan Bukittinggi,⁶⁶ dan menolak mendirikan negara tersendiri. Ini sekaligus menunjukkan betapa nasionalisnya Daud Beureueh sebagai seorang pejuang waktu itu. Namun, ada yang melihat bahwa alasannya menolak bergabung

⁶⁴ Perbedaan penyebutan istilah di mana untuk DI/TII disebut peristiwa, sementara untuk ASNLF disebut gerakan, adalah karena faktor historis. Dalam salah satu klausul Ikrar Lamteh, sebuah ikrar/perjanjian antara DI/TII dengan ABRI dan Pemerintah RI waktu itu, disebutkan bahwa untuk menetralsir istilah pemberontakan DI/TII karena pemerintah dan ABRI sering menggunakan sebutan itu, maka semenjak ada ikrar Lamteh istilah pemberontakan kemudian direvisi sebagai peristiwa dan bukan pemberontakan. Sementara penggunaan istilah gerakan untuk menyebut apa yang dilakukan oleh Hasan Tiro sejak 1976, karena sejak awal mereka menyebut dirinya memang dengan istilah gerakan -- lihat singkatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Wawancara, Oktober 2003.

⁶⁵ Wawancara dengan berbagai narasumber intelektual Aceh yang mengikuti berbagai kasus konflik di Aceh, baik sebagai aktivis, pengamat, maupun sebagai intelektual, Agustus-Oktober 2003.

⁶⁶ Wawancara dengan ahli Sosiologi Aceh, Oktober 2003.

dengan RIS waktu itu, karena sebagian pendukung RIS berasal dari Indonesia Timur (yang berbeda agama), padahal ia mencita-citakan sebuah bangsa yang statenya didasari oleh Syariat Islam. Di sisi yang lain, Daud Beureueh ingin memegang teguh janji politiknya terhadap Soekarno, bahwa Aceh akan tetap bergabung dengan RI asal diberikan kesempatan untuk memberlakukan Syariat Islam⁶⁷ dalam kehidupan masyarakat di wilayahnya.

Ilustrasi dialog antara Daud Bereueuh (DB) dengan Soekarno (S) adalah berikut:

"...[S] Saya minta bantuan Kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945...[DB] Sdr. Presiden! Kami Rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang *fisabilillah*, perang untuk menegakkan agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid...[S] Kakak memang yang saya maksudkan adalah perang seperti itu...[DB] Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu, dengan demikian saya mohon kepada Sdr. Presiden bahwa *apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syariat Islam di dalam daerahnya*...[S] Mengenai hal itu Kakak tak usah khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam...[DB]

⁶⁷ Menurut Teungku Daud Bereueuh, pelaksanaan Syariat Islam terhadap umat Islam adalah wajib hukumnya dan tidak bisa ditawar serta tidak bisa dikaitkan dengan undang-undang buatan manusia. Dasar-dasar yang digunakan adalah Ayat Al-Maidah 44, 45, 47, 48 dan 49. Dengan sikap itu, maka jelas bahwa Syariat Islam bagi Daud Bereueuh tidak dapat ditawar lagi dan harus diberlakukan di Aceh. Lihat, M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Da'wah, 2001), hlm. 253-254.

Maafkan saya Sdr. Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan, bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Sdr. Presiden...[S] Kalau demikian, baiklah, saya setuju permintaan Kakak...[DB] Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terimakasih banyak atas kebaikan hati Sdr. Presiden..."⁶⁸

Dengan kata lain, memang terlihat perbedaan yang amat mencolok antara gerakan yang dibangun oleh Hasan Tiro pada paruh 1974-1976, dengan lahirnya peristiwa DI/TII. Perbedaan ini bisa dipahami, sebab memang Hasan Tiro sejak 1950-an tidak pernah setuju atau menghendaki model negara yang dibangun oleh Founding Fathers Indonesia, karena model demokrasinya dianggap kurang tepat. Dalam sebuah bukunya Hasan Tiro bahkan dengan tegas mengutip mengapa ada perlawanan dan pemberontakan. Begini kalimat yang dikutipnya itu, "*Belum pernah rakyat dari suatu negara memberontak oleh karena pemerintahnya lemah dan kocak-kacir. Bagi rakyat, yang telah menggerakkan mereka memberontak bukanlah keinginan buat menyerang, tetapi kehilangan kesabaran buat menderita... Dan pemberontakan adalah usaha terakhir rakyat yang hak-haknya sudah dirampas oleh penindasan...*"⁶⁹

Dalam bukunya, "Demokrasi untuk Indonesia," Hasan Tiro menolak bentuk ketatanegaraan Indonesia yang *unitaris*. Menurutnya, sistem seperti itu akan menimbulkan dominasi suku, karenanya dia menganjurkan bentuk negara federal bagi Indonesia. Pemikirannya itu semakin "maju" ketika pada awal tahun 60-an terjadi pemusatan kekuasaan pemerintah ke tangan Soekarno. Dalam sebuah brosur yang berjudul "Masa Depan Politik Dunia Melayu" Hasan Tiro menyebutkan: "Indonesia-Jawa tak dapat dibanggakan sebagaimana terlihat dari penampilannya 20 tahun yang lalu, demikian juga pada

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 77-78.

⁶⁹ Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi untuk Indonesia*, (Jakarta: Teplok Press, 1999), hlm. 8.

masa yang akan datang. Rakyat makin hari makin bertambah lapar, di mana politik keuangan negara terdiri atas pemotongan uang setiap beberapa tahun. Inflasi merupakan sifat yang kekal dari ekonomi yang meruntuhkan simpanan, tidak ada lagi kebebasan beragama, kebebasan berbicara, menulis, penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang dan Undang-Undang Dasar hanyalah apa yang disebut oleh Fuhrer-fuhrer Jawa belaka". Karenanya Hasan Tiro menghimbau putra-putra Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain untuk merebut kembali kehormatannya yang telah 20 tahun diabaikan dan direndahkan oleh mereka yang disebutnya sebagai kolonialis Jawa.⁷⁰

Di sinilah letak perbedaan kedua aktor yang merupakan ikon perlawanan rakyat Aceh pada zamannya masing-masing. Daud Beureueh yang dilahirkan dalam tradisi pesantren *dayah* (tradisional) dengan organisasi PUSAnya, lebih terinspirasi dengan gagasan bahwa Islam dan syariatnya harus ditempatkan sebagai yang utama dalam konteks kehidupan bernegara, karena itu, tuntutananya jelas bahwa Aceh harus diberikan otonomi khusus untuk menjalankan sistem pendidikan agama dan syariat Islam.⁷¹ Dari konteks lahirnya PUSA dan gagasan-gagasan kenegaraan di Aceh pada masa

⁷⁰ Isa Sulaiman, *GAM, Ideologi dan Gerakannya*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 14.

⁷¹ Dalam sebuah catatan menurut Nazaruddin Syamsuddin disebutkan bahwa sesungguhnya rakyat Aceh sudah mulai berbicara tentang kemerdekaan sejak awal 1930-an. Perbincangan tentang masalah ini dimasyarakatkan melalui surat kabar Soeara Atjeh, yang terbit dua minggu sekali. Kebanyakan diskusi menyentuh aspek hubungan antara Islam dan kemerdekaan, sehingga berkembanglah pemikiran bahwa kemerdekaan harus dicapai melalui Islam. Sementara itu PUSA di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh baru didirikan pada 5 Mei 1939. Hal lain yang patut dicatat adalah bahwa kelahiran PUSA juga bertepatan dengan adanya gagasan untuk mendirikan kembali kesultanan Aceh dengan jalan memulangkan Sultan Muhammad Daud, atau pewarisnya, dari pembuangan di Batavia (Jakarta). Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi Di Serambi Mekah, Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*, (Jakarta: UI Press, 1999), hlm. 30-33.

penjajahan, tak mengherankan apabila sekarang ini gagasan Islam dan kemerdekaan, serta Islam dan Negara, tidak mungkin pupus begitu saja, karena ide mengenai hal ini telah ada sejak tahun 1930.

Sementara Hasan Tiro lebih banyak bersinggungan dengan gagasan-gagasan demokrasi liberal ketika ia lama berdiam di Amerika Serikat mewakili Duta Besar Aceh di PBB, pada saat terjadi peristiwa DI/TII 1953. Oleh karena itu, konsep dan pemikiran yang dikembangkan oleh Hasan Tiro tampak berbeda. Tak mengherankan apabila gagasan kenegaraannya pun berbeda dengan apa yang menjadi tuntutan DI/TII. Di samping itu, Hasan Tiro mencoba membangun sebuah organ perlawanan yang berbeda pula, tidak mengikuti proses dan cara Abu Daud⁷² dengan PUSA (Pusat Ulama Seluruh Aceh). Ia membangun sebuah front baru yang diberi nama ASNLF, meskipun dalam perkembangannya kemudian ASNLF juga secara diam-diam mendapatkan dukungan dari para aktivis DI/TII yang kecewa atas penyelesaian konflik Aceh di tahun 1963.⁷³ Bentuk dukungan memang ada yang langsung dan yang tidak langsung, termasuk Abu Daud yang diam saja melihat kemunculan gerakan ini. Hal inilah yang selanjutnya menimbulkan pertanyaan “apakah benar tongkat Wali Nanggoe Aceh telah diserahkan kepada Hasan Tiro oleh Abu Daud.”⁷⁴ Namun dalam pemahaman beberapa orang Aceh sendiri tampak bahwa memang ada dukungan secara tidak langsung dari para pelaku DI/TII maupun keluarganya terhadap gerakan Hasan Tiro, termasuk nama-nama petinggi GAM sekarang yang berada di

⁷² Dalam sebuah catatan dokumen tahun 1953-1963 yang dikeluarkan oleh pihak Teritorium disebutkan bahwa Abu Daud bahkan tidak bisa membaca dan menulis Latin, karena itu Beliau mempunyai seorang pembantu yang bertugas untuk mendampingiya.

⁷³ Wawancara, Agustus-Oktober 2003.

⁷⁴ Penelusuran terhadap berbagai dokumen mengenai hal ini memang agak menyulitkan. Ada dokumen yang menunjukkan demikian, tetapi pengakuan dan persetujuan secara lisan dari Daud Beureueh tidak pernah ada, karena beliau lebih memilih bersikap diam dan tidak berkomentar.

luar negeri (Swedia), di mana minimal keluarganya mempunyai peran dalam perlawanan di masa DI/TII.

Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan, 4 Desember 1976, Hasan Tiro juga mengumumkan struktur pemerintahan Negara Aceh Sumatera.⁷⁵ Akan tetapi, kabinet tersebut di bawah ini belum berfungsi hingga pertengahan tahun 1977, persoalannya karena para anggota kabinet sebagaimana disebutkan di atas, umumnya masih berbaur dengan masyarakat luas untuk kampanye dan persiapan perang gerilya. Kabinet Negara Aceh Sumatera baru dapat melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 15 Agustus 1977. Sementara upacara pelantikan dan pengumpulan anggota kabinet dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1977 di Camp Lhok Nilam pedalaman Tiro, Pidie.

Kabinet Neugara Atjeh

Wali Neugara (<i>Head of State</i>)	: DR. Teungku Hasa Di Tiro, LL.D
Meuntroe Pertahanan (<i>Minister of Defence</i>)	: DR. Teungku Hasa Di Tiro, LL.D
Meuntroe Luwa Nanggroe (<i>Minister of Foreign Affair</i>)	: DR. Teungku Hasa Di Tiro, LL.D
Waki Meuntroe Luwa Nanggroe (<i>Deputy Minister of Foreign Affair</i>)	: DR. Mukhtar J. Hasbi, HD. DTMH
Meuntroe Dalam Nanggroe (<i>Minister of Internal Affair</i>)	: DR. Mukhtar J. Hasbi, HD. DTMH
Meuntroe Keadilan (<i>Minister of Justice</i>)	: Teungku Hadji Ilyas Leube
Meuntroe Peundidikan (<i>Minister of Education</i>)	: DR. Husaini M. Hasan, MD
Meuntroe Kesehatan (<i>Minister of Health</i>)	: DR. Zaini Abdullah, MD

⁷⁵ Isa Sulaiman, "GAM, Ideolog....."

Meuntroe Sosial (<i>Minister of Social Affair</i>)	: DR. Zubair Mahmud, MD
Meuntroe Pembangunan dan Buet Umum (<i>Minister of Development an Public Work</i>)	: Ir. Teuku Asnawi Ali, Dipl. Ingg
Meuntroe Keuangan (<i>Minister of Finance</i>)	: Teungku Muhammad Usman
Meuntroe Perhubungan (<i>Minister of Communication</i>)	: Mr. Amir Ishak
Meuntroe Perdagangan (<i>Minister of Trade</i>)	: Mr. AR. Mahmud
Meuntroe Neugara, Waki di PBB (<i>Minister of State, Representative at The United Nations</i>)	: Mr. AR. Mahmud

Pengaruh pemikiran dan persentuhan ini bagaimanapun merupakan salah satu faktor perbedaan antara tumbuhnya perlawanan di masa Abu Daud dengan masa Hasan Tiro. Dengan faktor perbedaan itu pula, tak mengherankan ketika ASNLF dideklarasikan pada 4 Desember 1976, dukungan baik dari segi wilayah maupun massa tidak terlalu luas seperti gerakan DI/TII di masa 1953-1963. Faktor lain yang juga menyebabkan mengapa dukungan pada saat deklarasi tidak terlalu luas adalah soal pengaruh Hasan Tiro dalam struktur sosial di Aceh, karena waktu itu dominasi ulama masih kuat di sana, apalagi Hasan Tiro kurang dikenal oleh masyarakat Aceh secara luas, karena sebagian besar hidupnya di luar negeri (AS). Apalagi Hasan Tiro selama kasus DI/TII berada di luar negeri dan belum pernah pulang ke Aceh untuk turut berjuang memanggul senjata. Dukungan terhadapnya kebanyakan berasal dari massa yang frustrasi, yang sebagian besar adalah orang-orang Aceh yang ingin menjadi pekerja di sekitar eksplorasi Gas Alam di LNG Arun di Aceh Utara Pesisir Timur Aceh,⁷⁶ namun ditolak sebagai pekerja.⁷⁷

⁷⁶ Gas ini telah ditemukan pada akhir 1960-an, tepatnya di kawasan permukiman masyarakat di Aru, Kabupaten Aceh Utara Pesisir Timur Aceh, dan depositnya dapat dieksplotasi selama lebih dari 30 tahun. Eksploratornya adalah PN

Minyak ini sebenarnya telah dieksplorasi sejak zaman Belanda tahun 1908 dan tahun 1928 (terutama untuk daerah Kuala Simpang dan Lhokseumawe). Dalam catatan historis sudah disebutkan bahwa sejak abad XIV sebenarnya sudah diketahui bahwa di Perureulak ada sumur minyak tanah, namun belum dapat dieksplorasi secara modern. Pada tahun 1807 Belanda pernah akan melakukan eksplorasi melalui Holland Perlak Petroleum Maatschappy, namun baru dapat menikmati eksplorasinya pada tahun 1908. Pada 1928 ditemukan lagi tiga sumur minyak di Rantau (Kuala Simpang) dan Tjunda (Lho'Seumawe).⁷⁸ Jadi memang sejak awal minyak ini telah memicu konflik di masa DI/TII dan GAM, karenanya sangat tepat apabila ideologi yang dikembangkan Hasan Tiro adalah ide-ide mengenai ketidakadilan di samping ide mengenai penjajahan orang-orang Jawa atas kekayaan Aceh. Dalam sejarah perlawanan Aceh, ide "penjajahan," merupakan sebuah ide yang paling mudah dieksplorasi, karena mudah mendapatkan dukungan. Bagi mereka, penjajah dianggap "kufar," atau kafir, sehingga halal untuk dibunuh dan dimusuhi.⁷⁹ Dalam sejarah Aceh, ada tiga kelompok etnik yang

Pertamina dan Mobil Oil Indonesia Inc. Lihat, Abdullah Ali, "Aceh Dulu, Sekarang dan Masa Depan," dalam Tulus Widjanarko dan Asep S. Sambodja, (eds.), *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1999), hlm. 9.

⁷⁷ Wawancara, September 2003. Menurut narasumber ini pada waktu ditemukan gas bumi dan minyak di Aceh (Arun-LNG), hampir semua orang Aceh, baik di Aceh maupun di luar Aceh, berbondong-bondong untuk pulang ke Aceh dengan harapan memperoleh sedikit keuntungan dari temuan tersebut sebagai pekerja. Namun, kenyataannya begitu mereka melamar, sebagian besar di tolak, dan yang diterima hanya sekitar 5 persen, karena eksplorasi dilakukan oleh Pertamina dengan cara memindahkan para pekerja dari Jawa. Tak mengherankan apabila massa yang besar ini kecewa sehingga mulai terjadi dendam-dendam pribadi, termasuk ketika Hasan Tiro ditolak saat membawa para kontraktor dari AS untuk LNG. Berkembangnya isu-isu atas kolonialisme Jawa dan sebagainya menimbulkan keresahan di daerah sekitar eksplorasi minyak dan gas bumi. Orang-orang inilah yang kemudian mendukung gerakan Hasan Tiro.

⁷⁸ Lihat, Zainuddin, "Tarich Atjeh...", hlm. 80.

⁷⁹ Wawancara, September 2003.

pernah disebut kufar, yaitu pertama, Belanda (baca: penjajah masa perang sebelum kemerdekaan), kedua adalah orang-orang Minang yang dianggap merupakan kelompok basis dari gerakan keagamaan Muhammadiyah sehingga dibenci oleh orang-orang Aceh, dan ketiga adalah orang-orang Jawa yang dianggap menjajah dan mengeksploitasi kekayaan Aceh.⁸⁰ Hasan Tiro menggunakan sentimen anti-Jawa ini sehingga mereka menyebut orang-orang Jawa sebagai "kufar." Ideologi yang dibangun Hasan Tiro tidak menggunakan ideologi Islam, karena tujuannya tidak untuk mendirikan negara Islam sebagaimana Abu Daud. Ini bisa dipahami, karena Hasan Tiro bukan tokoh agama, dan kehadirannya saat itu agak kurang diterima oleh golongan ulama.⁸¹

Perlu diingat bahwa setelah Pemilu 1971, meskipun PPP menang di Aceh, namun Golkar juga kuat di sana. Pada periode menjelang Pemilu 1977, para ulama telah didekati oleh Golkar untuk membentuk Majelis Ulama Aceh yang dipimpin oleh Prof. A. Hasjmy, salah satu tokoh ulama besar di Aceh. Hasjmy tidak mendukung gerakan Tiro bahkan menamakannya sebagai gerombolan dan bukan pejuang.⁸² Adanya MUI di Aceh telah menutup kemungkinan Hasan Tiro menggunakan jalur agama/ideologi Islam sebagai alat perjuangan. Selain itu, Hasan Tiro juga menganggap ideologi Islam tidak menguntungkan baginya untuk memperoleh dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, karena bisa dianggap sebagai kelanjutan dari DI/TII, padahal mereka berbeda.⁸³

Ketika GAM dideklarasikan sebenarnya ia tidak mendapat tanggapan yang serius dari masyarakat Aceh, dan pengikutnya pun relatif sedikit. Hal ini mengingat karena argumen yang dikemukakan Hasan Tiro lebih banyak bersifat retorika belaka. Ia, antara lain,

⁸⁰ Wawancara, September 2003.

⁸¹ Wawancara, September 2003.

⁸² *Forum Keadilan*, No. 01, Tahun VI, 21 April 1997.

⁸³ Wawancara, Oktober 2003.

mengatakan bahwa “sebentar lagi apa-apa yang ada di Aceh termasuk LNG milik kita semua dan negara Indonesia juga akan runtuh.” Namun, kemudian ternyata Hasan Tiro sangat lihai dalam memanfaatkan emosi orang Aceh yang temperamental guna mendukung berbagai gerakan yang dilakukannya. Hasan Tiro misalnya, pernah mengatakan bahwa Armada ke VII Amerika akan datang membantu orang Aceh dalam rangka merebut pabrik gas LNG. Oleh karena itu, gerakan Hasan Tiro tidak mendapat tempat di kalangan masyarakat Aceh di Aceh, namun di kalangan masyarakat Aceh di perantauan, gerakan ini dianggap sebagai sebuah impian yang perlu segera diwujudkan. Orang-orang Aceh di perantauan ini kebanyakan berasal dari kalangan intelektual kampus, bahkan ada di antara mereka yang pernah menjadi dosen di USU, Medan.

Daerah yang dianggap menjadi basis utama gerakan Hasan Tiro (GAM) adalah Aceh Pidie, karena di daerah ini yang juga merupakan daerah kelahiran Hasan Tiro, pengikut GAM yang terbanyak waktu itu. Ditinjau dari segi sejarah, daerah Aceh Pidie memang selalu merupakan kantong pemberontakan, karena dari daerah inilah dulu Perang Cumbok⁸⁴ dan gerakan DI/TII juga dilakukan. Masyarakat Aceh Pidie dikenal sebagai masyarakat yang sangat kritis, sehingga berbagai inspirasi gerakan yang sifatnya melawan pemerintah sering muncul dari daerah tersebut.

Sejalan dengan perjalanan waktu, GAM yang semula berbasis di Aceh Pidie kemudian meluas ke daerah Aceh Utara dan Aceh Timur. Di kedua daerah tersebut GAM menemukan momentumnya untuk melakukan sebuah gerakan terencana sejalan dengan munculnya berbagai ketimpangan sosial ekonomi terutama antara penduduk setempat dengan pendatang. Walaupun pada saat itu jumlah anggota GAM masih sekitar 100 orang, namun karena GAM

⁸⁴ Dalam dokumen disebutkan bahwa Perang Cumbok merupakan gagasan dari Hasan Tiro sewaktu ia masih aktif sebagai staf pribadi Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara.

dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas oleh pemerintah, maka telah mengakibatkan jumlah pengikut GAM semakin bertambah besar. Menurut beberapa informasi, GAM bertambah besar ketika beberapa tokoh-tokoh sentralnya tewas atau lari keluar negeri. Bertambah besarnya GAM ini juga dikaitkan dengan kurang seriusnya pemerintah dalam penumpasannya. Mungkin pada saat itu GAM dianggap hanya merupakan sebuah gerakan kecil yang lambat laun akan mati dengan membaiknya perekonomian masyarakat.

Karena GAM mencoba melakukan konsolidasi melalui penyebaran propaganda-propaganda bagi masyarakat Aceh di sekitar wilayah industri, tak mengherankan apabila orang-orang bawah waktu itu seperti, Aceh Besar, Selatan, dan Singkil menyebut gerakan mereka sebagai masalah orang Aceh atas. Karena dalam pandangan mereka, memang gaya orang-orang atas yang suka membuat masalah dan mencari masalah.⁸⁵

Propaganda yang dilancarkan GAM adalah dengan memberikan janji dan harapan bagi rakyat Aceh tentang dunia baru

⁸⁵ Dalam beberapa perjalanan ke Aceh selama periode Agustus, November 1999 dan pada Februari 2000, penulis menemukan ungkapan-ungkapan seperti itu sebagai sebuah gambaran yang sering dilontarkan oleh orang-orang Aceh bahwa memang pada mulanya konflik hanya menjadi masalah orang-orang Aceh di atas. Dari segi karakter, banyak sosiolog Aceh yang diwawancarai memang tidak menafikan soal karakter orang Aceh atas yang dianggap bertemperamen keras. Menurutnya Pidie sangat terpengaruh oleh karakter suku bangsa India (suku bangsa Tamil) baik dari segi makanan maupun pola budaya. Bahkan Pidie sering disebut sebagai Cinanya Aceh, sementara Aceh Utara terpengaruh oleh kebanyakan kelompok Melayu/Jawa, dan Aceh Timur lebih merupakan campuran berbagai unsur bangsa (Melayu, Keling, Batak, dan Cina), namun unsur budaya dominannya dari Melayu dan Keling. Sementara Aceh Barat dan Selatan mendapat pengaruh Minangkabau yang cukup kuat. Aceh Semeleu lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Nias di dekat Danau Toba, sementara Aceh Tengah, suku Gayo cukup berpengaruh khususnya apabila dilihat dari segi budaya. Dan Aceh Tenggara lebih banyak dipengaruhi oleh suku bangsa Alas. Wawancara, Oktober 2003. Lihat, Zainuddin, "Tarich Atjeh...", hlm. 80.

yang penuh kemakmuran apabila mereka mendukung GAM, dan GAM menang dalam pertempuran. Melalui propaganda itu, GAM mencoba membangun basis kekuatan dengan gerakan tanpa senjata, karena memang strategi itu yang paling mungkin dilakukan bagi kelompok yang masih belum kuat. Selain itu, karena Hasan Tiro sangat mengharapkan dukungan dari Amerika Serikat, namun sayang dukungan itu tidak pernah diperoleh.⁸⁶ Pada masa itu, ia belum membentuk sayap militer,⁸⁷ karena memang baru dalam taraf konsolidasi kekuatan, atau pada fase yang disebut oleh Hasan Tiro sebagai fase menanamkan kesadaran berpolitik, memberi motivasi politik. Jumlah dukungan yang diterimanya pun tidak seberapa atau sangat kecil, karena pada fase pertama ini, gagasan politik yang merupakan alat bagi gerakan mereka, baik melalui diplomasi maupun propaganda dan bukan gerakan senjata.⁸⁸

B. Konteks Sosial-Politik dan Faktor Penyebab Besarnya Kekuatan GAM

Tumbuhnya GAM dalam konflik di Aceh tidak lahir dalam konteks yang kosong, tetapi ada konteks sosial dan politik yang memicunya. Selain itu, tumbuhnya GAM di Aceh juga tak luput dari begitu banyak kepentingan aktor-aktor lain di balik peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi, apabila dirunut dari aspek asal usul perkembangannya. Mengenai pembagian periode perkembangan GAM ini, Isa Sulaiman membaginya menjadi tiga periode yaitu: (1)

⁸⁶ Wawancara, September 2003.

⁸⁷ Kekuatan Hasan Tiro pada 1976 tidak seberapa, perlengkapan senjatanya hanya beberapa pucuk senapan, itupun bekas dari Perang Dunia II. Dari dokumen yang berhasil disita, kekuatan GAM generasi pertama terdapat di sekitar daerah Pidie dan hanya sebanyak 160 orang, karena di Aceh Utara sudah banyak yang sadar dan menyerah terutama setelah Ayah Sabi menyerah di Panton Labu. *Majalah Tiras*, No. 7, 13 Maret 1997.

⁸⁸ Mengenai hal ini dapat dilihat dalam catatan harian Hasan Tiro, *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro*. *Kompas*, 24 Mei 1999.

GAM generasi pertama (periode 1976-1982) yang merupakan periode kelahiran dan konsolidasi kekuatan yang ditandai oleh bentuk-bentuk propaganda; (2) GAM generasi kedua (1982-1989) adalah periode rekonsolidasi kekuatan yang ditandai oleh aksi-aksi kekerasan dan kekacauan (sasarannya adalah Polisi dan ABRI); dan (3) periode ketiga (1989-2003) yaitu periode pengembangan sayap militer, konflik bersenjata, dan perjuangan diplomatik di luar negeri, terutama pada tahun 2003.⁸⁹ Dengan pembagian itu, kita dapat membandingkan konteks sosial-politik yang terjadi antara satu periode dengan periode lainnya. Bagaimana sesungguhnya konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya?

Munculnya GAM generasi pertama, seringkali dipahami oleh sebagian besar penulis masalah Aceh sebagai buah dari kekecewaan politik. Namun, kurang ada yang mencoba menelusuri apa sesungguhnya yang mendorong Hasan Tiro begitu kecewa dan akhirnya membentuk Aceh Merdeka. Menurut beberapa narasumber, lahirnya GAM pada era 1970-an dan perlawanan Hasan Tiro tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur kekecewaan pribadi Dr. Hasan Tiro kepada Pemerintah Pusat (baca: Presiden Soeharto) pada masa itu. Salah satu dorongan mengapa Hasan Tiro marah terhadap Penguasa Jakarta -- Soeharto (yang kemudian disebut sebagai Kolonialisme Jawa) adalah ditolaknya peran serta Hasan Tiro dalam eksplorasi LNG di Aceh Utara.⁹⁰ Pemerintah Pusat menganggap Hasan Tiro hanya seorang broker, karena itu ia ditolak mentah-mentah.⁹¹

Dalam beberapa pemberitaan pada tahun 1970-an hingga 1989, disebutkan ada beberapa aktivis bekas DI/TII yang ikut

⁸⁹ Isa Sulaiman menyebut periode pertama ditandai oleh adanya keberadaan pimpinan GAM di Aceh, periode kedua ditandai oleh masa rekonsiliasi, dan periode ketiga ditandai dengan kekerasan bersenjata. Pembagian di atas merupakan hasil modifikasi penulis terhadap periode yang pernah dilakukan oleh Isa Sulaiman.

⁹⁰ Wawancara dengan generasi yang mengalami situasi waktu itu, September 2003.

⁹¹ Wawancara, September 2003.

mendukung GAM. Sesungguhnya dalam GAM periode pertama ini terdapat sembilan (9) tokoh kunci, yaitu: Hasan Tiro (meskipun pernah menjadi Duta Besar Aceh di PBB, tetapi tidak terlibat perang selama peristiwa DI/II), Dr. Muchtar Hasbi, Daud Pancuk, Ir. Asnawi, Ilyas Leube, dr. Zaini, dr. Husaini, Amir Iskak, dan dr. Zubir Mahmud.⁹² Tokoh-tokoh inilah yang memproklamirkan Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976.

Selain karena alasan pribadi, ada sebagian pihak yang menyebutkan bahwa munculnya GAM periode pertama disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini: *pertama*, akibat penyelesaian masalah Darurat Islam (DI) yang tidak tuntas. *Kedua*, akibat kekecewaan politik atas marginalisasi masyarakat Aceh dalam proses pembangunan di daerah industri minyak dan gas bumi di mana mereka tidak diikutsertakan, atau ada kesan ditinggalkan.⁹³ Sebagaimana diketahui, di Aceh Utara pada akhir 1960-an telah ditemukan sumber minyak baru di kawasan pemukiman masyarakat Arun. Penemuan ini diteruskan dengan dibangunnya PT. Arun (1974). Pembangunan PT. Arun tersebut menyebabkan banyak penggusuran tanah-tanah masyarakat. Di Aceh Utara, dan Aceh Timur, muncul persoalan penggusuran tanah, ganti rugi dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pada mulanya persoalan sesungguhnya adalah masalah ekonomi dan politik, terutama perebutan sumber daya lokal. Namun, setelah itu baru persoalan ini digiring ke ideologi sehingga muncullah gerakan etnoregional dalam bentuk Gerakan Aceh Merdeka.⁹⁴

⁹² *Majalah Tiras*, No. 7, 13 Maret 1997. Namun dalam operasi militer yang dilakukan oleh ABRI pada 1976-1977, Zubir Mahmud, Muchtar Hasbi dan Ilyas Leube tewas, dan yang melarikan diri hanya Hasan Tiro, sisanya masih tinggal di Aceh, meskipun sudah tidak diketahui di mana keberadaannya, apakah sudah meninggal ataukah masih hidup.

⁹³ Wawancara, September 2003.

⁹⁴ Menurut salah seorang narasumber yang hadir dalam workshop tim di LIPI, 30 Agustus 2003.

Selain persoalan gas dan minyak bumi, pada tahun 1975 ada sekitar 20 perusahaan HPH yang memperoleh ijin penebangan hutan seluas 1.059.000 hektar dengan luas areal penebangan sebesar 37.019.000 ha per tahun. Semua pelakunya adalah orang luar sementara orang Aceh hanya bisa menjadi penonton. Akibat adanya HPH ini telah menimbulkan konflik sporadis antara penduduk sekitarnya dengan perusahaan HPH. Akan tetapi, setiap terjadi konflik, aparat keamanan selalu berpihak kepada perusahaan. Tak mengherankan apabila terjadi pengusuran-pengusuran tanah milik penduduk, di samping penebangan hutan rakyat dan lindung serta HPH untuk para transmigran.⁹⁵ Pada tahun 1978 juga muncul persoalan konflik tanah Hak Guna Usaha (HGU). Pada tahun itu tercatat kurang lebih sebanyak 281 HGU dikeluarkan di zona-zona pertanian. Akibatnya, orang-orang kampung tergusur sementara para transmigran (pendatang) masuk ke zona-zona pertanian tersebut. Pada masa ini terjadi konflik sporadis antara penduduk Aceh dengan masyarakat pendatang.⁹⁶

Sejalan dengan selesainya pembangunan proyek industri LNG di Aceh Utara, ternyata pemerintah telah melakukan tindakan yang kurang bijaksana dalam pembukaan kesempatan kerja. Adanya ketimpangan kesempatan kerja antara penduduk setempat dan pendatang, khususnya di Aceh Utara, kemudian dimanfaatkan GAM untuk menarik simpati rakyat Aceh.

Dikatakan bahwa pemerintah pusat memang sama sekali tidak peduli terhadap nasib rakyat Aceh. Isu tersebut ternyata telah memberikan ruang kepada GAM untuk secara leluasa memanfaatkan penduduk sipil dalam mendukung gerakannya. GAM sengaja merekrut masyarakat dari kalangan masyarakat bawah yang menganggur, karena tidak bisa ditampung di pabrik LNG Arun, Aceh Utara. Sentimen kedaerahan yang dilontarkan menjadi daya tarik

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

tersendiri bagi kalangan masyarakat bawah, khususnya anak-anak muda yang menganggur.

Seperti telah disinggung sebelumnya, basis GAM yang terkuat adalah wilayah ZILZ di Aceh Utara. Daerah ini merupakan daerah penyediaan cadangan minyak bumi dan gas alam di Indonesia. Dengan ditemukannya berbagai ladang gas dan minyak bumi tersebut, mengakibatkan Kota Lhok Seumawe sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Utara tumbuh menjadi sebuah kota metropolitan. Di kota tersebut dibangun pemukiman yang eksklusif, toserba dan sekolah-sekolah modern bagi anak-anak karyawan yang bekerja di berbagai perusahaan atau kontraktor industri perminyakan. Dampak lain dari tumbuhnya berbagai kegiatan industri di Kabupaten Aceh Utara ini adalah terciptanya berbagai kesempatan kerja. Di samping merangsang terjadinya mobilitas penduduk (*tenaga kerja*) yang selanjutnya berdampak terhadap berubahnya komposisi demografis di wilayah tersebut.

Jika dilihat secara teliti PDRB Kabupaten Aceh Utara yang berasal dari minyak bumi dan gas alam dengan harga dasar yang berlaku cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 1997 PDRB Kabupaten Aceh Utara hanya sebesar 9,8 triliun rupiah, dan jumlah ini meningkat menjadi 15,98 triliun rupiah pada tahun 1998. Akan tetapi pada tahun 1999 dan 2000 PDRB daerah tersebut mengalami sedikit penurunan, menjadi 15,79 dan 15,71 triliun rupiah. Jika PDRB Kabupaten Aceh Utara ditinjau berdasarkan harga konstan ternyata mengalami penurunan yang drastis. Pada tahun 1997 PDRB daerah tersebut sudah mencapai 6,29 triliun rupiah, akan tetapi tahun 1998 menurun menjadi 5,49 triliun rupiah. Pada tahun 1999 dan 2000 PDRB Kabupaten Aceh mengalami penurunan kembali menjadi 5,07 dan 4,96 triliun rupiah. Walaupun PDRB Kabupaten Aceh Utara yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas alam mengalami penurunan, namun kontribusinya terhadap

PDRB daerah tersebut masih sangat besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Walaupun bumi Aceh hingga saat ini masih sangat kaya dengan sumberdaya alam, namun kebanyakan rakyatnya hidup dalam keadaan yang memprihatinkan, khususnya penduduk di Aceh Utara yang hidup dalam kondisi marjinal. Hal ini ditandai dengan banyaknya perkampungan kumuh dan gelap di sekitar pusat industri Kota Lhok Seumawe, sementara tetangga di sebelahnya merupakan pusat industri dan perkotaan, dan penduduknya hidup dalam kemewahan di bawah terangnya sinar lampu merkuri. Kawasan yang dulunya hutan dan pantai sekarang berubah menjadi sebuah kawasan glamour yang tidak boleh didekati penduduk lokal. Akankah semua ketimpangan ini dibiarkan berlarut-larut, sehingga mengakibatkan bangsa Aceh menjadi bangsa yang papa.

Di sekitar kawasan industri Lhokseumawe terdapat 10 Kecamatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 400 ribu jiwa. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan, petani dan buruh bangunan. Daerah tersebut, yang lokasinya paling dekat dengan pabrik kertas, pupuk dan LNG, merupakan kantong-kantong kemiskinan, kondisi fisik kota-kota kecamatan dan 350 desa yang ada di sekitar kawasan industri petrokimia tersebut cenderung tidak berubah, dan keadaannya masih seperti ketika daerah ini belum menjadi kawasan industri.

Mencoloknya perbedaan kehidupan penduduk lokal dan penduduk yang hidup di kawasan industri menunjukkan ketidakberdayaan penduduk setempat dalam beradaptasi dengan lingkungan yang berubah begitu cepat. Kemiskinan yang terasa begitu mencolok hadir di antara warga lokal, dan sekaligus menunjukkan ketidakberdayaan warga lokal melawan arus industrialisasi yang secara radikal telah merubah struktur kehidupan sosial mereka. Dengan kondisi pendapatan yang marjinal, banyak penduduk di sekitar kawasan industri Lhokseumawe tidak pernah bisa

membayangkan untuk dapat memiliki atau membeli peralatan rumah tangga modern, seperti TV dan Kulkas, karena untuk menyekolahkan anak-anaknya saja banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan.

Kondisi tersebut kemudian digunakan atau dipolitisir oleh Gerakan Hasan Tiro dengan cara mengkampanyekan ketidakadilan di Aceh yang dilakukan oleh orang-orang Jawa. Atas dasar kenyataan itu, dan atas dasar legitimasi sejarah paska Daud Bereu'eh yang menetapkan wali Nanggroe Aceh adalah Hasan Tiro, maka kelompok ini kemudian memproklamkan NISLF sebagai sebuah gerakan untuk memerdekakan Aceh. Berbeda dengan gerakan tahun sejak 1958 yang masih sebatas wacana, gerakan-tahun 1970-an ini telah menjadi sebuah gerakan terstruktur.

Sejak itu, para pengikut Hasan Tiro dikejar-kejar oleh ABRI melalui operasi militer; sebagian tertangkap, sebagian mati tertembak dan sebagian lagi menyerahkan diri. Akan tetapi, sebagian besar tokoh-tokoh kuncinya berhasil melarikan diri ke Malaysia, dan kemudian menjadi imigran di Libya. Di sinilah, Hasan Tiro mulai membentuk sayap militer ketika ia berada di camp Tahura Libya, saat menjadi imigran. Ada kesalahan persepsi dan pemahaman pemerintah waktu itu, bahwa dengan larinya Hasan Tiro dan beberapa tokoh GAM, serta menyerahnya sebagian besar mereka, diduga bahwa GAM telah selesai. Namun, ternyata inilah awal dari konsolidasi mereka di luar negeri untuk mengembangkan sayap politik dan militernya secara terstruktur.

Sementara itu, pembangunan di wilayah Aceh terus dilakukan dengan dibangunnya beberapa perusahaan besar, antara lain PT. Pupuk ASEAN, AAF (ASEAN Aceh Fertilizer) yang didirikan pada tahun 1981. Pada tahun 1982 hingga tahun 1985 dibangun pula PT. PIM (Pupuk Iskandar Muda) dan PT KKA (Kertas Kraft Aceh) serta sebuah MNC, yakni Mobil Oil. Wilayah Aceh Utara ini kemudian dikemas dalam satu wilayah industri yang dinamakan ZILS (Zona Industri

Lhokseumawe).⁹⁷ Kesenjangan sosial dan penggusuran kian terjadi di wilayah ini. Dalam situasi pembangunan industri beserta implikasinya itu, di sekitar daerah industri muncul kekacauan-kekacauan yang diduga dilakukan oleh sisa-sisa GPK-nya Hasan Tiro. Karena itu, mungkin bisa dikatakan bahwa faktor ekonomi dan kesenjanganlah yang sesungguhnya telah memicu lahirnya kembali generasi GAM periode kedua ini.⁹⁸

Secara sosial situasi ini bisa dipahami. Ketika 1974-1985 terjadi penggusuran, banyak masyarakat di Aceh Utara yang menerima ganti rugi tanah, tetapi banyak di antara mereka yang menggunakannya untuk membeli mobil angkutan (ada yang membeli bus). Sayangnya, hanya dapat bertahan selama dua sampai lima bulan saja. Selebihnya tidak menghasilkan apa-apa. Selain itu, hampir sebagian besar penduduk di sekitar industri tidak bisa terserap ke dalam industri-industri tersebut, karena pada waktu tahun 1970-an untuk mencari putera Aceh Utara yang lulusan STM saja sulit, bagaimana mungkin mereka bisa diterima dan dilibatkan dalam industri tanpa keahlian.⁹⁹ Dengan kondisi seperti itu, ditambah oleh tingkat perubahan yang menonjol di sekitar industri, sementara efek positifnya bagi penduduk di Aceh Utara dan sekitarnya kurang dirasakan, maka muncullah kecemburuan orang-orang Aceh di sekitar perusahaan terhadap para pekerja (yang didominasi oleh orang luar Aceh). Hal ini bisa dimengerti, karena sebagian besar ganti rugi yang diterima oleh mereka juga sudah mulai habis. Menurut seorang sosiolog Aceh, memang orang-orang Aceh waktu itu (1970-1980an) agak alergi bekerja di bawah komando orang-orang bule (orang luar negeri), sehingga mereka tidak mau bekerja di

⁹⁷ Lihat Abdul Rahman Patji, "Zona Industri Lhokseumawe (ZILS): Studi tentang Kesenjangan Sosial Budaya di Aceh Utara," dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. II, No. 1, September 1998, Jakarta: PMP-LIPI, 1998, hlm. 20.

⁹⁸ Narasumber workshop, 30 Agustus 2003.

⁹⁹ Wawancara dengan sosiolog Aceh, Oktober 2003.

sana.¹⁰⁰ Namun versi lain menyebutkan bahwa bukannya mereka tidak bersedia bekerja di perusahaan, tetapi mereka umumnya kurang mempunyai kemampuan yang dibutuhkan, sehingga sebagian besar tidak diterima; yang diterima hanya sekitar 5-10 persen saja.¹⁰¹

Setelah Indonesia merdeka, kontribusi Daerah Aceh terhadap berbagai kegiatan pembangunan terus berlanjut karena dukungan sumberdaya alamnya yang sangat besar. Hal ini sejalan dengan meningkatnya sumbangan produk domestik bruto (PDRB) yang berasal dari Aceh, terutama yang diperoleh dari berbagai hasil tambang, seperti minyak dan gas bumi. Semenjak tahun 1975 sumbangan sumberdaya alam yang berasal dari Aceh telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 11% dari PDRB. Namun dalam kenyataannya dari berbagai hasil sumberdaya alam tersebut yang dikembalikan bagi pembangunan daerah Aceh kurang dari 0,5% setiap tahunnya. Keadaan ini telah mengakibatkan daerah Aceh tidak mampu membangun dirinya sendiri dan mengalami ketertinggalan selama hampir 30 tahun.¹⁰² Oleh karena itu, pengorbanan rakyat Aceh yang begitu besar terhadap Republik ini, dirasakan bagaikan susu dibalas air tuba. Ketimpangan penerimaan yang diperoleh bagi pembangunan daerah Aceh inilah yang merupakan sumber utama ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan masyarakat, dan pada tahap selanjutnya telah menciptakan ketidakstabilan politik.

Dalam perjalanannya, kekecewaan rakyat Aceh semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pengurusan sumberdaya alam yang berasal dari daerah tersebut. Kekayaan sumberdaya alam Aceh yang begitu melimpah dieksploitasi secara besar-besaran, tetapi sebaliknya rakyat Aceh tidak merasakan manfaat apa-apa. Bahkan sebagian besar rakyat Aceh hidup terbelakang, bodoh dan miskin,

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Wawancara dengan tokoh Aceh di Jakarta, September 2003.

¹⁰² Ismail Hasan Metareum, 2002.

karena mereka tidak bisa menikmati pembangunan yang selama ini dilakukan. Menurut Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) 1990, lebih dari 60% desa di Aceh tergolong ke dalam desa miskin.

Keadaan inilah yang dirasakan oleh rakyat Aceh selama 32 tahun di bawah pemerintah Orde Baru, padahal pemerintah sendiri tidak pernah menyadari telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar dalam menerapkan berbagai program pembangunan di Aceh. Ibarat kata orang-orang Aceh “kami yang memiliki ternak ayam, mengapa kami tidak pernah memakan telornya selama hidup”. Ungkapan-ungkapan tersebut merupakan refleksi kekecewaan rakyat Aceh terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pusat selama ini. Berhubung kekecewaan tersebut sama sekali tidak direspon oleh pemerintah, maka tidak mengherankan apabila kemudian muncul berbagai pergolakan di Aceh termasuk GAM yang dimotori oleh T. Hasan Tiro. Gerakan ini semula tidak mendapat tempat di hati masyarakat, namun karena rasa frustrasi dan kekecewaan yang dirasakan rakyat Aceh semakin meningkat maka akhirnya GAM menjadi tempat mengadu yang dibutuhkan penduduk Aceh.

Dalam perkembangannya pengikut GAM semakin bertambah banyak, dan oleh pemerintah mereka dianggap telah mengganggu jalannya roda pembangunan di Aceh, terutama dalam kaitannya dengan industri yang berskala besar, seperti LNG Arun, Pabrik Pupuk Iskandar Muda dan berbagai kegiatan manufaktur lainnya. Melihat kondisi tersebut, pada tahun 1989 pemerintah menentukan untuk memberlakukan daerah Aceh dengan status Daerah Operasi Militer (DOM) yang berlangsung dari tahun 1989 hingga 1998. Selama masa berlangsungnya DOM ternyata telah membawa korban yang banyak sekali di kalangan rakyat sipil yang tidak berdosa, yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang berat. Peristiwa ini baru terungkap setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, di mana berbagai gerakan rakyat

(reformasi) membuka segala kebusukan pemerintahannya, termasuk selama diberlakukannya DOM di Aceh.

Dalam situasi sosial-ekonomi dan politik seperti itu, yang diikuti oleh ekkses-ekkses negatif dari pertumbuhan industri di Aceh Utara, seperti kemaksiatan dan lain-lainnya, maka muncullah protes dari kalangan ulama. Protes yang paling terkenal dilakukan oleh Gerakan Jubah Putih di bawah pimpinan Teungku Bantaqiah¹⁰³ yang menggunakan lambang bendera putih berlogo pedang. Mereka merusak dan melakukan *amal makruf nahi mungkar* terhadap kios-kios yang dianggap sebagai tempat maksiat.

Selain adanya gerakan-gerakan ini, timbul pula kekacauan-kekacauan yang sasarannya adalah anggota ABRI melalui penyerangan pos dan perampasan senjata. Sepanjang 1989-1991 (hingga diberlakukannya Operasi Jaring Merah), telah terjadi beberapa peristiwa yang mendorong kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberlakukan keadaan darurat di Aceh, meskipun ada keanehan, karena sebagian besar pelakunya adalah desertir ABRI, seperti salah seorang tokoh yang disebut Robert, adalah anggota Kopassus yang menjadi tokoh GPK. Terjadi penyerangan pos-pos Polisi di Pidie, bahkan ada anggota Polisi yang ditembak mati di tengah jalan, kemudian dipotong-potong, dan istrinya diperkosa. Selain di Pidie, di Aceh Utara di daerah Panton Labu Jeunieb, Samalanga juga terjadi kekacauan. Kemudian di Aceh Timur, di Keude Geureubak, Peureurulak,¹⁰⁴ di sini bahkan disinyalir jumlah GPKnya paling besar dan merupakan markas dari Robert. Daerah ini digunakan sebagai persembunyian mereka, karena dari sana mudah

¹⁰³ Teungku Bantaqiah ini kemudian ditangkap dan dihukum (dipenjara). Pada masa Presiden Habibie 1999 ia diampuni sehingga bebas sebagai tahanan politik. Namun dua bulan kemudian (Juli 1999) ia dituduh sebagai anggota GAM yang menyimpan senjata dan ganja, sehingga diserbu di rumahnya dan ditembak oleh TNI hingga tewas. Kasusnya kemudian dikenal sebagai Tragedi Teungku Bantaqiah.

¹⁰⁴ Wawancara Ibrahim Hasan dengan *Tempo*interaktif, 23 Agustus 1998.

untuk melarikan diri ke luar Aceh, baik ke Medan maupun ke Malaysia.

Bila kita telusuri dokumen-dokumen berita pada masa munculnya generasi GAM kedua ini, terlihat bahwa sebagian besar yang disebut GPK mempunyai motif dan kepentingan pribadi, kebanyakan mereka terlibat dalam pembunuhan dan perampokan di Aceh masa itu. Dengan menjadi GPK, mereka dapat melakukan hal semacam itu dengan mudah. Intensitas kerusuhan yang paling tinggi terjadi di Aceh Utara, secara merata meliputi Kecamatan Kuta Makmur, Nisam, Tanah Pasir dan Baktya. Di kawasan ini kesenjangan sosialnya paling terasa, apalagi daerah-daerah tersebut berada di sekitar ZILS. Sementara itu di Aceh Timur yang cukup rawan teror adalah Kecamatan Idi Rayeuek dan Kecamatan Langsa. Kedua daerah ini merupakan daerah sentra ganja terbesar di Aceh, dan merupakan sarang dari GPK. Kepentingannya cukup jelas, yaitu keuntungan ekonomi dari penjualan ganja ke beberapa daerah lainnya. Ini terbukti, ketika pihak ABRI melakukan operasi pemberantasan ganja (Operasi Nila yang paling terkenal), maka teror di sekitar wilayah ini akan semakin menjadi-jadi.¹⁰⁵

Beberapa peristiwa dari 1989 hingga 1991 yang akhirnya menjadi penyebab dilakukannya Operasi Jaring Merah pada waktu itu, tergambar dari beberapa tipe kegiatan GAM di bawah ini:¹⁰⁶

Pertama, ada aksi-aksi perampasan senjata. Sebagai contoh: pada 26 September 1989 telah terjadi perampasan senjata milik ABRI di Krueng Tuan yang dilakukan oleh Panglima GAM Wilayah Pasee Yusuf Ali serta Gubernur GAM Wilayah Pasee Yusuf AB. Pada tanggal tersebut juga terjadi penyerangan di Pos-9 Provit PT. KKA

¹⁰⁵ *Majalah Tiras*, No. 7, 13 Maret 1997.

¹⁰⁶ Disarikan dari laporan berita media massa dalam buku: Fikar W. Eda dan S. Satya Dharma, *Sebuah Kesaksian Aceh Menggugat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 45-77.

Lhokseumawe yang menewaskan dua orang anggota ABRI, dan M-16 dirampas.

Kedua, adanya rapat-rapat gelap yang dilakukan oleh GAM. Ini terkait dari kasus-kasus persidangan yang dilakukan oleh GAM, Drs. Rahmadsyah, Bazaruddin, SH, Ligadinsyah, SAH, simpatisan orang-orang GAM, serta beberapa orang intelektual yang dianggap mendukung GAM. Ada beberapa dosen Unsyiah yang ditangkap karena tuduhan seperti itu.

Ketiga, seseorang yang dituduh sebagai penyedia sarana transportasi, menyumbang uang (ada yang 300 ribu, ada yang 500 ribu) kepada GAM, dan pernah berkomunikasi dengan anggota GAM. Mereka yang dituduh seperti itu kemudian ditangkap dan disidangkan sebagai bagian dari kelompok GAM yang harus ditumpas.

Keempat, seseorang atau suatu kelompok orang yang berupaya untuk membebaskan anggota GAM yang ditahan atau dipenjara. Terhadap kasus ini, maka yang bersangkutan dikelompokkan pula sebagai GAM dan harus ditumpas. Hal ini misalnya terlihat dari kasus pengadilan Thaib yang diadili karena dianggap ikut membebaskan Yusuf Sulaiman (anggota GAM) yang ditahan di Kodim Lhokseumawe serta merampas senjata ABRI pada 17 September 1989.

Kelima, seseorang yang memberi perintah untuk menyerang pos-pos ABRI yang ada di Aceh. Terhadap mereka akan diperlakukan hal yang sama, sebagai bagian dari kelompok GAM yang harus ditumpas. Kasus ini terlihat dari dakwaan terhadap Yusuf AB (Gubernur GAM) wialayah Pasee yang dituduh telah memberi perintah untuk melakukan penyerangan pos-pos ABRI pada waktu itu.

Keenam, adanya pencetakan selebaran dan pembuatan propaganda yang dilakukan oleh simpatisan GAM. Selebaran propaganda ini disebarakan kepada masyarakat Aceh di sekitar

wilayah industri. Selebaran-selebaran tersebut umumnya isinya menghasut agar membenci tentara dan pemerintah serta menghasut agar melawan mereka para kolonialis Jawa yang patut dimusuhi.

Ketujuh, ada yang ditangkap dan ditahan karena menyerahkan senjata dan peluru. Kasus ini dialami oleh seorang purnawirawan ABRI (Polisi) Muhammad Saidi alias Ahmad Saidi. Ia dianggap menyerahkan senjata api berikut sejumlah peluru (100 butir peluru Colt) untuk mendukung GAM. Kasus yang sama dialami oleh Usman Irsyadi Keuchik Alue Gadong Langsa yang diadili karena memberikan empat granat dan peluru kepada GAM. Kasus yang sama dapat dilihat dari pengadilan Muhammad Nazar bin Abdullah, karena menyediakan bahan peledak hasil curian di PT. KAA, berupa dinamit TNT sebanyak 16 batang (16 Kg) lengkap dengan kabel gulungannya.

Kedelapan, seseorang yang menjadi intel GAM, maka yang bersangkutan dianggap telah melakukan kegiatan untuk memata-matai negara. Terhadap orang yang melakukan kegiatan tersebut, biasanya ditangkap dan diadili. Kasus ini terlihat dari pengadilan Sulaiman bin Mahmud pada 25 Oktober 1989, yang diadili karena menjadi intel GAM.

Kesembilan, seseorang yang bertugas untuk mencari sumbangan dana buat GAM. Kegiatan seperti itu, terlihat dari kasus pengadilan Drs. Ilyas bin Idris yang dituntut 10 tahun penjara, karena dianggap mencari sumbangan bagi GAM pada pengadilan 13 Mei 1992 di Bireuen. Kasus yang sama dialami oleh Tgk. Zulkarnain yang dituduh memeras untuk dana GAM di jatuhi hukuman 19 tahun penjara.

Rata-rata orang-orang yang disebut di atas dianggap telah melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Karenanya, mereka dihukum dengan UU Subversif, yang paling rendah adalah 4 tahun penjara, tetapi umumnya rata-rata dipenjara 10-19 tahun, bahkan ada yang dihukum seumur hidup. Namun anehnya, setelah

persidangan ada sesuatu yang mengganjal, karena sebagian besar dari mereka kemudian dilepaskan kembali oleh TNI. Pada 21 Juni 1991, sebanyak 77 orang tersangka anggota GPK dilepaskan. Mereka dilepaskan karena dianggap tidak terlibat secara langsung.¹⁰⁷ Mereka ini dilepas oleh Pangdam Bukit Barisan Mayjen TNI R. Pramono kepada Gubernur Aceh dan Sumatera Utara. Pada tahun 1995, sebanyak 35 tahanan GPK lagi dilepaskan, setelah mereka mengucapkan ikrar kesetiaan kepada NKRI. Di antara yang dilepaskan ini, ada enam orang yang pernah mendapat latihan di Cam Tahura Libya, dan empat orang lagi dari salah satu tempat latihan GPK di sebuah negara tetangga. Mereka dilepaskan pada tanggal 10 November 1995 oleh Dan Kolak Ops Jaring V Kol (Kav) Robik Mukav yang juga Danrem 011/Lilawangsa.¹⁰⁸

Dengan ditangkapnya sebagian besar anggota GAM pada periode kedua ini (1989-1992), mengakibatkan posisi ASNLF cukup sulit karena kurang mendapatkan respon dari khalayak, bahkan akhirnya dikejar-kejar sebagai Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK). Dari berbagai pemberitaan dan dokumen yang ada menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah, Ulama (MUI), Pemuda (KNPI), Partai Politik, dan tokoh-tokoh masyarakat pun tidak mendukung gerakan ini, bahkan mereka memberi rekomendasi agar gerakan ini yang dianggap sebagai gerakan kriminal biasa harus ditumpas.¹⁰⁹ Walaupun demikian, perlu juga dipahami bahwa munculnya dukungan lebih bersifat politis karena secara psikologis dipengaruhi oleh kekuatan Orde Baru dan ABRI waktu itu. Pada kenyataannya ada sebagian dari desertir ABRI waktu itu yang

¹⁰⁷ *Kompas*, 24 Juni 1991.

¹⁰⁸ *Kompas*, 13 November 1995.

¹⁰⁹ Beberapa dokumen ini misalnya dapat dilihat dari tulisan Tulus Widjanarko dan Asep S. Sambodja, (eds.), *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1999).

mendukung gerakan Hasan Tiro, dan mereka inilah yang melakukan aksi-aksi teror di sekitar kawasan industri.¹¹⁰

Menurut analisa Prof. Ali Hasjmy, memang betul aksi-aksi GPK pada 1989 adalah kelanjutan dari GAM, namun dalam perhitungannya hanya 10 persen saja, sementara selebihnya adalah pelarian yang terdiri dari para penjahat dan bekas anggota ABRI yang tersingkirkan.¹¹¹ Selain itu, kelompok GAM pada generasi kedua (1989-1991) juga merupakan sebuah kelompok campuran dari kelompok idealis (GAM periode pertama) dan kelompok frustrasi yang kurang baik segi ekonominya. Kelompok GAM kedua ini sangat kejam dan paling keras.¹¹² Gubernur Ibrahim Hasan dan Prof. A. Hasjmy bahkan menyebut mereka bukan manusia, karena kekejaman dan cara keji yang dilakukannya tidak lagi nilai-nilai kemanusiaan.¹¹³

Konflik di Aceh periode 1998-2003 ditandai dengan menguatnya Gerakan Aceh Merdeka (GM) sebagai aktor utama konflik Aceh. GAM sekarang, yang merupakan lanjutan dari GAM generasi pertama dan kedua mempunyai struktur yang lebih moderen dan sistematis. Struktur GAM terdiri atas dua struktur utama, yaitu Struktur Petinggi GAM di Swedia (Sebagai Pemimpin Tertinggi Wali Nanggroe Aceh dan GAM) dan kedua adalah struktur operasional GAM di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

Selain itu, tampak dukungan terhadap GAM yang sudah sedemikian meluas. Dari awal pendiriannya, GAM dirancang dengan basis 17 wilayah, tetapi baru pada periode sekarang, hal itu dapat diimplementasikan. Ada kesan pembiaran pada masa-masa awal 1998 setelah DOM dicabut, sehingga pertumbuhan GAM demikian

¹¹⁰ *Kompas*, 13 November 1995.

¹¹¹ *Majalah Tiras*, No. 7, 13 Maret 1997.

¹¹² *Ibid.*

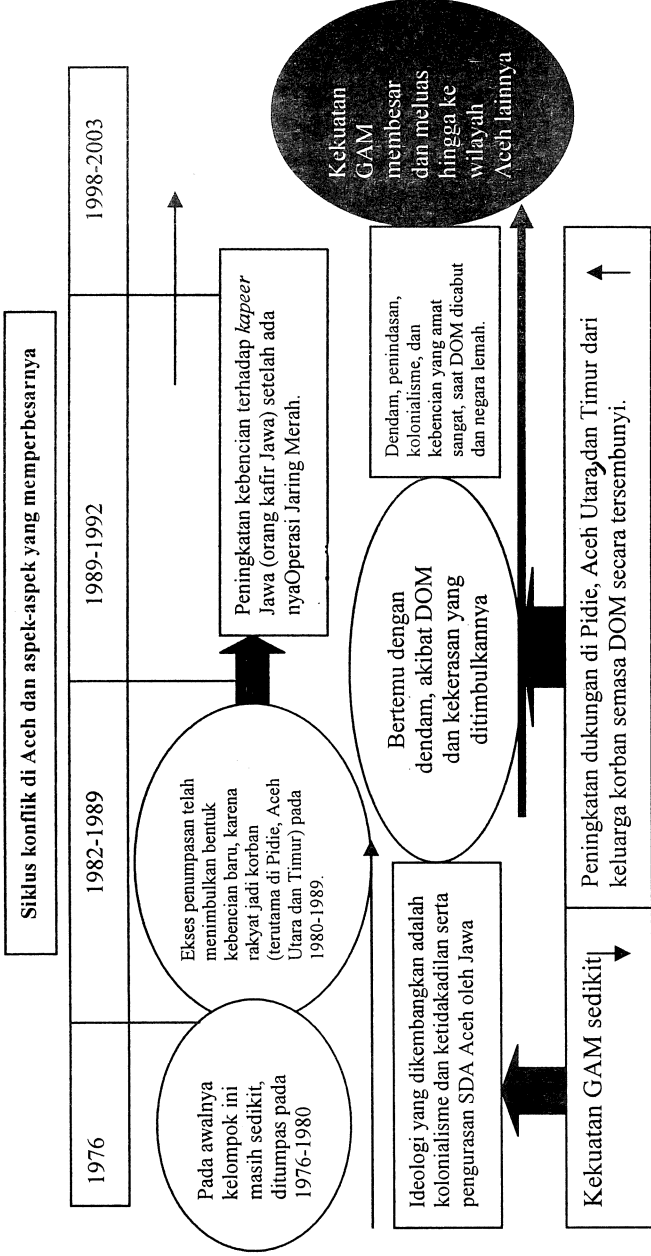
¹¹³ *Tempo Interaktif*, edisi 23 Agustus 1998. Menurut Ibrahim Hasan bahwa ada Polisi ditembak mati di tengah jalan, kemudian dipotong-potong, istrinya kemudian diperkosa, mereka itu GPK teroris. Teroris yang dilatih di Libya.

meluas dan mengakar. Dari segi ini, maka terlihat bahwa konflik Aceh pada periode 1998-2003 merupakan konflik yang sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, struktur GAM bukan lagi dalam situasi rekonsolidasi sebagaimana yang pernah terjadi pada 1982-1989, tetapi kekuatannya sudah sangat besar, kurang lebih 5.000-6.000 prajurit dengan berbagai macam jenis senjata. *Kedua*, ada dukungan konteks sosial dan politik, di mana sebagian besar masyarakat Aceh yang kecewa akibat DOM telah “mendukung” gerakan ini, walau dengan tingkat dan derajat yang berbeda-beda. Namun, dukungan yang terbesar adalah dari para korban DOM, baik karena orang tua dan keluarganya dibunuh, disiksa, maupun dianiaya oleh berbagai tindak kekerasan yang terjadi di masa itu. Selain didukung oleh para korban DOM seperti telah disinggung sebelumnya, GAM juga memperoleh dukungan dari orang-orang yang frustrasi dan pengangguran, bahkan dari para kriminal.

Membesarnya GAM sebagai aktor utama konflik di Aceh, salah satu penyebabnya adalah cara penanganan di masa 1976 yang tidak pernah tuntas. Kesalahan penanganan di masa DOM ini telah menimbulkan dendam kesumat yang sulit diukur dan tak berujung.

Gagalnya DOM (terutama Operasi Jaring Merah 1-X) sebagai cara penyelesaian masalah di Aceh, telah menyebabkan dendam kesumat baru terhadap NKRI pada umumnya, dan khususnya TNI. Pada masa 1998, TNI bahkan disebut oleh orang Aceh sebagai *sipai* (penjahat).

Mengenai siklus pertumbuhan GAM sejak 1976, dapat dilihat dalam bagan di bawah yang menunjukkan suatu perkembangan yang menarik.



Salah satu faktor yang menyebabkan GAM begitu kuat pada masa 1998, menurut dugaan penulis adalah adanya konsolidasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh GAM yang dilepaskan pada 1995 sebagaimana telah disebut di atas. Selain tokoh-tokoh yang dilepaskan pada 1995, pada 1999 sebagian tokoh kunci GAM periode 1989-1992 yang dilepaskan oleh Presiden Habibie. Dari peristiwa tersebut tampak ada gejala kesengajaan yang dilakukan oleh petinggi TNI, karena tidak masuk akal jika mereka dilepaskan hanya karena alasan tidak terlibat langsung, padahal ada yang menjadi pelatih atau pernah dilatih di Libya. Dengan kata lain, ada suatu pertanyaan mendasar, ada apa dibalik tindakan tersebut? Apalagi sebagian tokoh-tokoh GAM yang aktif melakukan aksi-aksi pada masa 1989-1992 adalah desertir ABRI dan Polisi. Dengan adanya kelompok ini, tidak mustahil mereka berhasil membangun jaringan mereka kembali, dan terlibat aktif dengan aksi-aksi GAM periode 1998-2003.

Tahap pertumbuhan GAM pada 1998-2003 ini terlihat dengan jelas dari penjelasan sebagai berikut:

1. Fase Konsolidasi Kekuatan. Fase ini terjadi pada saat terjadinya reformasi 1998 dengan digulingkannya rejim Soeharto di Jakarta. Di Aceh muncul gerakan yang sama, terutama yang diusung oleh Gerakan Mahasiswa dengan isu keadilan HAM (*justice*) dan pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat di Aceh, serta dicabutnya DOM. Dengan munculnya gerakan tersebut, GAM sesungguhnya telah melakukan konsolidasi di antara mereka, baik yang di dalam maupun di luar negeri.¹¹⁴ Setelah DOM dicabut, pada 7 Agustus 1998 oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto di Masjid Baiturrahman Lhokseumawe, terjadi kerusuhan besar di sana saat pasukan hendak dipulangkan yang kemudian terkenal dengan tragedi Simpang KKA.

¹¹⁴ Wawancara, Oktober 2003.

2. Fase Sosialisasi Ide Merdeka: Kurangnya respon Pemerintah Pusat atas tuntutan politik gerakan mahasiswa yang sudah mulai meluas, dengan dukungan berbagai kelompok masyarakat, termasuk GAM, akhirnya mulai muncul gagasan merdeka dalam gerakan mahasiswa di Aceh. Ide ini sesungguhnya merupakan strategi gerakan, agar mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat, dengan tujuan agar tuntutan awal mereka untuk mengadili para pelanggar HAM benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Namun, hal itu tidak kunjung mendapatkan respon. Keterlambatan respon ini, menyebabkan tumbuhnya sosialisasi merdeka yang dilakukan oleh GAM dengan terang-terangan, yaitu dengan melakukan propaganda dan janji-janji politik melalui rapat-rapat akbar di masjid-masjid dan lapangan-lapangan, bahwa Aceh Merdeka akan membuat rakyat Aceh makmur, tidak ada pajak, dan akan mendapatkan uang tanpa kerja.¹¹⁵ Gagasan ini semakin mendapatkan respon, setelah terjadinya berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM oleh TNI pada 1999, di mana sebagian di antaranya merupakan kasus besar pelanggaran HAM berat, seperti: Tragedi Gedung KNPI, Tragedi Sungai Arakundo, Tragedi Teungku Bantaqiah, dan kasus-kasus lain-lainnya. Kasus-kasus ini dianggap sebagai kesengajaan pemerintah pusat untuk menunjukkan sikap tidak ikhlas menyelesaikan persoalan Aceh.
3. Fase "Separatisme," upaya Merdeka dan Membangun Sayap Militer GAM. Kegagalan pendekatan yang dilakukan dalam operasi pemulihan keamanan mulai dari Operasi PPRM, Operasi Rencong I, Operasi Sadar, Operasi Meunasah, dan Operasi Pemulihan Keamanan oleh pihak polisi serta timbulnya beberapa korban sipil dan aksi-aksi teror, justru membuat rasa dendam semakin sulit dihilangkan. Di lain sisi, tumbuh gerakan referendum, sebagai sebuah opsi untuk menyelesaikan Aceh yang

¹¹⁵ Wawancara, Oktober 2003.

dilakukan oleh SIRA (Sentra Informasi Referendum Aceh) yang terinspirasi oleh lepasnya Timor-Timur dari Indonesia. Maka praktis, gerakan di Aceh tumbuh seiring referendum (yang diplesetkan preemendum -- semuanya bebas) dan propaganda GAM bahwa sebentar lagi Aceh akan merdeka. Pada fase ini, kekuatan GAM mulai menyebar ke luar basis utamanya (Kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur) ke hampir seluruh wilayah Aceh (lihat basis GAM dalam pembahasan selanjutnya).

Pertarungan gagasan antara referendum (dengan dua opsi merdeka atau tetap bergabung dengan NKRI), merdeka versi GAM dan Otonomi Khusus versi Pemerintah Daerah terus berlangsung. Namun, karena kuatnya kekecewaan politik terhadap Pemerintah Pusat, akhirnya gerakan ini terus berjalan dan sulit untuk dibendung. Setelah Nazar Ketua SIRA ditangkap, baru opsi referendum agak mereda. Setelah itu pemerintah memberlakukan Otonomi Khusus melalui UU tentang Nanggroe Aceh Darussalam yang direspon dengan acuh tak acuh oleh orang Aceh. Dalam situasi tanpa kesepakatan itulah GAM akhirnya justru tumbuh menjadi kekuatan yang cukup besar, terutama setelah adanya Jeda Kemanusiaan I, II, dan moratorium, praktis masa itu digunakan GAM untuk merekrut anggota dan menambah wilayah kerja mereka. Aparat keamanan (Polri-TNI) kurang mampu melakukan pengamanan wilayah, karena memang ada "unsur ketakutan" dari TNI -- yang karena belum adanya payung hukum tidak secara tegas melakukan tugasnya, di samping kenyataan bahwa sipil tidak menghendaki adanya operasi militer -- menyebabkan mereka mengalami dilema dalam menjalankan tugas. Faktor ini pula yang menyebabkan pertumbuhan GAM cukup pesat.

Sementara itu, meskipun Aceh telah diberi Otonomi Khusus, namun program pemerintah daerah NAD sulit dilakukan dalam situasi konflik semacam itu. Bahkan Pemerintah Daerah NAD

kalah cepat dalam membangun infrastruktur untuk sosialisasi perdamaian dan untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah GAM. Akhirnya, situasi demikian secara jeli dimanfaatkan oleh GAM. Propagandanya adalah bahwa fase perjanjian (baik masa Jeda Kemanusiaan I, II, Moratorium, dan CoHA) adalah sebagai pintu masuk bagi kemerdekaan Aceh.¹¹⁶

Sebenarnya kegiatan pembangunan ekonomi di Aceh setelah pencabutan DOM (1998) sudah mulai berjalan mendekati normal sejalan dengan adanya berbagai upaya penyelesaian masalah Aceh, terutama dialog dan perundingan damai antara pemerintah Republik Indonesia dan pihak GAM. Untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan di Aceh, pemerintah telah mengeluarkan berbagai Inpres, mulai Inpres No. 4, Tahun 2001 yang kemudian diganti dengan Inpres No. 7, Tahun 2001, sampai Inpres No. 1, Tahun 2002. Inpres-inpres tersebut merupakan dasar bagi pelaksanaan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu untuk menyelesaikan masalah Aceh, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun politik dan keamanan.

Jika kondisi objektif di lapangan diperhatikan, terlihat adanya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di beberapa daerah di Aceh, dengan mulai beraninya penduduk berusaha (*berdagang*) di malam hari sebagaimana terlihat di Banda Aceh. Padahal sebelumnya banyak penduduk di daerah tersebut yang tidak berani keluar malam, apalagi untuk berusaha. Hanya saja di beberapa tempat masih sering terjadi pergolakan-pergolakan akibat adanya bentrokan fisik antara pihak TNI/POLRI dan pihak GAM, seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara baru-baru ini. Fenomena seperti ini sudah tentu berdampak terhadap kegiatan ekonomi penduduk, terutama yang berskala menengah kebawah.

¹¹⁶ Wawancara, Oktober 2003.

Seperti diketahui, semenjak republik ini memasuki era reformasi, ternyata situasi keamanan di Bumi Serambi Mekkah mengalami eskalasi yang sangat drastis. Bahkan tindak kekerasan yang terjadi Aceh melebihi apa yang terjadi saat daerah tersebut diberlakukan sebagai daerah operasi militer (DOM) pada pemerintahan Orde Baru yang lalu. Salah satu daerah yang hingga saat ini keamanannya masih sering mengalami gangguan adalah Kabupaten Aceh Utara. Daerah ini sejak diberlakukannya DOM dikenal sebagai kancah pertarungan antara aparat TNI/POLRI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bahkan di beberapa daerah di Kabupaten Aceh Utara ditemukan berbagai kuburan massal sebagai peninggalan saat DOM diberlakukan di daerah tersebut.

Bentuk gangguan keamanan yang terjadi di Aceh umumnya dan di Kabupaten Aceh Utara pada khususnya yang dapat mengganggu bergeraknya roda pembangunan ekonomi sangat beraneka ragam. Gangguan keamanan tersebut mulai dari terjadinya bentrokan fisik antara pihak GAM dan TNI/POLRI, intimidasi, penculikan dan pungutan liar dari orang-orang tidak dikenal (OTK). Jika kegiatan pembangunan terletak di daerah konflik, biasanya kegiatan tersebut sama sekali tidak bisa dilakukan. Walaupun kegiatan pembangunan tersebut dapat berjalan, namun ongkos yang harus dikeluarkan cukup tinggi untuk membayar berbagai pungutan-pungutan yang sifatnya illegal. Bahkan adakalanya proyek-proyek pembangunan yang sudah selesai tiba-tiba dibakar oleh orang-orang tidak dikenal. Fenomena seperti ini merupakan pemandangan yang biasa di Aceh, karena banyak sekali gedung sekolah, rumah penduduk, pertokoan dan perkantoran yang saat ini tinggal puing-puing belaka karena hangus terbakar. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian penduduk, karena terbatasnya sarana dan prasarana produksi.

Dengan diberlakukannya U.U. No. 18, Tahun 2001 diharapkan Aceh mendapat alokasi anggaran yang lebih besar,

terutama dari peningkatan presentase bagi hasil, baik yang bersumber dari penerimaan pajak maupun yang diperoleh dari penerimaan sumberdaya alam, khususnya minyak dan gas alam. Dana bagi hasil yang diperoleh Aceh yang berasal dari minyak bumi ditetapkan sebesar 55%, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari gas alam sebesar 40%. Persentase pendapatan yang diperoleh Aceh dari dana bagi hasil tersebut ternyata lebih besar daripada yang ditetapkan dalam U.U. No. 25, Tahun 1999.¹¹⁷

Semua hiruk-pikuk berbagai kegiatan industri yang ada di Kota Lhok Seumawe (Aceh Utara) ternyata tidak mampu menimbulkan *multiplier effect* bagi penduduk yang berdomisili di daerah sekitar kawasan industri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah hanya terfokus pada pengelolaan sumberdaya alam semata, sedangkan penduduk yang tinggal di daerah sekitar pusat industri dibiarkan terlantar. Semuanya ini terjadi karena paradigma pembangunan yang digunakan selama ini lebih menonjolkan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan pembangunan yaitu dengan memacu berdirinya berbagai pusat-pusat industri dalam skala yang besar. Tanpa disadari kebijakan pembangunan tersebut telah mengakibatkan berbagai kegiatan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang menjadi basis kehidupan penduduk di Aceh menjadi terlantar.

Besarnya persentase dana bagi hasil yang diterima tersebut kiranya dapat memberikan keadilan bagi rakyat Aceh yang selama ini merasa diterlantarkan, terutama dalam bidang pembangunan. Selanjutnya dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang sangat mendasar kiranya dapat dijadikan momentum oleh seluruh rakyat Aceh dimanapun juga untuk bangkit kembali mengejar ketinggalannya. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah tersebut juga dapat dijadikan landasan bagi rakyat Aceh untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini terjadi di daerah mereka.

¹¹⁷ Dipo Alam 2002.

Berbagai kritik dilontarkan oleh berbagai kalangan masyarakat Aceh terhadap pemberian otonomi khusus Aceh melalui Undang Undang No. 18 Tahun 2001. Pemberian otonomi khusus sama sekali tidak berarti daerah tersebut akan makmur walaupun diberikan perimbangan keuangan yang sangat besar. Hal ini mengingat bahwa dengan undang-undang tersebut Aceh hanya diberi cek kosong, tanpa bisa mengimplementasikan apa-apa yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Masalah perimbangan keuangan tersebut di atas tidak jelas hitungannya, sekian dari jumlah berapa, sehingga tidak jelas pula berapa yang akan diterima. Tokoh-tokoh masyarakat Aceh menganggap perimbangan keuangan tersebut hanya akal-akalan pemerintah pusat agar Aceh tidak bergolak lagi.

Dari penjelasan di atas, tampak terlihat bahwa faktor utama membesarnya kekuatan GAM pada periode 1998-2003 adalah lambannya Pemerintah Pusat dalam mengambil keputusan penyelesaian yang tepat bagi masyarakat Aceh. Kelambanan ini disebabkan karena pergantian Presiden dari Habibie ke Abdurrahman Wahid yang kemudian dilengserkan dan diganti oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Puteri. Ada kesan bahwa persoalan konflik Aceh dibiarkan dan harus diselesaikan oleh masyarakat Aceh sendiri. Dengan kondisi seperti itu, maka justru memberikan peluang bagi lahirnya aktor dan kelompok-kelompok baru dalam konflik Aceh yang semakin luas dan besar pengaruh wilayahnya.

C. Aktor GAM: Karakter dan Basis Wilayahnya

Aktor konflik Aceh yang teridentifikasi terdiri atas: GAM Hasan Tiro dan GAM di luar kelompok Hasan Tiro, aktor Pemerintah (Pemerintah Daerah-Pusat; TNI, Polisi), maupun kelompok *civil society*, yang terdiri dari LSM, NGO Internasional, kelompok intelektual dan masyarakat awam. Gambaran mengenai para aktor ini terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Aktor-aktor Dalam Konflik Aceh

Level	Aktor Aceh	Aktor di Pusat	Aktor di luar keduanya
Elit	<ul style="list-style-type: none"> • GAM Hasan Tiro • MP GAM don Zulfahri • Pemerintah Daerah dan perangkatnya • Tokoh-tokoh Ulama yang menjadi elit 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah RI dan perangkatnya • TNI • Polri 	<ul style="list-style-type: none"> • GAM Hasan Tiro Swedia • MP GAM Don Zulfahri di Malaysia • Henry Dunant Center (HDC)
Society/grassroot (masyarakat akar rumput)	<ul style="list-style-type: none"> • NGO's • Intelektual • Ulama/Tokoh Agama selain elit • Mahasiswa • Pemuda • Masyarakat • Kelompok tak dikenal 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Aceh di luar Aceh • NGO's kemanusiaan 	<ul style="list-style-type: none"> • NGO's kemanusiaan

Dalam perkembangannya, karena sifat konfliknya yang cenderung struktural dan politis, aktor utama dari konflik di Aceh menjadi terfokus pada GAM dan Pemerintah Pusat (dalam hal ini TNI-Polri). Namun demikian, selain kelompok GAM sebagai aktor inti dari konflik di Aceh, masih terdapat beberapa kelompok lain yang patut dipertimbangkan kontribusinya dalam konflik Aceh, baik kontribusi yang positif maupun negatif.

Dilihat dari peta kelompok, gerakan separatisme di Aceh terbagi atas beberapa kelompok atau pemain kunci, yakni: GAM (Gerakan Aceh Merdeka), Mahasiswa yang tergabung dalam SIRA (Sentra Informasi Referendum Aceh), Ulama Dayah (HUDA), masyarakat, kelompok "liar" dan pemerintah daerah. GAM sendiri

pecah dari dalam terdiri dari dua faksi, yaitu faksi Dr. Zaini Abdullah dkk yang tergabung pada ASNLF (*Acheh Sumatra National Liberation Front*) dan faksi Dr. Husaini Hasan dkk dengan nama MP-GAM (Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka). Meskipun isu ini dibantah oleh Dr. Zaini Abdullah, tetapi oleh Tengku Yusra Habib Abdul Gani, Pimpinan Biro Penerangan ASNLF yang berkedudukan di Denmark, keberadaan dua faksi tersebut dibenarkan. Bahkan disebutkan bahwa MP-GAM hanya segelintir orang saja. Tetapi, kehadiran MP-GAM Don Zulfahri ada kaitannya dengan militer Indonesia. Kelompok GAM ASNLF menyebut mereka sebagai kelompok binaan militer Indonesia. Kebenaran atas isu ini pernah diumumkan oleh Graitto Usodo selepas tertembaknya Don Zulfahri di Malaysia bahwa memang MP-GAM merupakan bentukan militer, sebagai strategi untuk memecah dari dalam.

Karakteristiknya memang berbeda, kelompok MP-GAM lebih moderat dibandingkan dengan GAM Hasan Tiro yang radikal. Kelompok MP-GAM kurang menghendaki cara perjuangan dengan menggunakan sayap militer (senjata). Alasan mereka karena sebagian besar perang bersenjata akan membawa kesengsaraan dan korban sipil. Itu artinya, orang Aceh sendiri yang akan menjadi korban. Karena itu, kelompok ini lebih memilih cara diplomasi, dialog dan perundingan. Sementara GAM Hasan Tiro dianggap sebagai kelompok radikal, karena di samping menempuh cara diplomasi, mereka juga menempuh cara perang. Namun dalam salah satu pernyataannya GAM Hasan Tiro menyatakan bahwa cara perang yang ditempuhnya sebagai akibat dari dikejar dan disiksanya sebagian aktivis GAM di masa DOM, sehingga mereka harus dipersiapkan agar dapat melakukan perlawanan. Selain itu, dengan adanya angkatan perang GAM, maka posisi tawar mereka akan tinggi untuk menekan Pemerintah Indonesia agar bersedia memenuhi tuntutan yang mereka tawarkan.

Dalam perkembangan konflik Aceh, kelompok MP-GAM yang memilih strategi moderat ini tersingkir, dan praktis kelompoknya sekarang tidak muncul lagi setelah Don Zulfahri terbunuh di Malaysia. Pembunuhnya pun belum ketahuan dan sangat misterius, siapa yang melakukannya. Salah satu alasan mengapa MP-GAM-Don Zulfahri muncul adalah karena adanya persepsi bahwa Tengku Hasan Muhammad di Tiro Wali Negara sudah udzur dan sakit-sakitan, sehingga perlu dibentuk MP-GAM. Majelis Executive-MP-GAM (Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka) ini terdiri dari 11 orang tua (senior GAM) yang telah mengikuti berdirinya GAM dari sejak awal. Mereka adalah: (1) Husaini Hasan; (2) Tengku Daud Husin (Panglima Angkatan Bersenjata); (3) Tengku Idris Mahmud (Gubernur Wilayah Peureulak), (4) Tengku Muhammad Mahmud (Panglima Wilayah Peureulak); (5) kedua beliau ini adalah abang dari assjahid Dr. Zubir Mahmud; (6) Tengku Abdullah Krueng; dan (7) Enam (6) orang lagi orang tua yang tidak dapat kami sebutkan namanya di sini karena dengan alasan keamanan.

Faksi ASNLF adalah kelompok Dr. Hasan Tiro yang bermarkas di Swedia yang mempunyai jaringan di beberapa negara, dan jaringan pelaksana perangnya di Aceh langsung di bawah pimpinan Teungku Abdullah Syafi'i (alm.) yang digantikan oleh Muzakir Manaf yang dibantu oleh Tengku Maulida, Panglima Komando Pengatur Strategi Angkatan Perang Aceh-Sumatra Merdeka bersama dua orang juru bicara bernama Tengku Abdullah Safe'i dan Abu Razak atau Ismail Syahputra.

C.1. GAM Hasan Tiro: Aktor dan Basis Wilayahnya

Dalam sejarah GAM Hasan Tiro, basis wilayah mereka sejak kemunculannya adalah tiga lokasi di daerah pesisir utara, yaitu Aceh Utara (Lhokseumawe), Aceh Timur, dan Pidie. Dalam perkembangannya, sejak masa DOM dicabut tahun 1998, kekuatan dan basis mereka terus bertambah.

Pada tahun 2003, menurut sumber PDMD, Lhokseumawe merupakan salah satu kantong pasukan GAM dengan 427 pucuk senjata. Pidie menempati urutan kedua dari segi jumlah senjata, setelah Sigli dengan 889 pucuk senjata. Di Banda Aceh ada sekitar 170 senjata dengan berbagai jenis. Selebihnya, 344 pucuk senjata tersebar di Langsa, Aceh Timur; 113 di Meulaboh, Aceh Barat; 79 di Takengon, Aceh Tengah; dan sisanya (71 buah) tersebar di Kutacane, Aceh Selatan dan Tapaktuan, Aceh Tenggara.¹¹⁸ Penyebaran senjata ini menunjukkan adanya perluasan basis GAM dan aktor-aktor yang mendukungnya. Dengan kata lain, hingga April 2003, wilayah GAM tidak lagi terbatas hanya di daerah basis lamanya (Aceh Utara, Pidie dan Aceh Timur), tetapi telah menyebar dan berkembang ke wilayah Aceh lainnya, mulai dari Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Selatan dan Aceh Tenggara.

GAM membagi wilayah Aceh menjadi 17 bagian, di mana masing-masing wilayah mempunyai seorang gubernur dan panglima.¹¹⁹ Pada awal-awal kemunculannya tahun 1976, tidak semua wilayah GAM tersebut ada struktur pemerintahannya sebagaimana telah disebutkan, karena basis utamanya hanya di tiga wilayah Aceh Utara, Aceh Timur dan Pidie. Namun, pada pertumbuhannya sejak 1998, GAM telah mampu mengisi 17 struktur pembagian daerahnya, baik dari tingkat gubernur, panglima GAM, hingga ke struktur bawahnya. Dengan kata lain, secara organ gerakan, GAM baru mampu mewujudkan cita-cita dan keinginan yang terstruktur tersebut pada periode konflik 1998-2003. Struktur pemerintahan di semua wilayahnya juga telah dilengkapi dengan komandan militer dan pemerintahan sipil. Yang masih lemah strukturnya hanya di wilayah Langkat dan Kutacane, tapi kedua wilayah tersebut sekarang juga sudah bergerak untuk memperkuat

¹¹⁸ *Tempo*, 12-27 April 2003.

¹¹⁹ *Kompas*, 7 Mei 1991.

diri.¹²⁰ Ketujuh belas wilayah tersebut adalah terlihat di tabel di bawah ini:

Tabel 3
Wilayah GAM dan Struktur Penguasanya

No.	Wilayah	Panglima GAM	Nama
1.	Aceh Utara	Panglima GAM seluruh Aceh	Abdullah Syaf'ie (sekarang: Muzakir Manaf)
2.	Aceh Utara	Panglima Sagoe	Sofyan Dawood
3.	Pidie		
4.	Bireun		
5.	Aceh Rayeuk, Aceh Barat	Wakil Panglima AGAM	Tgk Hamzah
6.	Batee Iliak	Panglima Sagoe	Darwis Jeunieb
7.	Darulmakmur, Aceh Barat		Tgk Mahdi
8.	- Pasee Aceh Utara - Pasee Aceh Utara (Kawasan Teupin Kuyun)	Panglima GAM Wakil Panglima GAM	Muzakir Muallim Sofyan Daud
9.	Meureuhom Daya	Panglima Muda GAM	Abu Khaidir
10.	Darussalam, Banda Aceh	Komandan Operasi GAM	Ayah Muni
11.	Aceh Selatan		
12.	Aceh Besar		
13.	Pulau Nasi		
14.	Takengon, Aceh Tengah		
15.	Aceh Barat		
16.	Langkat		
17.	Kutacane		

Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, baik media massa maupun pemberitaan selama Operasi Terpadu dan dokumen-dokumen tertulis lainnya baik dari GAM maupun TNI.

Jumlah tentara yang dimiliki, versi pemerintah Indonesia, sebanyak 2000 orang termasuk jenis pasukan khususnya. Menurut keterangan resmi dari TNI disebutkan bahwa pada awal-awal 1999-2000 jumlah anggota GAM diperkirakan sekitar 2000 orang, tetapi meningkat di masa perjanjian (mulai Jeda Kemanusiaan hingga

¹²⁰ Berdasarkan penjelasan Abu Sofyan Daud Wakil Panglima GAM Wilayah Pasa pada *Kontras* No. 125 Tahun IV 21-27 Februari 2001.

CoHA) diperkiran antara 5.000 hingga 6.000 orang. Namun, menurut Biro Penerangan ASNLF yang berkedudukan di Denmark, Tengku Yusra Habib Abdul Gani, dalam sebuah wawancara dengan Radio di Aceh disebutkan bahwa mereka memiliki sekitar 40-50 ribu pasukan yang terdiri dari tiga tipe, yaitu pasukan khusus, prajurit pembantu dan masyarakat pendukung.¹²¹ Inilah inti dari model perang di Aceh -- yang dilakukan dengan cara perang gerilya, sehingga memerlukan tiga unsur pasukan, yaitu pasukan khusus, prajurit pembantu dan masyarakat pendukung.

Tabel 4
Kekuatan GAM dan Estimasi Dukungan Setiap Daerah
(GAM's Strongholds In Aceh)

Daerah	Personil (Orang)	Senjata (Pucuk)	Masyarakat Pendukung (%)
Pidie	2.385	427	22
Aceh Utara	1.316	889	30
Aceh Besar	275	170	20
Aceh Selatan	.89	57	20
Aceh Barat	222	113	13
Aceh Tengah	86	79	0,1
Aceh Timur	827	344	29
Aceh Tenggara	25	4	0,1
Jumlah	5.225	2.083	

Sumber: Media Indonesia, 29 April 2003

Mereka juga didukung oleh peralatan-peralatan militer yang cukup tangguh. Sekedar contoh, mereka memiliki sejumlah peralatan militer, seperti jenis luger kaliber 9 MM, magazen M-16, magazen Jungle,¹²² senjata api laras panjang magazen AK-47, senjata mesin peluncur roket jenis "trigger" buatan Amerika Serikat (AS) dan 462

¹²¹ Pernyataan PDMD.

¹²² Sumber saat penangkapan Fadli dan Hamzah oleh tim Unit Reaksi Cepat Polresta Jambi, Kamis (15/2) sekitar pukul 01.00 WIB).

amunisi GLM yang memiliki jangkauan tembak sejauh sekitar satu kilometer, baju PDL loreng, ransel serbu, bakal kain loreng, 66 pasang sepatu PDL produk Malaysia, Pistol FN, senjata berat jenis GLM (senjata pelontar), granat rakitan berwarna hijau, senjata api otomatis, granat tangan, senjata stand (ukuran standar), dan lain-lain. Oleh karena itu, kelompok GAM ASNLF ini sangat kuat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya, karena sudah merupakan suatu kelompok yang sangat sistematis baik dari sudut “negara bayangan,” maupun komando militer di setiap wilayahnya.

Berikut adalah gambaran beberapa lokasi yang pernah menjadi basis GAM Hasan Tiro, meskipun setelah adanya Operasi Militer, sudah hampir berubah dan hanya sebagian wilayah yang masih dikuasi GAM. Daerah-daerah yang pernah diduduki oleh GAM selama konflik Aceh 1998-2003, yaitu:

1. Aceh Besar.
2. Desa Keutapang, Kecamatan Pantee Ceureumen, Aceh Barat.
3. Desa Matao, Kecamatan Lhok Sukon Aceh Utara.
4. Desa Meunasah Daya, Menusah Tengku Digadong, Kecamatan Jeumpa, Bireuen.
5. Desa Teuku Gambit, Kabupaten Aceh Barat.
6. Kampung Alue Ketapan, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie. Di sini GAM berkekuatan 25 orang.
7. Kampung Pantan, Kecamatan Nisam, Aceh Utara.
8. Kawasan Bukit Seribu, Kabupaten Aceh Timur.
9. Kawasan Gunung Goh, Desa Simpang Jaya, Kecamatan Juli, Bireuen. Ini merupakan basis wilayah GAM di Bireuen, dengan jumlah kekuatan sekitar 150, ditambah

50 anggota GAM yang bersenjata lengkap sehingga jumlahnya kurang lebih 200 orang.

10. Kawasan Muara Tiga, daerah pesisir Timur Aceh berbatasan dengan Selat Malaka. Kekuatan GAM diperkirakan sekitar 50 orang.
11. Kawasan Seulawet, Desa Layeun, Kecamatan Leupung, Aceh Besar.
12. Kawasan Teupin Kuyun merupakan tempat juru bicara GAM Sofyan Dawood mengarahkan anak buahnya.
13. Kecamatan Nisam, Aceh Utara termasuk basis GAM.
14. Kecamatan Sawang dan Kecamatan Tanah Pasir Aceh Utara.
15. Matang Nibong, Kabupaten Aceh Timur
16. Panglima Operasi GAM Peureulak Aceh Timur, Ishak Daud.
17. Pulau Nasi, Kabupaten Aceh Besar. Pulau ini luasnya 42 kilometer persegi. Pulau ini sebagai pusat latihan (kawah candradimuka GAM), yang didukung pula dengan lahan ganja yang luas. Jumlah anggota GAM di pulau ini, ada yang memperkirakan 40 orang, ada yang menyatakan 200 orang dengan 50 pucuk senjata. Susunan Pemerintahan di Pulau ini terdiri dari: Panglima Wilayah (setingkat Kodam) dijabat Abdullah Adam. Wakil Panglima Ayah Meri, Kepala Kepolisian Daerah Iskandar bin Sjech, Gubernur Manan, Panglima Operasi Asra bin Muhammad, serta Panglima Sagoe Syahril dan Teungku

Hasan Muda. Selain itu, ada juga 15 jabatan sipil seperti pegawai administrasi.¹²³

18. Seulimeum

19. Sibreh

20. Ujung Pancu, Kecamatan Peukan Banda, Aceh Besar.

21. Wilayah Panggoi, Lhoseumawe, meliputi: sebagian besar Kota Lhokseumawe.

Dengan peta lokasi sebagaimana digambarkan di atas, maka basis wilayah GAM telah mengalami pergeseran yang cukup mendasar, dan dapat dikatakan bahwa hampir seluruh wilayah Aceh pernah diduduki oleh GAM pada periode 1998-2003. Meskipun setelah adanya operasi militer (sejak 19 Mei 2003) telah ada beberapa wilayah yang ditinggalkan, karena telah diduduki oleh TNI, namun basis mereka di perbatasan Aceh Utara dengan Aceh Timur masih tetap eksis. Ketika Abdullah Safi'i menjadi Panglima GAM, ia memindahkan basisnya dari Pidie ke sini, dalam hal itu sangat dirahasiakan. Setelah Safi'i meninggal dan kedudukannya sebagai Panglima GAM diteruskan oleh penggantinya yaitu Muzakir Manaf, basis utama wilayah GAM masih di Aceh Utara paling tidak hingga Oktober 2003. Sementara Pidie dan Aceh Timur lebih merupakan daerah basis penyangga.

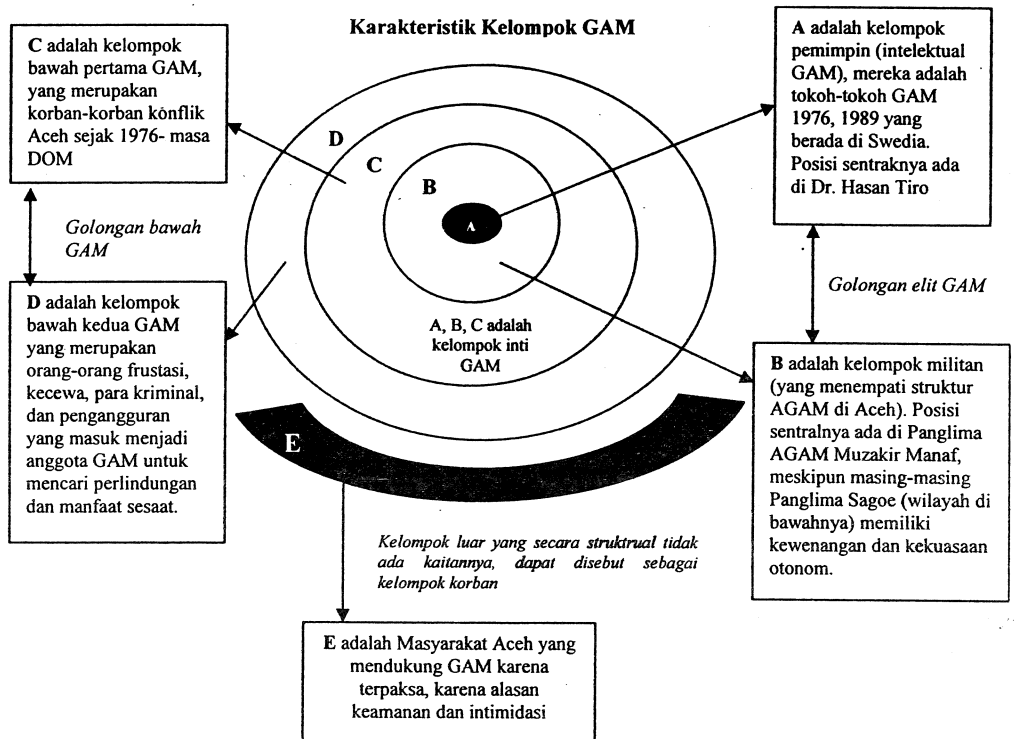
Ada suatu perkembangan yang cukup penting, terutama setelah munculnya faksi-faksi pada tahun 1999-2000, Hasan Tiro melakukan perubahan strategi dan menata kembali organisasinya. Penataan menuju modernisasi ini dilakukan karena adanya kritik dan perpecahan di dalam.¹²⁴ Salah satu kritik yang pernah disampaikan oleh kalangan intelektual Aceh adalah terlalu banyaknya anggota GAM yang tidak pernah sekolah, tidak memiliki pengalaman, dan

¹²³ *Kompas*, 10 Juni 2003.

¹²⁴ Wawancara, September 2003.

banyak diantara mereka yang mantan preman, mantan Pemuda Pancasila, maupun kelompok-kelompok yang oleh Polri-TNI dianggap sebagai “penjahat.” Memang, dari beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa rata-rata anggota GAM yang tipe C dan D, kurang memiliki pengalaman dan berpendidikan rendah, dan sebagian besar adalah kelompok frustrasi dan pengangguran. Umur mereka masih tergolong sangat muda, rata-rata antara 18-35 tahun.

Bila kita menggunakan kerangka Hoffer untuk menggambarkan suatu gerakan atau gerakan massa, maka karakteristik aktor-aktor GAM dapat digambarkan sebagai berikut:



Karakter aktor-aktor GAM tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang cukup rapi. Karena GAM menggunakan taktik perang gerilya yaitu strategi menyerang dan lari (*hit and run*)—yang sering pula disebut dengan penghadangan, maka dengan sengaja ia membuat organisasinya dengan sistem sel dan berlapis-lapis dan satu sama lainnya tidak saling bersentuhan. Ini merupakan ciri dari setiap gerakan separatis, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di beberapa tempat lainnya seperti di Filipina Selatan. Sistem sel dan struktur berlapis ini dimaksudkan agar tidak semua anggota GAM dapat secara mudah menemui pimpinan di tingkat atas, bahkan basis utama atau markas utamanya saja tidak semua anggota GAM dapat mengetahuinya, karena memang sering berpindah-pindah. Sistem sel dan berlapis sebagai dasar penyusunan struktur AGAM juga mempunyai tujuan, di samping untuk keamanan organisasi, juga agar tidak terjadi kekosongan apabila salah satu anggotanya tertangkap, karena secara otomatis akan ada yang menggantikannya. Dengan model ini akan tampak terlihat seperti ungkapan “mati satu tumbuh seribu.” Seni perang semacam ini memang telah lama dikenal di Aceh, dan mungkin atas dasar pengalaman perang Aceh masa lalu, ketika melawan penjajah/kolonial Belanda. Betapa kuatnya struktur tersebut tampak dari kesulitan TNI-Polri untuk melumpuhkan GAM dan kekuatannya, bahkan sepertinya mustahil untuk menembus dan mencari lokasi markas besar mereka untuk menangkap para panglima GAM yang masih terus bergerilya.

Mengenai struktur komando GAM, ada perbedaan versi antara beberapa sumber yang dianalisis. Dalam salah satu versi disebutkan struktur GAM adalah sebagai berikut:¹²⁵

¹²⁵ Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan, dan Impian*, (Jakarta: Grassindo, 2001), hlm. 116-117.

1. Ketua GAM sebagai panglima tertinggi militer
2. Panglima Perang GAM merangkap Ketua Komando Pusat Angkatan Gerakan Aceh Merdeka.
3. Panglima Wilayah yang membawahi daerah kabupaten.
4. Wakil Panglima Wilayah.
5. Komando Operasi bertugas mengkoordinasikan rencana operasi militer.
6. Juru Bicara yang merangkap sebagai pusat penerangan wilayah.
7. Panglima *Meureubo* (Panglima Muda) yang membawahi sejumlah kecamatan.
8. Panglima *Sagoe* yang membawahi sejumlah desa.

Namun dalam sumber lainnya disebutkan bahwa struktur GAM memiliki kepemimpinan sebagai berikut, versi ini yang agak mendekati kenyataan di lapangan.

Tabel 5
Struktur Organisasi ASNLF/GAM 1999

No	JABATAN	Nama
1	Wali Negara GAM / ASNLF	Hasan Di Tiro
2	Majelis Pemerintahan GAM (Hubungan Lemah)	DR. Husaini Hasan (Ketua) M. Yusuf Daud (Sekretaris) T. Don Zulfahri (Sekjen)
3	Menteri Kesehatan	Dr. Zaini Abdullah
4	Sekretaris / Juru Bicara di Swedia	Bachtar Abdullah
5	Mentroe di Singapura	Malik Mahmud Haitar
6	Panglima Angkatan GAM	Abdullah Syafii
7	Juru Bicara Komando Pusat Tiro	Tgk Maad Muda (M. Yahya, SH)
8	Juru Bicara ASNLF	Ismail Syahputra
9	Komandan Pengatur Strategi	Tgk Maulinda
10	Komando Wilayah Linge	Muhammad Aulia Win Rime Raya

Bab 3 – Kelompok dan Aktor Konflik Aceh: Analisis Asal-Usul, Kepentingan dan Ideologi Perlawanan

11	Komando Wilayah Peurelak	Abu Khaled Syahrul Abu Nida
12	Komando Wilayah Samudra Pase	Said Hanan (Abu Said) Nizar Muhammad Abu Sabar (Tgk Bale Kuneng) Ilyas Pase Sofyan Daud Ismail Sytahputra Tgk Malinda
13	Komando Wilayah Batee Iliek	Darwis Djeunib Tamlika Ali Abu Marwan
14	Komando Wilayah Pidie	Abdullah Syafei Tgk Maad Muda Abu Razak Abu Hadi
15	Komando Wilayah Aceh Rayeuk	Tgk Tanjura Ayah Muni Abu Sufyan
16	Komando Wilayah Meorehom Daya	Abu Arafah Abu Khaidir Abu Tausi
17	Komando Wilayah Meulaboh	Said Mustafa Ibrahim Syafir
18	Komando Wilayah Singkel	Tgk Ladang (Syukri)
19	Komando Wilayah Tapak Tuan	Muhibuddin Ahmad Mukajirin
20	Komando Wilayah Blang Pidie	Sirajuddin Aziz Abu Hud M. Nasir

Sumber : Dr. M. Isa Sulaiman, 2000 : 124

Tabel 6
Pimpinan Militer GAM 2002

No	Wilayah	Panglima	Juru Bicara
1	Nanggroe Aceh	Muzakkir Manaf	Sofyan Daud
2	Pidie	Abu Razak	Anwar Husen
3	Batee Iliak	Darwis Djeunib	Zarkata
4	Samudra Pase	Sofyan Daud	Tgk Jamaika
5	Peurelak	Sanusi	Tgk Mansur
6	Tamiang		
7	Blang Pidie	Burhan	
8	Meurohom Daya	Syukri	Z.A. Rani
9	Tapaktuan		Nasir
10	Linge	Fauzan Azima	
11	Singkel		
12	Aceh Rayeuk	Abu Sufyan (?)	Muchsalmi

Sumber : Berita Harian Serambi Jan-Mei 2003

Untuk melihat bagaimana implementasi struktur di atas sebagai contoh dan ilustrasi, dapat dilihat dari nama-nama pemimpin GAM di bawah ini:¹²⁶

1. Abdu Tausi (Juru bicara GAM wilayah Meurohom Daya, Lamno dan Aceh Barat).
2. Abu Said Anan (Komandan pengatur dan Strategi perang GAM wilayah Pase).
3. Abu Syeh (Jubir GAM wilayah Lheuhe Pidie).
4. Ahmad Kandang (Pimpinan GPL dan wakil Hasan Tiro)
5. Amri Abdul Wahab (Jubir GAM).
6. Arjuna Ahman (Mantan Panglima Muda GAM wilayah Pidie).
7. Aya Sofyan (Jubir GAM wilayah Aceh Besar).
8. Ayah Muni (Jubir GAM)
9. Bahtiar Abdullah (Jubir GAM Swedia).

¹²⁶ Disarikan dari berbagai berita dan dokumen, baik dari media massa maupun dokumen TNI selama Operasi Terpadu dilakukan, 19 Mei-20 Oktober 2003.

10. Dr. Husaini Hasan (Menteri penerangan dan pendidikan GAM, ada yang menyebut sebagai pimpinan Faksi MB GAM Eropa).
11. Ishak (Ketua Biro Penerangan GAM wilayah Peureulak).
12. Nasiruddin bin Ahmed (Juru bicara GAM)
13. Said Adnan Adami (Gubernur GAM Wilayah Pasee)
14. Sofyan Ibrahim Tiba (anggota komite keamanan untuk jeda kemanusiaan)
15. Sofyan Daud (Panglima GAM Wilayah Pase merangkap Jubir GAM Pusat)
16. Surya Darma (Tokoh GAM Aceh di Malaysia).
17. Tengku Hidayatullah (Juru bicara GAM).
18. Tengku Maat Muda (juru bicara panglima AGAM Tengku Abdullah Safi'i).
19. Teuku Don Zulfahri (Sekjen Majelis Pemerintahan GAM).
20. Teuku Kamaruzaman (Wakil GAM di KBAK).
21. Tgk Ismail Syahputra (Juru Bicara GAM Komando Hasan Tiro).
22. Tgk. Abdullah Safe'i (Panglima AGAM Seluruh Aceh)
23. Tgk. Hasan Saleh (Wakil kepala gerakan DI/TII Aceh setelah Daud Beureuh).
24. Tgk. Ilyas bin Muhammad Abeg (Wakil GAM di KBMK).
25. Tgk. Nasiruddin Ahmad (Juru bicara GAM)
26. Wien Rimba Raya (Jubir GAM wilayah Linge).
27. Zaini Abdullah (Komandan operasional harian GAM, kubu Hasan Tiro di Swedia, juga sering disebut sebagai Menteri Kesehatan GAM).
28. Zakaria Ahmad alias Jack Kandang (Kapolda GAM wilayah Pase)
29. Abdul Muthalib (Gubernur GAM Sabang).
30. Suryana (22) Pelatih *Inong Belee*
31. Bachtiar (43) Komandan Operasi Wilayah Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Besar.
32. Abu Bakar, Juru Sumpah yang membaiaat anggota GAM.
33. Zainun, Pencari dana buat GAM.

34. Darwis Junib, Panglima GAM di kawasan Gunung Goh, Desa Simpang Jaya, Kecamatan Juli, Bireuen.
35. Samsuar Harun (45) Kepala Sektor (Polsek) GAM Wilayah Desa Suka Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie.
36. Edi Hanafiah (25) pemungut pajak GAM.
37. Bachtiar, Juru Penerangan GAM Wilayah Samudera Pase.
38. Tengku Ali Nurdin, pemasok senjata bagi GAM (yang umumnya dari Thailand).
39. Mustofa Ibrahim, Panglima Sagoe Wilayah Panggoi, Lhoseumawe, ditangkap di rumahnya di Medan. Selama 1,5 tahun menjabat sebagai Panglima Sagoe Cot Kepulo yang wilayahnya meliputi: sebagian besar kota Lhokseumawe. Secara struktural kelompoknya berada di bawah komando langsung Panglima Wilayah Samudera Pase Tengku Sofyan Dawood (yang juga sering dikenal sebagai juru bicara GAM).¹²⁷ Kekuatan pasukannya terdiri atas 120 personel, dengan 25 pucuk senjata AK47, 10 pucuk M16, empat pucuk Baretta, dan satu pistol jenis FN.
40. Irwandi (Dosen di Unsyiah), pengolah dan penerbit propaganda GAM -- di tangkap di Jakarta pada 23 Mei 2003.¹²⁸

Struktur GAM ini hampir mirip dengan struktur Kodam di Indonesia. Artinya, organisasi mereka dibuat untuk penguasaan wilayah yang telah mereka tentukan sebelumnya. Di samping memiliki struktur militer (AGAM), mereka juga mempunyai struktur pemerintahan sipil bayangan, mulai dari Gubernur GAM hingga ke tingkatan paling rendah.¹²⁹ GAM juga mengembangkan jenis-jenis pasukan seperti: pasukan tempur, intelijen, polisi, pasukan *inong*

¹²⁷ *Kompas*, 28 Mei 2003.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Wawancara dengan Mantan Pangdam Iskandar Muda, Oktober 2003.

balee (pasukan janda korban DOM), dan *karades* (pasukan khusus).¹³⁰

Untuk mengkoordinasikan pasukan, Panglima Wilayah yang langsung di bawah koordinasi Panglima Perang GAM ada tujuh orang, yaitu: Panglima Wilayah Pasee Pantebahagia, Panglima Wilayah Peurulak, Panglima Wilayah Tamiang, Panglima Wilayah Bateelik, Panglima Wilayah Pidie, Panglima Wilayah Aceh Darussalam, dan Panglima Wilayah Meureum Daya.¹³¹

Menurut seorang sosiolog Aceh, strategi perang dan pembagian wilayah GAM Hasan Tiro mirip sekali dengan strategi perang dan struktur pembagian wilayah dalam perang Aceh ketika melawan Belanda maupun pada peristiwa DI/TII.¹³² Meskipun demikian, tidak disebutkan mengapa ada kemiripan. Salah satu dugaan adalah agar tidak mudah diketahui dan dilumpuhkan, karena bila melihat sejarah perjuangan rakyat Aceh di masa perang dengan Hindia Belanda dan masa peristiwa DI/TII memang cukup sulit untuk ditaklukkan. Salah satu penyebabnya adalah wilayah Aceh yang memang sulit dijangkau dengan alat-alat senjata berat, sehingga pasukan gerilya dapat menghindari dengan cepat. Taktik gerilya yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya memungkinkan, karena alam Aceh yang mendukung.

Secara geografis, wilayah Aceh sebagian besar adalah hutan, sehingga medan tempur seperti itu akan menjadi kendala bagi musuh-musuhnya. Selain itu, apabila kita melihat kasus DI/TII yang dapat bertahan hingga 10 tahun di hutan-hutan dan gunung-gunung, berarti mereka mempunyai bahan makanan yang cukup. Alam Aceh yang subur merupakan salah satu faktor pendukung untuk penyediaan bahan-bahan makanan, karena praktis selama konflik, hanya

¹³⁰ Pane, "Sejarah dan Kekuatan...", hlm. 118.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Wawancara dengan sosiolog Aceh dan Dosen Unsyiah, September 2003.

sebagian tanah pertanian, perkebunan, dan tambak yang bisa diolah. Mungkin ini merupakan bagian dari mekanisme survival GAM, di samping bantuan dan hasil memeras penduduk.

GAM juga menganut strategi rotasi pasukan yang dilakukan secara berkala. Rotasi besar-besaran, misalnya, dilakukan menjelang pelaksanaan operasi militer yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat pada 19 Mei 2003. Hal ini dilakukan di samping sebagai suatu strategi, juga karena ada tujuan lain. Oleh karena itu, banyak dijumpai kasus di mana meskipun TNI yang melakukan penyisiran dapat menembak beberapa prajurit GAM, akan tetapi masyarakat di dekat kejadian umumnya tidak mengenal mereka, atau kalaupun mengenalnya, pasti ditunjukkan bahwa orang-orang itu adalah orang luar desanya, atau dari desa lain.¹³³

Salah satu tujuan dari pola rotasi ini adalah untuk menghindari intimidasi terhadap sanak keluarga mereka, dan ini sulit dihindari apabila mereka teridentifikasi di lokasi kejadian, di mana mereka dilahirkan. Motif lainnya, adalah akan lebih mudah melakukan pemerasan (meminta pajak Nanggroe) apabila dilakukan di luar desa asalnya.¹³⁴

C.2. Aktor di Luar GAM dan Kepentinganya

Selain GAM, aktor konflik Aceh sangatlah banyak dan amat beragam. Semua aktor tersebut memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Seperti telah disinggung di muka, kiranya perlu kita memetakan kepentingan aktor-aktor di luar kelompok GAM ini,

¹³³ Wawancara dengan Mantan Pangdam Iskandar Muda, Oktober 2003.

¹³⁴ Wawancara, Oktober 2003. Menurut informan ini, kalaupun GAM akan melakukan intimidasi dan pemerasan di suatu desa, tidak mungkin GAM yang ada di desa itu yang melakukannya, karena mereka sudah kenal dengan penduduk setempat. Biasanya mereka mengontak GAM di desa lain yang jauh untuk melakukan intimidasi dan pemerasan, sehingga tidak akan ketahuan siapa yang melakukannya, walaupun informasi tetap dari GAM yang tinggal di desa bersangkutan.

sehingga kita dapat mengetahui aktor manakah yang kontribusinya positif atau negatif dalam konflik yang terjadi.

C.2.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Apakah pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kontribusi positif atau negatif dalam konflik Aceh? Pertanyaan ini penting, mengingat ada kepentingan di balik aktor-aktor pemerintah pusat (TNI-Polri, menteri-menteri), Parpol, dan pemerintah daerah (gubernur, TNI-Polri) dan elit-elit strategis di Aceh dan Jakarta. Dalam pandangan masyarakat Aceh pun, mereka ini dianggap mempunyai kepentingan atas konflik yang terjadi di Aceh. Kepentingan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan (Pusat maupun Daerah) adalah kepentingan untuk menjaga teritorialnya agar tidak lepas sebagaimana kasus lepasnya Timor-Timur. Ini terlihat dari sikap para elit politik di Jakarta yang menekankan bahwa NKRI adalah harga mati. Sikap itu juga tampak pada TNI yang selalu mengatakan bahwa NKRI tidak boleh diganggu gugat bahwa dalam hal ini tidak ada tawar menawar. Selain itu, intepretasi TNI atas peran mereka sebagai penegak dan penyelamat NKRI telah memposisikan elit politik sipil ke dalam sikap yang dilematis. Dengan sikap yang demikian, maka berimplikasi pada sulitnya mencari titik temu dalam konflik yang sedang terjadi.

Selain kepentingan di atas, banyak pihak menilai bahwa ada kepentingan lain di balik konflik Aceh sehingga berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang pasti. Mengapa TNI misalnya tidak mau berdamai? Dan mengapa akhirnya Presiden mengeluarkan kebijakan operasi militer di Aceh? Ada dugaan bahwa dengan berlanjutnya situasi konflik di Aceh, TNI akan memperoleh keuntungan---baik dari segi pendanaan yang mereka terima untuk operasi mereka maupun keuntungan-keuntungan lainnya. Anekdote yang sering muncul dari masyarakat Aceh adalah bahwa TNI-Polri pergi ke Aceh membawa M-16, dan pulangnyanya membawa 16 M. Sebuah anekdot yang

memerahkan telinga, tetapi dalam konteks konflik di tingkat lokal, kerap kali keuntungan-keuntungan seperti itu memang akan dengan mudah diperoleh dan didapatkan.

Di kalangan politisi sipil yang bergabung dalam kabinet gotong royong ada dua kelompok yang selalu bertarung dan berupaya untuk mempengaruhi dan meyakinkan presiden; apakah penyelesaian Aceh mau dilakukan dengan damai ataukah harus dengan senjata. Kelompok pertama melihat bahwa masalah Aceh dapat diselesaikan dengan cara damai, sementara kelompok kedua memandang masalah Aceh tidak mungkin diselesaikan dengan cara damai, tetapi harus dengan kekuatan TNI untuk mengatasinya. Kelompok yang dominan saat ini adalah kelompok yang menghendaki cara kekerasan (baca: senjata). Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menempuh cara damai tampaknya kurang memperoleh dukungan, sehingga sulit untuk mendapatkan dana, tetapi untuk operasi militer, dana tersebut langsung disetujui melalui APBN. Sesungguhnya, ada apa dibalik sikap demikian?¹³⁵

Dalam situasi konflik di Aceh saat ini, persaingan dan rivalitas di tingkat lokal, terutama di antara aparat pemerintah daerah, menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi terhadap konflik Aceh. Ada dugaan di sebagian kalangan masyarakat, bahwa konflik yang terjadi di Aceh menjadi salah satu faktor penguat posisi tawar Pemda untuk menyedot dana yang jumlahnya trilyunan rupiah. Dengan peningkatan APBD dari sebelum 1998 hanya sekitar milyaran rupiah, tetapi menjadi trilyunan rupiah sejak 1999-2003, tentu saja besarnya anggaran dan dana bantuan untuk Aceh ini cukup menggiurkan, apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa sekarang ini Pemda NAD tidak tersentuh oleh aspek pertanggungjawaban. Salah seorang tokoh masyarakat Aceh misalnya, menyampaikan bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah NAD sarat dengan

¹³⁵ Wawancara dengan tokoh Aceh yang menjadi Delegasi RI dalam perundingan dengan pihak GAM.

KKN. Salah seorang isteri pejabat teras di NAD dapat memutuskan seseorang memperoleh proyek atau tidak. Kejanggalan-kejanggalan lain yang dilakukan pejabat di NAD, adalah prosedur pembelian kapal ferry dan penyewaan pesawat terbang yang tidak jelas, serta penyelewengan dana pengungsi. Seperti diketahui, Pesawat Seulawah yang menjadi kebanggaan Pemerintah NAD yang diresmikan Presiden Megawati beberapa tahun lalu ternyata bermasalah dan tidak bisa mengudara lagi. Oleh karena itu, salah seorang tokoh masyarakat mengemukakan bahwa ada seorang pejabat Pemerintah NAD yang ketahuan korupsi tetapi tidak pernah disentuh oleh hukum, karena yang bersangkutan membela NKRI.

Kepentingan korupsi merupakan salah satu bentuk yang paling nyata terjadi di Aceh saat ini. Indikasi ini sangat kuat dari pemberitaan-pemberitaan tentang berbagai pelaksanaan pembangunan fiktif yang sekedar ada catatan administrasinya, tetapi implementasinya bohong belaka.¹³⁶ Persoalan korupsi ini juga dikemukakan dalam berbagai wawancara dengan orang-orang Aceh, karena tingkat korupsi di NAD merupakan nomor satu bila dibandingkan dengan daerah-daerah otonom lainnya.

Tak mengherankan, apabila Pemda NAD dianggap bukan sebagai solusi, melainkan merupakan bagian dari masalah konflik yang terjadi di Aceh (*part of conflict*).¹³⁷ Sementara kelompok pengusaha rekanan Pemda pun memainkan dana pembangunan dengan caranya sendiri. Tak mengherankan apabila ada dugaan tentang pembukuan ganda dalam implementasi APBD terutama untuk anggaran pembangunannya.¹³⁸ Apalagi, terlihat bahwa penggunaan dana-dana tersebut, tidak transparan dan tidak ada pertanggungjawaban. Tak mengherankan jika ada yang berkomentar bahwa konflik Aceh merupakan sebuah proyek bagi pihak-pihak

¹³⁶ Wawancara, September 2003.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Wawancara, September 2003.

tertentu yang mengeruk keuntungan dari proses konflik yang terjadi. Di sisi lain, GAM juga memiliki kepentingan terhadap situasi konflik, terutama untuk memperoleh melalui cara pemerasan dan lain sebagainya. Gambaran yang ekstrem misalnya tampak bahwa dana pembangunan di Aceh selama konflik, minimal 30 persen disetor ke GAM, bila ingin aman.

Selain APBD, usaha untuk mempertahankan kekuasaan atau untuk menyingkirkan lawan-lawan politik juga mewarnai konflik Aceh. TNI misalnya, meskipun sering disebut bukan institusinya, sejumlah anggotanya meski dianggap desertir, ternyata terlibat dalam aktivitas penjualan senjata gelap. Beberapa kasus dan jaringan penjualan senjata gelap yang melibatkan kelompok ini telah terungkap dan telah ditangkap pelakunya, akan tetapi jelas bahwa dalam suasana konflik di Aceh, keuntungan akan dengan mudah diperoleh setiap aktor yang terlibat dalam konflik, termasuk pemerintah pusat dan daerah.

Hingga saat ini belum diketahui siapa yang harus dan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap berbagai penyimpangan kegiatan pembangunan yang banyak terjadi di Aceh. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi NAD sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa apabila instansi yang akan diaudit berada di daerah konflik. Ketidakberdayaan BPKP inilah yang membuat korupsi semakin merajalela di Aceh. Sementara itu terjadinya berbagai bentuk kolusi antara kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif telah menyebabkan berbagai penyimpangan yang terjadi di Aceh tidak pernah muncul ke permukaan. Sebagai contoh, salah seorang kepala daerah di Aceh terlibat dalam korupsi penggelapan dana reboisasi, namun ia dilindungi hakim dari pengadilan daerah yang bersangkutan, karena hakim tersebut menolak untuk turun ke lapangan untuk mencari barang bukti.

Seperti halnya pejabat pemerintah, kalangan pengusaha juga mendapat berkah dari terjadinya konflik di Aceh. Konflik yang terjadi memberi kesempatan kepada kalangan pengusaha untuk "ibarat

memancing di air keruh” dalam menjalankan pekerjaannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Aceh banyak pengusaha yang menang tender, tetapi tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Hal ini dapat mereka lakukan karena tidak satu pun dari pegawai pemerintah daerah yang berani turun ke lapangan untuk meneliti kebenaran pembangunan yang telah dilakukan. Alasan keamanan merupakan alasan klasik yang selalu dikemukakan mengapa mereka tidak berani turun ke lapangan. Yang aneh adalah bahwa berbagai penyimpangan tersebut terjadi di daerah yang relatif aman. Tentu bisa dibayangkan, ketika masalah tersebut terjadi di daerah yang bergolak, maka kemungkinan penyimpangannya pasti lebih parah lagi.

Dari semula telah diterangkan bahwa konflik yang terjadi Aceh paling tidak telah melibatkan dua kekuatan, yaitu GAM di satu pihak dan TNI/POLRI di pihak lain. Selama konflik berlangsung, terlihat bahwa TNI/POLRI telah memainkan peran penting dalam memperkeruh situasi di Aceh. Selama terjadi konflik, ternyata banyak pula anggota TNI/POLRI yang menjual jasa sebagai tenaga pengamanan (*security service*). Jasa mereka banyak dimanfaatkan oleh para pejabat maupun pengusaha dengan imbalan tertentu. TNI/POLRI yang seharusnya jadi pelindung masyarakat ternyata di lapangan melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji seperti, pemerasan, penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan. Berbagai tindakan TNI/POLRI tersebut telah menyakiti hati rakyat Aceh, sehingga mereka sama sekali tidak mendapat dukungan dari masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

Setelah diberlakukannya keadaan darurat militer di Aceh, ternyata tindakan aparat keamanan di lapangan semakin kasar dan brutal. Barangkali ini karena mereka merasa telah dilindungi oleh sebuah payung hukum. Dengan darurat militer sepertinya mereka menganggap bisa melakukan apa saja di Aceh. Hal ini kiranya sangat bertolak belakang dengan berbagai pernyataan petinggi TNI bahwa

prajurit yang dikirim ke Aceh merupakan prajurit pilihan dan terlatih. Namun pada kenyataannya prajurit yang dikirim sama brutalnya seperti ketika daerah Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) sepuluh tahun yang lalu. Selama pihak TNI/POLRI tidak merubah berbagai tindakannya di lapangan, kemungkinan besar masalah Aceh tidak akan pernah bisa diselesaikan, dan bahkan kalau tidak hati-hati, bukan tidak mungkin Aceh akan mengikuti jejak Timor Timur.

Sesaat setelah diberlakukannya keadaan darurat militer di Aceh, ternyata ada usaha-usaha dari kalangan tertentu untuk membentuk sebuah kekuatan dengan mempersenjatai rakyat (*milisi*) di Kabupaten Aceh Tengah. Pembentukan milisi tersebut pada mulanya sempat menimbulkan berbagai bentuk kekerasan yang telah mengakibatkan terjadinya eksodus penduduk, terutama orang Aceh Pidie yang telah hidup lebih dari satu generasi di Kabupaten Aceh Tengah. Mereka terpaksa mengungsi ke daerah lain hanya karena penduduk setempat terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha memusuhi mereka. Pihak milisi juga merusak kantor perwakilan dan menyerang Henry Dunant Center (HDC), yang beberapa waktu sebelumnya bertindak sebagai fasilitator bagi terjadinya perundingan antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia. Tindakan milisi merusak kantor HDC tersebut telah mencoreng wajah pemerintah Indonesia di dunia International.

Kekerasan yang dilakukan oleh para milisi ternyata tidak berlangsung lama, karena masyarakat kemudian menyadari bahwa pembentukan milisi tersebut merupakan proyek adu domba. Masyarakat Aceh Tengah mulai sadar bahwa mereka telah masuk dalam perangkap permainan kotor para elit politik, padahal mereka sebenarnya sama sekali tidak mengetahui masalah politik. Terjadinya eksodus besar-besaran orang Aceh Pidie ke daerah asalnya juga telah merugikan masyarakat setempat, karena berbagai kegiatan perdagangan menjadi lumpuh. Seperti diketahui, berbagai kegiatan perdagangan di Aceh Tengah dikuasai oleh orang-orang Aceh Pidie,

mulai dari warung kopi hingga ke sektor perdagangan yang berskala besar.

Di samping persoalan milisi, upaya pemerintah pusat untuk memekarkan Propinsi NAD menjadi beberapa propinsi juga telah menimbulkan persoalan bagi masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh, walaupun berasal dari etnis yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap merasa sebagai orang Aceh. Oleh karena itu, mereka selalu menyebut diri orang-orang Aceh, terutama jika bepergian ke luar daerah. Nama Acehlah yang selama ini telah mempersatukan berbagai etnis Aceh. Masalah ini kurang disadari oleh Pemerintah Pusat, sehingga usaha untuk memekarkan atau memecah Propinsi NAD hingga saat ini tidak terealisasi, padahal Pemerintah Pusat telah membuang biaya yang sangat besar. Selain itu, di daerah yang mau dimekarkanpun masyarakatnya mempertanyakan dari mana sumber pendapat daerahnya berasal apabila daerahnya dijadikan propinsi baru. Semua ini merupakan eksekusi dari kompleksitas konflik di Aceh yang berlarut-larut proses penyelesaian.

B. Civil Society (NGO Internasional, LSM, Mahasiswa, Ulama, dan Intelektual)

Konflik yang terjadi di Aceh ibarat benang kusut yang sangat sulit dicari ujungnya. Artinya, permasalahan yang terjadi di Aceh ternyata kompleks sekali, karena terlalu banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari terjadinya konflik di daerah tersebut. Seperti diketahui, konflik tersebut tidak hanya melibatkan GAM yang memang dari semula mengangkat senjata, melainkan juga telah melibatkan berbagai kalangan seperti: mahasiswa, LSM, birokrasi, militer, serta pengusaha, baik yang berada di Aceh maupun di Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Aceh yang berada di Jakarta bahwa konflik yang saat ini terjadi di Aceh kiranya perlu dipertanyakan apakah konflik tersebut

sengaja diciptakan atau merupakan strategi politik dengan sebuah tujuan tertentu.

Aktor-aktor yang bermain dalam konflik Aceh sangat banyak dan beraneka ragam. Tetapi yang jelas sebagian dari aktor-aktor tersebut lahir dari situasi yang tidak menentu di Aceh. Salah satu aktor penting yang paling dominan dan berpengaruh di Aceh adalah mahasiswa. Mahasiswa merupakan salah satu komponen penting yang mampu membentuk opini masyarakat Aceh tentang berbagai penyimpangan yang terjadi selama diberlakukannya DOM di daerah tersebut. Di era reformasi, berbagai komponen mahasiswa di Aceh bergabung menjadi satu dalam sebuah organisasi yang disebut Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA). SIRA tidak hanya terdapat di Aceh, tetapi juga telah mempunyai perwakilan di luar Aceh, antara lain di Jakarta. Mahasiswa yang terhimpun dalam SIRA ini ikut memainkan peran yang cukup signifikan dalam pergolakan di Aceh, mengingat ide/gagasan untuk melakukan referendum di Aceh datang dari SIRA, dan karena ide referendumlah maka SIRA dan GAM kemudian bisa berafiliasi menjadi sebuah gerakan yang sangat sulit dipatahkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pada sidang Majelis Rakyat Aceh yang berlangsung tidak lama setelah tumbangannya kekuasaan Orde Baru, SIRA berhasil menarik massa untuk berkumpul di Banda Aceh yang jumlahnya mencapai satu juta orang. Ide yang dijual SIRA ketika itu adalah akan diberikannya kesempatan kepada rakyat Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri melalui sebuah referendum yang bebas tanpa tekanan dari siapapun. Beberapa informasi yang diperoleh menerangkan bahwa ide referendum tersebut diilhami oleh pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur yang akhirnya memberi kemerdekaan pada daerah tersebut. Selain itu, ide referendum juga didasarkan pada kenyataan sejarah bahwa daerah Aceh tidak pernah diserahkan Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dituntut agar mengembalikan

kedaulatan Aceh melalui sebuah mekanisme demokratis yaitu melalui referendum.

Dalam rangka mensosialisasikan ide referendum, SIRA tidak hanya melakukan demonstrasi di Aceh, tetapi juga di Jakarta, antara lain ke perwakilan PBB untuk Indonesia. Pro dan kontra tentang referendum yang ditawarkan SIRA terus bergulir dan menjadi wacana dalam berbagai diskusi dan seminar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Para cendekiawan Aceh berpendapat bahwa kalau memang Pemerintah Republik Indonesia sudah tidak mampu lagi mengurus Aceh, sebaiknya rakyat Aceh diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun ada pihak yang beranggapan bahwa orang Aceh tidak berhak untuk melakukan referendum sendiri karena daerah Aceh merupakan wilayah Republik Indonesia sehingga referendum harus dilakukan dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia.

Walaupun wacana dan ide referendum yang dilontarkan SIRA telah berkembang begitu luas dalam masyarakat Aceh, namun ide tersebut ternyata mendapat tantangan yang cukup keras, tidak hanya dari kalangan pemerintah dan TNI, melainkan juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang sebelumnya pernah mendukung ide referendum di Aceh, seperti Amien Rais dan KH. Abdurachman Wahid. Kalangan pemerintah dan TNI sempat khawatir apabila SIRA dibiarkan secara bebas mengemukakan ide referendum maka bukan tidak mungkin suatu saat akan mendapat dukungan dunia sehingga akhirnya Aceh bisa merdeka. Kekhawatiran pemerintah dan TNI tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan beberapa tokoh penting SIRA, dan mengadili mereka dengan tuduhan melakukan tindakan makar (*subversif*). Bahkan beberapa tokoh penting dari perguruan tinggi, seperti rektor IAIN dan rektor Unsiyah yang dianggap dekat dengan SIRA, tewas terbunuh, namun hingga kini kasusnya masih belum terungkap apa motif dan latarbelakangnya.

Pada saat pemerintah reformasi terbentuk, ternyata GAM telah mampu meluaskan pengaruhnya ke seluruh Aceh. Hal tersebut terjadi setelah mereka berafiliasi dengan SIRA, yang lebih diterima oleh masyarakat Aceh karena dianggap gerakannya lebih bersih dan tidak bersenjata. SIRA berhasil menanamkan pengaruhnya melalui sosialisasi tentang arti pentingnya sebuah referendum bagi rakyat Aceh. Referendum tersebut merupakan jalan bagi rakyat Aceh untuk mencapai kemerdekaan sebagaimana yang dicita-citakan. Beberapa kalangan, terutama militer, menilai bahwa meluasnya pengaruh GAM dikarenakan mereka dapat memanfaatkan aktivitas referendum yang pernah dilakukan oleh SIRA. Namun beberapa intelektual Aceh beranggapan bahwa bukannya pengaruh GAM atau SIRA yang ada di mana-mana, melainkan karena perasaan senasib yang telah meluas ke seluruh penjuru Aceh. Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh TNI/POLRI telah mengakibatkan semua orang Aceh merasa senasib dan bersatu untuk melakukan perlawanan. Berbagai ketidakpuasan tersebut kemudian disalurkan melalui GAM dan/atau SIRA.

Kelompok lain yang berperan dalam konflik di Aceh adalah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik yang ada di Aceh, di Jakarta maupun yang berasal dari luar negeri. Beberapa kalangan dan tokoh masyarakat Aceh menilai munculnya berbagai LSM di Aceh hanya memperkeruh situasi, dan tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka juga menuduh LSM banyak yang bergerak di Aceh hanya bertujuan untuk mencari uang saja di mana LSM sudah dijadikan mata pencaharian. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebenarnya yang menggagas ide referendum di Aceh adalah LSM (yaitu SIRA) bukan rakyat Aceh, karena kebanyakan orang Aceh tidak mengerti apa itu referendum. Apabila rakyat ikut kegiatan tersebut adalah karena mereka tidak mengerti. Demikian pula rakyat yang ikut GAM, menurut mereka adalah karena terpaksa, karena takut dibunuh atau diculik.

“...Namun berbagai anggapan yang negatif tentang LSM tersebut tidak sepenuhnya benar, karena banyak di antara mereka yang juga ingin masalah Aceh dapat diselesaikan secara adil, antara lain dengan menindak pelaku-pelaku pelanggaran HAM di Aceh. Mereka sangat berperan dalam membuka mata dunia bahwa di Aceh memang telah terjadi berbagai pelanggaran HAM berat. Berhubung mereka lebih banyak melakukan kegiatan investigasi tentang berbagai pelanggaran HAM di Aceh, terutama pada saat DOM diberlakukan maupun pelanggaran yang dilakukan setelah DOM dicabut, sedikit banyak telah membuat kalangan pemerintah dan TNI merasa dipojokkan. Demi keselamatan banyak diantara tokoh-tokoh LSM tersebut yang sekarang tidak lagi berdomisili di Aceh. Bahkan ada pula di antara mereka yang melarikan diri keluar negeri. Mereka selalu mendapat ancaman dari orang-orang tidak dikenal. ...”

Demikian pula di Jakarta telah tumbuh berbagai kegiatan dan gerakan yang peduli terhadap penderitaan yang dialami masyarakat Aceh. Salah satu organisasi yang berusaha bersikap kritis terhadap upaya penyelesaian masalah Aceh adalah Forum Kepedulian Aceh (FORKA). Selain itu, ada pula organisasi Taman Isandar Muda (TIM) yang merupakan wadah masyarakat Aceh di Jakarta yang juga telah melakukan berbagai kegiatan, termasuk mengunjungi beberapa pejabat pemerintah yang dianggap mempunyai kepedulian terhadap Aceh. Salah satu himbauan mereka yang paling sering dilontarkan adalah agar semua pihak segera menghentikan berbagai bentuk kekerasan di Aceh, baik yang dilakukan oleh TNI/POLRI maupun GAM. Mereka juga meminta agar pemerintah segera membentuk sebuah Komisi Nasional Penyelesaian Aceh yang langsung berada di bawah presiden.

Selain itu ada pula LSM yang berdomisili di New York, Amerika Serikat dan diberi nama *International For Aceh* (IFA). IFA dipimpin oleh seorang putra Aceh yang bernama M. Jaffar Siddik. IFA merupakan sebuah LSM yang secara aktif mensosialisasikan

pentingnya masalah Aceh agar diselesaikan melalui dunia internasional. Solusi yang ditawarkan IFA dalam penyelesaian Aceh tidak jauh berbeda dengan SIRA dan GAM, yaitu merdeka. Walaupun berbagai kegiatan IFA tersebut berkaitan dengan isu kemerdekaan Aceh, namun pemerintah tidak bisa mencegahnya karena mereka berdomisili di luar negeri. Pemerintah Indonesia juga tidak mengadakan pencekalan terhadap para pimpinan IFA untuk berkunjung ke Indonesia. Hal ini terbukti dengan bisa berkunjungnya ketua IFA M. Jaffar Siddik ke Indonesia beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, pada waktu melakukan kunjungan ke Sumatera Utara, tiba-tiba M. Jaffar Siddik diculik oleh orang tak dikenal dan beberapa hari kemudian ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Sampai saat ini belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas tewasnya ketua IFA tersebut.

LSM berskala internasional yang sangat perhatian terhadap masalah Aceh adalah *International Crisis Group Indonesia* (ICGI) di bawah pimpinan Sidney Jones. ICGI secara aktif menghimbau agar menghentikan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di Aceh, karena semua itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah Aceh secara tuntas dan damai. Sidney Jones sebagai direktur ICGI dalam berbagai kesempatan selalu mengemukakan pendapatnya bahwa seyogyanya pemerintah menyadari kesalahannya di masa lalu di mana pemberlaku DOM ternyata tidak serta merta dapat menyelesaikan Aceh; bahkan telah menimbulkan berbagai bentuk balas dendam yang dilakukan oleh orang Aceh terhadap orang-orang yang berbau tentara. Dalam melakukan aktivitasnya, ICGI banyak melakukan kolaborasi dengan beberapa tokoh LSM Aceh di Jakarta yang saat ini tidak berani pulang ke Aceh.

Sementara itu, dalam konflik yang terjadi di Aceh, peran ulama dan/atau organisasi keagamaan di bawahnya, belum cukup kelihatan. Ada dugaan bahwa ulama dan intelektual di Aceh juga terlibat dalam konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keberadaan ulama dayah di Aceh memang belum begitu kelihatan perannya untuk menyelesaikan konflik, meskipun lembaga ini pernah dicoba dihidupkan kembali pada tahun 1999. Akan tetapi dalam kenyataannya, peran mereka kurang signifikan. Walaupun di masa Presiden Abdurrahman Wahid beberapa ulama pernah diundang ke Jakarta dalam rangka mencari solusi bagi penyelesaian Aceh, namun dalam konflik Aceh, peran mereka amat sulit ditemukan. Salah satu dugaan penyebabnya karena lembaga ulama telah dipinggirkan selama Orde Baru, sehingga peran mereka dalam masyarakat menjadi termarginalisasi. Ini terbukti dengan tidak adanya tokoh ulama yang mempunyai peran segelendari Teungku Daud Bereueuh maupun gubernur Aceh pertama, Ali Hasmy yang juga sebagai seorang ulama.

Betapapun posisi ulama dayah ditengarai seperti itu, namun dalam perkembangan konflik di Aceh, sepertinya peran mereka banyak di belakang layar. Ada dugaan bahwa mereka lebih condong untuk mendukung GAM. Sebagai contoh, ada seorang ulama besar yang berada antara Banda Aceh dengan Pidie bernama Teungku Lampisan. Konon, ia dianggap condong ke GAM, sehingga akan dihabisi, namun dilarang oleh Gus Dur. Akibatnya, ia tidak menjadi target, tetapi yang kemudian menjadi target adalah Teungku Bantaqiah. Dalam beberapa sumber yang pernah diwawancarai menyebutkan bahwa peran ulama dalam struktur GAM difungsikan untuk membaiai anggota-anggota GAM yang baru masuk. Meskipun dugaan ini tidak sepenuhnya benar, karena dalam struktur GAM ada satu unit khusus yang berfungsi untuk membaiai anggota GAM yang baru masuk. Namun satu hal yang patut di catat, bahwa keberadaan ulama Aceh telah mengalami pergeseran, tidak lagi seperti yang pernah dibayangkan di masa kejayaan mereka. Di masa lalu, mereka menjadi penguasa politik, penguasa agama, dan hampir semua sendi kehidupan rakyat Aceh. Namun setelah peristiwa DI/TII peran itu digantikan kembali oleh birokrasi Orde Baru dan peran ulama dayah mulai digeser dan dimarginalkan.

C. Kelompok “Gelap” atau Kelompok Misterius

Konflik di Aceh juga telah melahirkan kelompok “gelap,” baik yang mengatasnamakan GAM maupun sebagai TNI dalam melakukan operasinya. GAM gadungan ini sering disebut juga sebagai *GAM Cantoi* yang memanfaatkan situasi konflik dengan cara merampok, memeras dan mencuri kendaraan; bahkan banyak perampok dari Sumatera Utara yang beroperasi di Aceh selama daerah ini dilanda konflik. Mereka melakukan perampokan bank, perampasan kendaraan dan jenis-jenis kejahatan lainnya.

Yang lebih tragis lagi, seakan-akan ada bisnis jual beli nyawa di sana -- seseorang yang memiliki perseteruan dengan orang lain, bisa menyewa kelompok gelap ini untuk melakukan penculikan dan pembunuhan. Sebagian dari kasus-kasus pembunuhan yang terjadi jelas sebagian dilakukan oleh kelompok yang misterius, karena pihak GAM dan TNI-Polri tidak mengaku melakukannya.

Orang-orang tak dikenal ini telah memanfaatkan situasi konflik di Aceh untuk memperoleh keuntungan finansial dan memperoleh keuntungan pribadi. Motifnya jelas, yaitu uang, baik dari peredaran ganja di Aceh, maupun dari perampokan dan pemerasan. Peluangnya cukup tersedia besar dalam suasana konflik yang terjadi di Aceh saat ini.

Posisi Masyarakat Aceh dalam Konflik

Dalam situasi konflik seperti sekarang ini, kiranya cukup sulit mencari orang-orang yang bersedia mendukung dan bergabung dengan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Konflik tersebut telah membuat eksese negatif terhadap image negara di mata masyarakat Aceh, bahwa tidak ada manfaatnya sama sekali bergabung dengan NKRI, karena rakyat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hal ini kiranya bisa dibuktikan dari survei-survei yang sudah dilakukan untuk mengetahui apakah mereka mendukung

NKRI atau ingin merdeka. Dari berbagai pendapat yang dikumpulkan, tampak bahwa antara kelompok yang pro dan kontra kemerdekaan berbanding 50 : 50. Akan tetapi, mereka yang pro NKRI tidak bisa dijamin seratus persen akan terus berpegang pada pendapatnya, karena kebanyakan di antara mereka adalah kelompok massa yang mengambang. Mereka akan melihat situasi siapa yang kuat dalam konflik tersebut, apakah GAM, ataukah pemerintah RI bersama TNI/POLRI. Namun ada dugaan kuat di dalam masyarakat Aceh bahwa jika diadakan jajak pendapat, kemungkinan 90% rakyat Aceh akan setuju dengan kemerdekaan.

Jika ditinjau secara lebih praktis, pandangan masyarakat terhadap GAM kiranya tidak bisa diukur secara sederhana, karena kecenderungan mereka terhadap GAM sedikit banyak didasari oleh adanya ketakutan yang berlebihan dari masyarakat melihat berbagai tindakan brutal yang diperagakan oleh TNI/POLRI. Salah seorang aktivis Aceh mengemukakan perbedaan antara GAM dan TNI/POLRI sebagai berikut: GAM di mata masyarakat Aceh tidak pernah menyakiti, melukai apalagi melakukan perkosaan terhadap perempuan-perempuan Aceh, di sisi lain, pihak TNI/POLRI mempunyai sejarah dosa yang panjang di Aceh, yaitu berbagai pelanggaran HAM yang dilakukannya semasa DOM dan paska DOM seperti penculikan, pembunuhan dan pemerkosaan yang sangat melukai hati orang Aceh. Oleh karena itu, selama TNI masih berada di Aceh masyarakat merasa tidak ada jaminan akan aman dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dikarenakan mereka masih trauma dengan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh TNI di masa lalu. Kehadiran TNI saat ini melalui operasi darurat militer dikhawatirkan akan menambah barisan sakit hati yang sudah barang tentu akan berseberangan dengan NKRI.

Setelah hampir lima bulan darurat militer diterapkan di Aceh, ternyata belum menunjukkan tanda-tanda bahwa konflik di daerah tersebut akan dapat diselesaikan secara tuntas. Bahkan Panglima TNI

sendiri mengakui bahwa mereka telah gagal menumpas tokoh-tokoh GAM karena medannya yang sangat sulit, padahal di sisi lain hampir 50 ribu pasukan TNI telah dikerahkan ke Aceh untuk menumpas gerakan tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa TNI tidak mampu melumpuhkan GAM dalam waktu yang singkat? Padahal jumlah mereka relatif jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pasukan TNI.

Menurut beberapa pengamat, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh TNI dalam menggelar operasi di Aceh; pertama, TNI tidak pernah mau belajar dari pengalaman masa lalu bahwa operasi yang dilakukan tanpa didukung rakyat niscaya tidak akan berhasil. Dalam menjalankan operasinya di Aceh, ternyata pasukan TNI bukannya berusaha mencari simpati hati rakyat Aceh, sebaliknya mereka mempertontonkan berbagai arogansinya yang sangat menyakiti hati rakyat Aceh, seperti pengusiran penduduk dari desanya, pemukulan, pembunuhan hingga pemerkosaan. Dengan kata lain, Aceh akan tetap bergolak jika penyelesaiannya dilakukan dengan cara kekerasan. Tanpa perubahan yang mendasar ke arah pendekatan diplomasi melalui meja perundingan, niscaya cepat atau lambat Aceh akan mengikuti jejak Timor Timur menuju gerbang kemerdekaan.

Kedua, dalam setiap operasi pemulihan keamanan, TNI selalu menggunakan pendekatan target untuk mengukur setiap kemajuan atau keberhasilan operasinya. Oleh karena itu, dalam operasi darurat militer sekalipun kalangan TNI selalu mengatakan bahwa secara teritorial mereka telah berhasil menguasai daerah-daerah yang selama ini dikuasai GAM. Selain itu, TNI juga selalu memberikan informasi bahwa banyak anggota GAM yang telah menyerah, ditangkap ataupun tewas. Namun pihak TNI tidak pernah menjelaskan sejauh mana operasi yang dijalankan mendapat dukungan dari rakyat Aceh. Tanpa ada dukungan dari masyarakat, sampai kapan pun GAM tidak akan bisa ditumpas sampai keakar-

akarnya, karena kebanyakan dari mereka berasal dari masyarakat juga.

Berbagai tindakan aparat TNI/POLRI di lapangan ternyata semakin menjauhkan rakyat Aceh dengan NKRI. Seharusnya dengan diberlakukannya status daerah darurat militer di Aceh membuat masyarakat semakin aman, namun yang terjadi sebaliknya rakyat selalu dicekam ketakutan apabila pasukan TNI masuk ke desa atau daerah tertentu. Pasukan TNI yang katanya telah diberi keterampilan khusus dalam berbagai pendekatan ternyata tidak mendapat simpati dari orang-orang Aceh. Penduduk atau orang-orang di desa banyak yang mengungsi apabila mereka mendengar pasukan TNI akan masuk ke kampungnya. Hal ini dikarenakan mereka selalu menjadi sasaran apabila TNI tidak menemukan GAM dalam operasinya.

Ketika pasukan TNI tidak menemukan GAM, kata-kata (*stigma*) yang sering dilontarkan adalah bahwa orang Aceh sekarang ini semuanya anggota GAM. Stigma-stigma seperti itu kiranya tidak perlu dikeluarkan oleh pasukan TNI, karena sebagian besar anggota GAM berasal dari masyarakat setempat yang orang tuanya dulu merupakan korban dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan TNI/POLRI. Oleh karena itu, sesungguhnya wajar saja apabila masyarakat memberikan perlindungan kepada para anggota GAM yang kebanyakan berasal dari keluarga mereka. Tindakan brutal yang diperagakan oleh TNI/POLRI selama operasi militer di Aceh hanya akan menambah jumlah orang yang bersimpati kepada GAM yang ujung-ujungnya akan sangat sulit untuk diatasi di belakang hari.

Selain tindakan operasi militer, pihak TNI juga menggalang kekuatan massa di seluruh wilayah Aceh mulai dari rakyat sipil hingga kalangan birokrat untuk ramai-ramai membuat pernyataan setia kepada negara Republik Indonesia, yang dikemas dalam bentuk kebulatan tekad. Sebenarnya berbagai bentuk rekayasa tersebut hanya terbatas ucapan saja, karena rakyat Aceh yang kritis bisa melihat pernyataan kebulatan tekad tersebut sengaja dibuat sebagai

proyek, sebab setiap kali pernyataan akan dilakukan, para pejabat dari kalangan birokrasi maupun militer datang menghadirinya. Bahkan seorang menteri senior di dalam kabinet Megawati khusus datang ke Aceh hanya untuk mendengarkan orang-orang Aceh menyatakan sumpah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pula adanya sweeping kartu penduduk (KTP) terhadap orang-orang Aceh yang tinggal di Ibukota Jakarta telah mengakibatkan semakin jauhnya orang Aceh dengan negara Republik Indonesia. Adanya pemeriksaan KTP tersebut secara tak langsung menunjukkan bahwa semua orang Aceh adalah GAM. Tindakan ini telah menyakiti orang Aceh yang semula anti GAM, sekarang berbalik menjadi pendukung GAM. Perbuatan tersebut sempat membuat berbagai kalangan masyarakat Aceh merasa resah, terutama dari kalangan masyarakat bawah, karena ada kekhawatiran bahwa mereka bisa saja dicurigai sebagai anggota GAM, dan kemudian ditangkap. Sampai saat ini tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah mengapa tindakan berlebihan, seperti sweeping KTP, sampai terjadi di ibukota Jakarta yang secara kultural masyarakatnya sangat heterogen. Tindakan sweeping yang sempat dilakukan pemerintah daerah DKI Jakarta tersebut telah menimbulkan rasa simpati masyarakat dari etnis lainnya terhadap orang-orang Aceh yang hidup di daerah mereka. Berbagai kalangan LSM bahkan membuka acara talk-show melalui radio Hak Azasi Manusia untuk menggalang sebuah solidaritas bagi orang-orang Aceh, tidak hanya untuk mereka yang diperantawan, tetapi juga bagi mereka yang kini masih hidup di Aceh, yang selalu dicekam ketakutan.

Sebenarnya setelah penandatanganan kesepakatan penghentian permusuhan (COHA) yang ditandatangani oleh pihak GAM dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 2002 yang lalu, kehidupan masyarakat mulai berjalan normal, dan bahkan sebagian anggota masyarakat sudah mulai berani membuka

usahanya sampai larut malam. Berbagai klausul yang ada dalam COHA juga sudah mulai ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak yang bertikai di lapangan. Salah satu kemajuan yang sangat berarti yang dicapai adalah bertemunya para pemimpin GAM dan TNI di lapangan, padahal sebelumnya pertemuan tidak pernah terjadi. Berbagai kesepakatan kemudian dibuat untuk mencegah terjadinya kekerasan di kedua belah pihak, dengan jalan membuat beberapa zona damai (daerah demiliterisasi). Zona damai merupakan zona bebas dari pergerakan pasukan bersenjata, baik GAM maupun TNI. Zona tersebut hanya diawasi oleh pihak kepolisian. Pada saat itu sudah ada enam zona yang disepakati melalui proses tatap muka dan berkoordinasi antara pihak GAM dan TNI.

Bertemunya kedua belah pihak yang selama ini saling berseteru dianggap oleh masyarakat Aceh sebagai sebuah kemajuan yang sangat besar untuk menuju perdamaian. Berbagai kalangan masyarakat berpendapat bahwa semakin banyak zona damai dibuat, maka semakin aman pulalah masyarakat di Aceh dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Diakui pula oleh beberapa orang tokoh Aceh bahwa pada saat dibentuknya beberapa zona damai memang sering terjadi berbagai kesalahpahaman antara GAM dan TNI. Namun kesalahpahaman tersebut hanyalah mencakup masalah-masalah yang tidak terlalu mendasar, seperti masalah undangan, penentuan tanggal dan jam pertemuan. Hanya saja dalam pembentukan zona damai tersebut terlihat kecurigaan TNI terhadap GAM yang sangat berlebihan bahwa kesempatan ini akan dipergunakan oleh GAM untuk memperkuat diri dan mengumpulkan senjata.

Kecurigaan yang berlebihan inilah yang telah mengakibatkan suasana di lapangan menjadi kacau dan tidak terkendali. Berbagai pernyataan TNI yang sering kali memojokkan GAM telah membuat keadaan Aceh semakin panas. Kedua belah pihak kemudian saling tuduh dan saling serang, sehingga menimbulkan korban jiwa. Untuk mengatasi keadaan, TNI lalu menambah pasukannya di Aceh

sementara beberapa petinggi TNI mengemukakan pernyataan yang sangat menyakitkan hati orang Aceh. Selanjutnya, berbagai wacana untuk menuntaskan Aceh dengan operasi militer dikembangkan oleh kalangan TNI dan pendukungnya. Mereka mengemukakan bahwa situasi di Aceh yang kritis hanya bisa diatasi dengan kekuatan militer. Melalui operasi militer, GAM akan bisa d lumpuhkan, dan keadaan pun akan kembali normal.

Berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh TNI tentang perlunya segera menerapkan operasi militer di Aceh mendapat tantangan yang sangat serius dari berbagai kalangan DPR, akademisi, ulama, LSM, baik yang ada di Aceh maupun di Jakarta. Tokoh-tokoh masyarakat dari Aceh datang ke Jakarta untuk menemui para petinggi negara dan memohon agar penyelesaian Aceh dilakukan dengan jalan dialog melalui meja perundingan dan bukan dengan operasi militer di bawah payung daerah darurat militer. Forum bersama anggota DPR asal Nanggroe Aceh Darussalam tidak henti-hentinya menghimbau kepada pemerintah agar lebih mengedepankan dialog melalui perundingan dalam penyelesaian masalah Aceh. Berbagai acara diskusi yang diselenggarakan kalangan LSM dan akademisi hampir setiap hari selalu diisi dengan himbauan agar belajar dari pengalaman sejarah bahwa kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan baru.

Berbagai pandangan yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat tersebut ternyata sama sekali tidak direspon oleh pemerintah. Bahkan ketika pertemuan Tokyo akan dilangsungkan, beberapa juru runding GAM tidak diizinkan berangkat; mereka bahkan ditangkap. Dalam pertemuan yang gagal tersebut terlihat bahwa pemerintah sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah Aceh melalui meja perundingan. Berbagai kalangan menduga adanya tekanan dari pihak TNI yang begitu kuat untuk segera menyelesaikan Aceh di bawah payung daerah darurat militer sehingga pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama

setelah pertemuan Tokyo yang gagal tersebut pemerintah pun mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2003 tentang diberlakukannya status daerah darurat militer di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Semenjak itu berbagai peralatan perang dan pasukan harus diterjunkan ke Aceh untuk menumpas GAM.

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa setelah 5 bulan darurat militer diterapkan di Aceh ternyata sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa masalah Aceh akan selesai. Berbagai himbuan kembali dilontarkan oleh berbagai kalangan agar pihak-pihak yang bertikai di Aceh kembali duduk di meja perundingan. Bahkan pemerintah Jepang telah menawarkan untuk menjadi fasilitator perundingan dan perundingan bisa dilakukan di Tokyo, Jepang kapan saja. Sekarang tinggal kesiapan mereka bagaimana pemerintah menanggapinya, apakah akan tetap mempertahankan penyelesaian Aceh dengan operasi militer sejauhmana yang dilakukan sekarang ini, atau pemerintah dan GAM akan kembali ke meja perundingan. Berbagai pengamat, baik dari dalam maupun luar negeri, menganjurkan agar konflik Aceh sebaiknya diselesaikan melalui dialog yang bermartabat, yaitu melalui meja perundingan. Mereka menekankan bahwa tidak ada satupun konflik di dunia ini yang bisa diselesaikan dengan kekuatan bersenjata.

Kelangsungan Perlawanan GAM: Catatan Penutup

Dalam kerangka teori perlawanan social, termasuk dalam hal ini kudeta dan konflik, apa yang terjadi di Aceh pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari proses perubahan sosial yang dialaminya. Perubahan sosial ini tidak hanya mencakup aspek historis, termasuk ingatan sosial historis, yang dapat menumbuhkan benih-benih kebencian, maupun perubahan komtemporer yang menimbulkan kekecewaan sosial dan politik. Dalam teori revolusi sosial juga dengan jelas disebutkan bahwa orang-orang yang memiliki kebencian inilah yang pada akhirnya akan menjadi sebuah basis perlawanan

sosial yang cukup penting. Teori lama mengenai gerakan massa dari Hoffer menyebutkan bahwa pada mulanya perlawanan adalah sebuah bagian dari gerakan massa, karena perlawanan sesungguhnya merupakan salah satu bentuk gerakan massa, tetapi apabila ada seseorang pemimpin yang mampu membangun kepercayaan para pengikutnya melalui berbagai bentuk *structural strain*, maka akan tercipta suatu bentuk *deprivation-frustration-aggression* yang oleh Ted Gurr dikatakan sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya suatu gerakan perlawanan.

Perlawanan bisa bertingkat-tingkat tergantung dari sifatnya. Namun, apabila kurang mendapatkan perhatian yang serius, bentuknya bisa berubah. Apabila kelompok tersebut telah membesar, dengan terbentuknya kelompok militan yang menjadi basis kelompok perlawanan, maka kelompok militan tersebut telah mempercayainya sebagai ideologi yang harus diperjuangkan, meskipun taruhannya adalah nyawa (mati).

Ini juga fakta dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai aktor kunci dalam konflik di Aceh sekarang. Dengan pola ideologisasi seperti itu, maka GAM akan sulit dipupus tingkat perlawanannya, karena jika waktu dan konteks sosial-politiknya memungkinkan, maka GAM akan muncul kembali dengan bentuk dan pola yang sama. Karena itu, kehati-hatian dalam mendekati mereka menjadi sangat penting sebagai cara untuk menyelesaikan dan mengakhiri konflik yang berlarut-larut ini.

Oleh karenanya, penting bagi kita, dan para penguasa, untuk memahami mengapa mereka mengangkat senjata dan memberontak. Tanpa memahami latar belakang seperti itu, maka kita seakan-akan melupakan masa lalu, melupakan kesedihan, dan melupakan faktor yang memicu terjadinya perlawanan rakyat Aceh, sehingga para pengambil keputusan cenderung berfikir untuk saat ini saja bahwa konflik yang terjadi harus ditumpas. Cara berfikir militeristik yang demikian tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sebagai

apapun format operasi militer yang dilakukan di Aceh, tidak akan berhasil bila laras senjata selalu didepankan sebagai cara satu-satunya untuk menghentikan perlawanan. Sejarah telah membuktikan bahwa betapapun rakyat Aceh selalu berada dalam situasi perang dan konflik yang berkepanjangan, mereka masih tampak tegar dan bahkan mekanisme survivalnya membedakan wilayah mereka dengan wilayah Indonesia lainnya. Bila kita mempelajari sejarah pemberontakan di daerah-daerah lain, seperti kasus Kahar Muzakar (PRRI-Permesta) di Sulawesi, kasus DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, PRIL-Permesta di Sumatera Barat, maka akan jelas sebab-sebab mengapa kasus-kasus tersebut tidak muncul lagi. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan yang dimiliki Aceh, baik pengaruh ekologi, kultur maupun perubahan struktural yang memicu perlawanan mereka.

Ekologi dan kultur rakyat Aceh yang diperkuat oleh unsur-unsur keagamaan merupakan penyangga utama dari aspek-aspek perlawanan sosialnya. Akan tetapi hal itu baru terjadi apabila dipicu oleh perubahan struktural yang mengancam harga diri, peradaban, kultur dan ekologi sosial tersebut. Bila mereka menyadari bahwa diri mereka "terjajah," maka mereka akan segera mengambil sikap perlawanan. Itulah sejarah masyarakat Aceh yang berlanjut hingga sekarang.

Apa makna yang patut kita tangkap dan renungkan dari kejadian tersebut yaitu, bahwa jangan kita sakiti Aceh, tetapi rebutlah hatinya. Mereka selalu mengatakan hal itu, dan itu merupakan bagian dari budayanya, bahwa bila engkau menyakitinya, maka mereka akan melawan. Sebaliknya, jika engkau berhasil merebut hatinya, maka apapun akan diberikan. Itulah kultur dasar Aceh yang seharusnya dipergunakan sebagai cara untuk mendekati masyarakat Aceh. Tak mengherankan, apabila kemudian Operasi Militer -- dalam bentuk apapun, gagal menyelesaikan masalah Aceh. Apakah kita juga lupa, bahwa GAM sekarang adalah GAM generasi ketiga, dan

bahwa persoalan GAM bukan hanya baru terjadi sekarang, tetapi telah terjadi sejak 1976, sebuah periode waktu yang cukup lama? Berarti ada sesuatu yang salah. Menurut mereka Pemerintah Pusatlah yang harus menemukan, apa yang keliru itu, dan bagaimana memperbaiki dan mewujudkannya.

Bila Pemerintah Pusat gagal menemukan inti dari ikon perlawanan Aceh sekarang, maka tingkat kegagalan untuk penyelesaian dan mengakhiri konflik Aceh akan sangat besar. Itu artinya, konflik Aceh akan terus berlanjut, bila ada momentum atau waktu yang memeliharanya. Apa momentum itu? *Pertama*, lemahnya Pemerintahan Pusat akibat persaingan kekuasaan di antara mereka sehingga mereka melupakan langkah-langkah yang konsisten untuk menghentikan konflik; *kedua*, apabila pemerintah daerah tidak mampu bersikap sebagaimana seharusnya, tetapi malah didominasi oleh keserakahan untuk berkuasa; *ketiga*, apabila TNI-Polri berperilaku jahat dan kasar terhadap masyarakat Aceh; *keempat*, apabila ada kesenjangan sosial, pengangguran, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, dan pembagian kekayaan yang tidak menyentuh rakyat kecil, maka benih-benih perlawanan akan tumbuh dengan subur.



BAB 4

UPAYA PENYELESAIAN ACEH SECARA DAMAI: PELUANG DAN KENDALA

Dari gambaran konflik di Aceh sebagaimana telah diuraikan di atas, baik faktor-faktor yang melatarbelakanginya, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, pertumbuhan, ideologi maupun kepentingan-kepentingan di baliknya, maka pertanyaan dasar kita selanjutnya adalah: mungkinkah konflik di Aceh dapat diselesaikan? Bagaimana peluang keberhasilannya, seberapa besar dan seberapa mungkin itu dilakukan? Lalu bagaimana pula peluang kegagalannya? Serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan penyelesaian Aceh? Semua itu merupakan pokok-pokok pembahasan dalam sub bab ini.

Upaya Penyelesaian Konflik

Kecenderungan utama dari strategi penyelesaian konflik Aceh dari pihak NKRI adalah mendahulukan aksi dan tekanan represif terhadap anggota dan pemimpin GAM, termasuk yang dicurigai sebagai simpatisan, serta mereka yang membantu GAM. Strategi tersebut dianggap sesuatu yang sah dan wajar, karena GAM sudah diposisikan sebagai gerakan pengacau keamanan (GPK), disintegrator, gerakan yang mengancam keutuhan NKRI. Upaya itu diimplementasikan di lapangan dalam bentuk penyerangan terhadap anggota GAM, penangkapan para pemimpinnya, perusakan harta milik mereka, pemutusan jaringan informasi, dan lain sebagainya. Semua dilakukan dengan alasan menjaga integrasi bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, sejak munculnya GAM (1976) telah banyak dilakukan operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI/POLRI yang dikemas untuk tujuan memulihkan keamanan di Aceh. Operasi-operasi itu antara lain: Operasi Jaring Merah (OJM) (1989-1998) yang lebih dikenal dengan istilah DOM (Daerah Operasi Militer), Operasi (Satgas) Wibawa 99, Operasi Cinta Meunasah, Operasi Rajawali, Operasi PPRM (Pasukan Pengendali Rusuh Massa), dan lain-lain. Serentetan operasi yang digelar tersebut ternyata tidak membuahkan kedamaian dan ketenteraman bagi masyarakat Aceh. OJM atau DOM adalah aktualisasi drama kekerasan, sehingga mendapat kecaman dari berbagai pihak. DOM menghasilkan tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Aceh sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai Desember 1998 jumlah korban masyarakat sipil sekitar 5.000 jiwa dengan rincian sebagai berikut: pembunuhan 1321 orang, penyiksaan 3430 orang, pemerkosaan 128 orang, pelecehan seksual 28 orang. DOM juga mengakibatkan janda kehilangan suami sebanyak 1376, anak menjadi yatim 4521 orang (*Berita Kontras*, No.15/Th. Ke-3/VII/2002). DOM yang diberlakukan selama 10 tahun itu juga diselimuti oleh pelanggaran HAM, pelanggaran kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran kekerasan terhadap tahanan yang disangka GAM. Ada 11 bentuk kekerasan pelanggaran terhadap perempuan serta 12 bentuk kekerasan pelanggaran terhadap tahanan yang disangka GAM.¹³⁹

¹³⁹ Kekerasan pelanggaran HAM yaitu (1) tak boleh tutup aurat saat shalat, (2) digorok dan rumah korban dibakar, (3) rumah dibakar tidak diganti rugi, (4) korban diikat, ditarik ramai-ramai lalu ditembak, (5) diganduli batu lalu dibenamkan ke sungai, (6) ajimat dicabut dan disiksa, (7) ditembak, kemudian kuburnya dibongkar, (8) digebuk, dicampak ke mobil lalu dikubur massal, (9) ditembak didepan umum, (10) dicituk di masjid, dibantai di tengah lapangan, (11) dijadikan tameng saat bertempur melawan GPK, (12) tangan dibedah, ditetesi air asam, (13) disiksa hingga mata kiri tidak berfungsi, (14) diculik serempak lalu dibunuh massal, (15) santri diculik lalu dibantai, (16) kepala dikuliti di depan anak, (17) ditembak dalam sumur, (18) ditaruh pemberat besi, (19) disiksa sembilan malam tanpa makan, (20) suami dibuang isteri disetrum, (21) semua gigi dirontokkan, (22) cacat karena dipukul

Dalam catatan Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad (2003) terdapat 25 macam kekerasan pelanggaran HAM yang disebutnya sebagai yang tersadis.¹⁴⁰

Silih bergantinya kegiatan operasi militer itu bukannya menyelesaikan masalah Aceh, melainkan justru semakin membuahkannya setumpuk kerusakan dan tragedi yang menyebabkan semakin banyak korban. Sejumlah kerusakan dan tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi dalam masa konflik Aceh antara lain (1) kerusakan di Lhokseumawe, 31 Agustus 1998, berlatarbelakangkan tindakan penghalauan masyarakat umum oleh aparat militer yang sedang melindungi proses penarikan pasukan; (2) tragedi berdarah di

dengan balok, (23) tulang rusuk dipatahkan, (24) digantung, kepala di bawah, (25) diperkosa, hamil ditinggal (*Berita Kontras*, No.15/Th. Ke-3/VII/2002).

¹⁴⁰ Kekerasan pelanggaran terhadap perempuan, bentuknya (1) wanita Aceh diperkosa tiga tentara, (2) pelecehan seksual terhadap kaum wanita, (3) diperkosa, hamil, lalu ditinggal begitu saja, (4) gadis korban perkosaan melahirkan anak perempuan, (5) diperkosa sambil berdiri, (6) diperkosa, disetrum, dan dicambuk dengan kabel, (7) ditelanjangi massal, (8) gadis cacat diperkosa oleh tentara yang sedang mabuk, (9) suami diculik, isteri dilecehkan, (10) diambil paksa dan diperkosa, (11) diarak telanjang lalu didor, (12) digagahi didepan anaknya. Kekerasan terhadap tahanan, bentuknya (1) disepak dan diterjang di bagian yang lemah dengan tujuan mencederakan, (2) pelir tahanan dijepit hancur dengan menggunakan tang, (3) kaki kursi diletakkan di atas anak jari kaki tahanan itu, kemudian para tentara duduk diatasnya untuk menambahkan tekanan atas anak kaki mereka sampai remuk redam hancur berdarah, (4) telapak tangan dan kaki tahanan dipaku seperti orang yang disalib, hanya tiang salibnya saja yang tidak digunakan, (5) tahanan-tahanan direbus dengan air panas, (6) tahanan direndamkan berhari-hari atau berminggu-minggu dalam kolam air panas, (7) tahanan digantung dengan kepala di bawah dan kaki di atas, (8) tubuh tahanan ditonjok dengan puntung rokok dan besi panas, (9) tahanan dipukuli dengan batang besi atau tangkai-tangkai yang keras tapi berlapiskan papan tipis (triplek) diantara senjata tajam dengan tubuhnya supaya jika dipukuli tanpa bekas tetapi rusak di dalam badan tersebut semakin parah, sehingga mereka muntah darah, (10) kawat besi yang tajam dimasukkan ke dalam saluran kencing/kemaluan kemudian diputar-putar kawat itu sehingga mengakibatkan sakit yang tak terhitung, (11) tahanan-tahanan diikat di sebuah balok es 1,5 meter, yang berjam-jam lamanya baru mencair. Begitu mencair es batu tersebut, tahanan tersebut sudah tidak sadarkan diri, (12) ada di antaranya yang dicungkil matanya.

simpang KKA (Kertas Kraft Aceh) 3 Mei 1999 yang melibatkan warga masyarakat dan tentara. Penyebab awalnya ialah pemukulan warga setempat yang sedang melakukan kenduri oleh tentara, (3) insiden penembakan di Mapolres Aceh Selatan tanggal 11 September 1999; terjadi ketika sekelompok rakyat Aceh Selatan berdemonstrasi menuntut pelepasan seorang warga sipil yang ditangkap dan ditahan aparat Polres Aceh Selatan sehari sebelumnya; (4) Tragedi Beutong (pembunuhan Teungku Bantaqiah) 23 Juli 1999 yang terjadi akibat laporan intelijen yang menyatakan bahwa Dayah Babul Mukaramah, Beutong Ateuh, Aceh Barat, pimpinan Teungku Bantaqiah telah menyimpan 100 pucuk senjata. Dalam operasi penggeledahan, laporan itu ternyata tidak terbukti; (5) operasi militer TNI di Takengon Mei-Juni 2001 sebagai tindak lanjut Inpres No.04 Tahun 2001, yang dalam pelaksanaannya justru meningkatkan aksi kekerasan, menimbulkan disintegrasi sosial antara masyarakat dari suku Aceh dan suku pendatang, dan lain sebagainya.

Beberapa kasus tragedi dan kerusuhan yang dikemukakan di atas memberikan contoh yang sangat jelas betapa strategi penyelesaian konflik secara militer dari pihak pemerintah RI, sesudah masa DOM sekalipun, tidak juga menghasilkan kedamaian dan ketenteraman bagi masyarakat Aceh. Bahkan sebaliknya justru menempatkan mereka dalam kehidupan dan budaya penuh kekerasan, ketegangan, kekhawatiran dan ketakutan.

Penggelaran Operasi Terpadu dalam kondisi Aceh yang berstatus Darurat Militer sejak 19 Mei 2003 yang masih berlangsung sampai hari ini (Oktober 2003), berarti sudah memakan waktu sekitar 5 bulan, dikhawatirkan akan menghasilkan suasana di Aceh yang relatif sama dengan waktu operasi-operasi sebelumnya. Dengan perkataan lain, akibat atau konsekuensi aspek militernya akan lebih menonjol dan lebih dirasakan oleh masyarakat Aceh dibandingkan aspek-aspek lainnya seperti: kemanusiaan, penegakan hukum dan pemulihan kinerja pemerintahan.

Sebenarnya dalam masa reformasi, pemerintah Indonesia di bawah tiga presiden, yakni Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputeri, juga telah mengupayakan berbagai langkah penyelesaian konflik Aceh di luar pengerahan kekuatan militer. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, misalnya, terdapat program 10 langkah yang terkait dengan penyelesaian Aceh dan pembentukan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Menurut Prof. DR. Ismail Suny (lihat, Al Chaidar, 1999), apabila dicermati secara teliti sesungguhnya dari sekian banyak janji Habibie yang pernah dilontarkan di hadapan masyarakat (jamaah) Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh pada tanggal 26 Maret 1999, seluruhnya sudah dipenuhi kecuali satu hal, yakni mengenai penyelesaian seluruh pelanggaran HAM sejak masa pemerintahannya ke pengadilan.

Pada masa pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid dilakukan Peradilan Koneksitas Pelaku Pelanggaran HAM Masa DOM di Aceh, dan munculnya gagasan NAD (Nanggroe Aceh Darussalam), seperti dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 04 Tahun 2001. Penyelenggaraan Peradilan Koneksitas terhadap kasus penembakan Teungku Bantaqiah yang digelar mulai 19 April 2000 memang pada akhirnya dapat memvonis para pelaku lapangan yang membantai Teungku Bantaqiah dengan para santrinya. Hanya saja peradilan koneksitas tersebut gagal membongkar motif peristiwa, pola-pola kekerasan yang digunakan, penanggungjawab tertinggi yang sebenarnya dari peristiwa pembantaian di Dayah Babul Mukaramah, Beutong Ateuh, di wilayah Aceh Barat itu. Menyangkut Inpres No. 04 Tahun 2001, yang ditandatangani tanggal 11 April 2001, tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh yang menyertakan operasi militer sebagai salah satu aspek yang tidak terpisahkan darinya, ternyata berakibat sebaliknya dari tujuan yang diharapkan. Percepatan perbaikan kondisi kemanusiaan di Aceh tidak terjadi. Sebaliknya, timbul perpecahan di antara masyarakat sipil Aceh, antara yang setuju dan tidak setuju

dengan pelaksanaan Inpres No. 04 tersebut, serta sentimen pro dan anti GAM.

Kemudian, dalam masa Presiden Megawati Soekarnoputeri yang masih berlangsung sampai hari ini, diberlakukannya UU NAD sebagai jalan penyelesaian konflik Aceh. Upaya-upaya lainnya antara lain: Jeda Kemanusiaan, Moratorium, Inpres No.7 Tahun 2001, Inpres No.1, Tahun 2002, CoHA (*Cessation of Hostilities Agreement*) dan yang sedang berjalan, yaitu Operasi Terpadu dalam status Darurat Militer. Dari sekian banyak upaya dan kebijakan tersebut, penggelaran Operasi Terpadu saat ini yang paling banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak, baik sebelum maupun setelah dilaksanakan. Sorotan tajam terhadap Kebijakan Operasi Terpadu disampaikan, antara lain, oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Syafii Maarif, yang menyatakan bahwa “jika operasi militer benar-benar ditempuh, maka berarti sama saja dengan bunuh diri. Apapun alasannya, persoalan Aceh masih bisa dilakukan dengan dialog, dan GAM juga masih bisa diajak dialog. Oleh karena itu, kepada Presiden Megawati diusulkan agar menunjuk seseorang dari kalangan sipil yang diberi mandat penuh untuk menyelesaikan masalah Aceh, yaitu Menko Kesra Yusuf Kalla. Sebaliknya, kepada GAM diharapkan sadar diri bahwa tuntutan kemerdekaan itu tidak akan mungkin dapat dicapai. Sebab dari sudut apapun, Aceh adalah daerah modal.”¹⁴¹ Sebagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya, upaya-upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputeri ini pun diprediksi tidak akan secara otomatis dapat meredakan kekerasan dan ketegangan yang dihadapi dan dialami masyarakat Aceh.

Kondisi seperti itu berlanjut, sebab: (1) strategi penyelesaian yang digelar pihak pemerintah belum sesuai dengan tuntutan rakyat Aceh; (2) strategi penyelesaian Aceh secara politik dari DPR-RI belum atau memang tidak muncul. Sehubungan dengan ketidakmunculan

¹⁴¹ *Sinar Harapan*, 14 April 2003.

itu, maka (3) masalah Aceh seakan dibiarkan menjadi urusan aparat keamanan semata atau sekedar menjadi urusan aparat di daerah.

Namun, apabila dilihat dalam kerangka yang lebih luas, terutama dalam hubungannya dengan aspek pembangunan, maka upaya-upaya yang sudah dilaksanakan pihak pemerintah NKRI antara lain:¹⁴²

- (1) Pembentukan Kodam I Iskandar Muda tahun 2002;
- (2) Operasi intelijen, teritorial dan militer;
- (3) *Cease Fire*, Jeda Kemanusiaan dan Perundingan;
- (4) Pemberian status Daerah Istimewa (misi Hardi 1959) dan Otonomi Khusus NAD (UU No.18 Tahun 2001);
- (5) Rehabilitasi dan penampungan eks gerilyawan DI/TII;
- (6) Pembinaan anggota GAM yang menyerah sebelum Darurat Militer di sebuah Pesantren Seulemeun Aceh Besar dan pembinaan tahanan Masa Darurat Militer di BPG Banda Aceh;
- (7) Pemberian bantuan kompensasi sebesar Rp.3 juta kepada setiap keluarga korban DOM;
- (8) Pembangunan rumah korban DOM;
- (9) Pemberian bantuan kepada pengungsi;
- (10) Pemberian Amnesti 1999, seperti yang sudah dilakukan pada tahun 1959;
- (11) Penetapan Pelabuhan Bebas Sabang 1970-1985 dan tahun 2000;

¹⁴² Disampaikan oleh salah seorang nara sumber Prof. Dr. Isa Sulaiman, sejarawan pada tanggal 30 Juli 2003.

- (12) Pemberian bagi hasil Migas 70% berlaku selama 8 tahun;
- (13) Pemberian status negeri kepada sekolah-sekolah agama, penambahan sekolah agama, termasuk IAIN Ar Raniri;
- (14) Pengesahan Mahkamah Syariah;
- (15) Pembentukan dinas syariat Islam;
- (16) Perubahan nomenklatur MUI Aceh menjadi MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dan disertai peningkatan anggaran belanja organisasi tersebut;
- (17) Penetapan Pelabuhan Udara Blang Bintang sebagai salah satu Pelabuhan Embarkasi Haji;
- (18) Peningkatan kerjasama regional.

Bagi pihak GAM, strategi penyelesaian konflik atau masalah Aceh memang tidak bisa dipisahkan dari tujuan mereka agar Aceh merdeka, lepas dari NKRI. Dalam pemikiran mereka, kemerdekaan Aceh adalah cara penyelesaian konflik yang terbaik. Apabila hal itu betul-betul sudah menjadi kenyataan, maka langkah-langkah untuk membangun integrasi dalam kesetaraan dengan Indonesia, bahkan juga dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain, baru bisa dilakukan. Bagaimana mekanisme agar tujuan itu tercapai justru yang menjadi problem, apakah melalui dialog dan diplomasi damai (secara langsung atau melalui perantara pihak ketiga), atau dengan cara melakukan aksi pembebasan dengan mengangkat senjata?

Hal ini dikemukakan oleh beberapa pemimpin dan tokoh GAM seperti: Hasan Tiro, yang dalam deklarasi kemerdekaan Aceh-Sumatera (*Declaration of Independence of Acheh-Sumatra*) (4 Desember 1976) menyatakan bahwa, "Kami, rakyat Aceh, Sumatra menggunakan hak kami bagi penentuan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah pemerintahan terhadap tanah air kami, dengan ini mempermaklumkan bahwa diri kami bebas dan merdeka

dari segala kontrol politik regim asing Jakarta dan rakyat asing di pulau Jawa.". Pada bagian lain dinyatakan pula bahwa "Kita, rakyat Aceh, Sumatra tidak akan berselisih dengan orang-orang Jawa jika mereka tinggal di negeri mereka sendiri, dan jika tidak mencoba menjadi penguasa atas kita".¹⁴³ Dari kutipan-kutipan ini dapat diketahui bahwa bagi Hasan Tiro, penyelesaian masalah atau konflik dengan Indonesia hanyalah dengan kemerdekaan Aceh. Tanpa kemerdekaan Aceh dan selama Indonesia menginginkan menjadi "penguasa" atas bangsa Aceh, maka penyelesaian konflik tiada yang efektif.

Dr. Husaini Hasan dalam Konperensi Internasional atas Aceh, Sabtu, 3 April 1999, di Washington menguraikan secara lebih rinci tentang kemungkinan adanya penyelesaian konflik Aceh. Dalam makalahnya yang berjudul "*The Future Integration of Indonesia: Focus on Aceh,*" dia mulai dengan membahas tiga persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat atau rakyat Aceh. Ketiga persoalan yang dimaksud, adalah (1) otonomi, (2) federasi, dan (3) kemerdekaan.

Apa yang dimaksud dengan "otonomi" oleh Indonesia, menurut dia tiada lain hanyalah suatu taktik lama dengan tujuan membelokkan perhatian rakyat Aceh dari permintaan atau tuntutan kemerdekaan penuh, suatu strategi untuk menenangkan warga suku-suku yang marah dan cara menunda penyelesaian masalah yang sesungguhnya, yaitu agresi dan kolonisasi Indonesia. Dalam pandangannya, Aceh sudah mempunyai pengalaman dengan otonomi seperti itu segera setelah Gerakan DI/TII 1961. Aceh diberikan otonomi budaya, agama dan pendidikan, namun semua itu hanya di atas kertas. Kenyataannya adalah bahwa Aceh tidak pernah diberi kesempatan yang sesungguhnya untuk melakukan apa yang menjadi perhatian dan keinginannya, demi kebaikan bangsa Aceh.

¹⁴³ Bersumber pada buku *The Price of Freedom: The Unfinished Diary*, oleh Hasan di Tiro yang ringkasannya disebarluaskan oleh Aceh Links <http://acehnet.tripod.com/price.htm>.

Tentang federasi, Husaini Hasan mengemukakan bahwa jika Aceh menerima sebagai bagian dari suatu Negara Federal Indonesia, maka hal itu berarti bahwa Aceh telah kehilangan identitasnya sebagai suatu bangsa. Padahal menurut dia, konsep identitas sangat penting bagi orang-orang Aceh sebagaimana halnya bagi setiap orang di dunia. Disinggungnya pula bahwa sebagian orang Aceh telah mengalami krisis identitas. Mereka hanya bangga sebagai bangsa Aceh ketika mereka mengingat bagaimana kepahlawanan yang heroik nenek-kakek moyangnya, namun sebaliknya di antara mereka ada yang menjadi malu berbicara dan menulis dengan menggunakan bahasa Aceh. Konsep “federasi” juga berarti menerima pemerintahan Jakarta. Oleh karena itu, Husaini Hasan mempertanyakan bagaimana Aceh harus menerima Jakarta [Indonesia], setelah Jakarta memperlakukan Aceh semena-mena selama 54 tahun. Dalam pandangannya, bagaimana mungkin merasakan “merdeka” jika dalam pengalaman hidup telah dihadapkan dengan tragedi demi tragedi yang dilakukan oleh perajurit Indonesia melawan masyarakat sipil Aceh.

Dengan demikian, menurut Dr. Husaini Hasan, kemerdekaan adalah satu-satunya alternatif yang tepat dan cocok bagi bangsa Aceh. Kemerdekaan membebaskan diri dari Indonesia, merupakan suatu harga mati (*fixed price*), karena memang bangsa Aceh bukan bangsa Indonesia. Akhirnya, dikatakan pula bahwa di masa-masa yang akan datang, sesuatu yang dapat dipikirkan adalah bahwa Aceh dan Indonesia bisa melakukan suatu “integrasi” atas dasar kesepadanan tingkat sebagai dua negara yang berdaulat, kesetaraan status sebagai negara-negara merdeka, dalam suatu bentuk kerjasama antar negara serta di kalangan bangsa-bangsa. Dalam hubungan kerjasama itu, tentu saja Indonesia akan menempati prioritas utama bagi Aceh sebagaimana halnya bangsa-bangsa ASEAN lainnya di wilayah Asia Tenggara, karena dalam pandangan Husaini Hasan, bagaimanapun kita hidup di dunia yang kecil, di

mana kita harus saling berbagi antara satu dengan yang lainnya sewajar mungkin dan seberadab mungkin.

Kiranya bertambah jelaslah bagaimana konsep dan upaya penyelesaian konflik yang berasal dari pihak GAM, dan tampaknya mereka secara konsisten menetapkan kemerdekaan Aceh sebagai prasyarat bagi semua langkah-langkah penyelesaian konflik selanjutnya. Keteguhan hati mereka untuk mencapai kemerdekaan, dan memisahkan diri dari Republik Indonesia, disandarkan kepada fakta-fakta historis yang dirunut mulai masa berdirinya kerajaan berdaulat di Aceh sampai pada masa penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia tahun 1949. Sehubungan dengan komitmen dan pendirian mereka itu, soal penyerahan kedaulatan RI dari Belanda ke Indonesia menjadi isu utama, di mana penyerahan tersebut dianggap tidak sah, karena memasukkan wilayah Aceh sebagai bagian yang diserahkan, padahal Aceh tidak pernah diduduki oleh Belanda.¹⁴⁴

Menarik untuk disimak alasan-alasan yang dikedepankan sebagai dasar-dasar penolakan mereka. Alasan kesejarahan adalah Aceh bukanlah bagian dari Indonesia, karena sejak ratusan tahun

¹⁴⁴ Penyerahan Aceh dari Belanda ke Indonesia dianggap oleh GAM illegal berdasarkan (a) Resolusi PBB 1514 (XV) yang menyatakan bahwa “kedaulatan di sebuah koloni tidak terletak pada tangan-tangan penguasa kolonial, tetapi pada rakyat yang dijadikan koloni”; (b) Resolusi PBB 1514 (XV) “kedaulatan atas sebuah wilayah jajahan tidak dapat dipindahalihkan oleh satu penguasa kolonial ke yang lain”, (c) Resolusi PBB 1514 (XV) “seluruh kekuasaan harus dikembalikan oleh penjajah ke penduduk asli dari setiap koloni”, (d) Resolusi PBB 2625 (XXV) “tugas semua negara ialah mengakhiri penjajahan dan menghentikan suatu negara menggunakan kekuatan melawan rakyat (sukubangsa) yang berjuang untuk kemerdekaannya”, (e) Resolusi PBB 2621 (XXV) “penjajahan dianggap suatu ‘kriminal internasional’ dan adalah suatu hak mutlak bagi semua rakyat (suku bangsa) jajahan berperang melawan para penjajah”, (f) Resolusi PBB 3314 (XXIX) “penggunaan kekuatan dilarang untuk melawan mereka yang mencari penentuan nasib sendiri”, (g) Resolusi PBB 2625 (XXV) “setiap wilayah jajahan memiliki suatu status hukum yang terpisah dan masing-masing mempunyai hak untuk merdeka”.

sebelum penguasa-penguasa Eropa masuk ke wilayah Asia Tenggara dan beberapa masa sesudahnya, Aceh telah dikenal secara internasional sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Kamus *Larouse Grand Dictionnaire Universelle*, Volume 1, halaman 70, Paris 1886, menggambarkan bahwa Kerajaan Aceh adalah negara dan bangsa yang sangat berkuasa di India Timur (Nusantara) menjelang akhir abad ke 16 dan sampai masa pertengahan pertama dari abad ke 17. Informasi yang senada juga terdapat dalam *La Grand Encyclopedie*, Volume IV, halam 403, Paris 1874, yang menyatakan bahwa:¹⁴⁵

“In 1582, the Achehese had already extended their propederance over the island of Sunda (Sumatra, Java, Borneo, etc.) over part of the Malay Peninsula, and having relations with all the nations trafficking the Indian Ocean from Japan to Arabia.

The history of the long struggle with the Achehese sustained againts the Portuguese who were established in Malaka since the beginning of the sixteenth century was no less glorious page in the history of Achehese people. In 1586, one of their Sultans attacked the Portuguese in Malacca with an armada of 500 warships and 60,000 marines”.

Kemudian, 300 tahun setelah Belanda mengukuhkan diri sebagai penguasa kolonial di pulau Jawa dan berkuasa atas seluruh wilayah India Timur (sekarang Indonesia), kedudukan Aceh masih diakui secara internasional sebagai negara merdeka yang mempunyai hubungan-hubungan diplomatik ke seluruh dunia. Bertolak dari alasan kesejarahan tersebut, ditambah dengan pengalaman yang penuh gejolak bersama Indonesia, menyebabkan GAM yang

¹⁴⁵ Dari dokumen yang disusun oleh *The Executive Council of the Free Aceh Movement* – MP GAM, August 1999, berjudul *Why Aceh Wants Independence From Colonialism of The Republic of Indonesia?*, sumber: Acheh Links, <http://acehnet.tripod.com/why.htm>.

mengklaim diri mewakili rakyat Aceh, mensyaratkan bahwa penyelesaian konflik Aceh tiada lain hanyalah melalui kemerdekaan.

Bagi rakyat Aceh, meskipun mayoritas tidak terlibat dalam konflik yang terjadi, konflik menyebabkan nyawa dan keselamatan mereka terancam, sehingga mereka merasa tidak aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, mereka hidup di bawah tekanan, selalu merasa was-was, ketakutan dan penuh dengan penderitaan. Selama konflik berlangsung, rakyat Aceh tidak dapat menikmati kebebasan untuk bekerja (ke sawah, kebun, maupun kantor), berkarya dan beramal. Hari-hari mereka selalu diselubungi oleh ketakutan, ketidakterampilan, penderitaan dan tidak jarang mereka harus meninggalkan kampung halaman berpindah ke tempat lain yang lebih aman, berstatus sebagai pengungsi. Menggambarkan keadaan Aceh dan rakyatnya yang selalu dirundung konflik, Franz-Magnis Suseno (2001) menyatakan:

“Sudah selama 130 tahun lebih rakyat Aceh lebih banyak mengalami perang dan penindasan daripada keadaan yang damai dan sejahtera. Aceh sebagian besar tidak menikmati ketenteraman dan kemakmuran yang oleh alamnya yang kaya raya sebenarnya ditawarkan dengan begitu melimpah. ...Pada tahun 1990 Aceh dinyatakan *Daerah Operasi Militer (DOM)* di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia rakyat Aceh yang mengerikan. Sesudah DOM dicabut sembilan tahun kemudian, kekerasan dan segala macam kekejaman masih terus berlangsung. Sampai hari ini sebagian rakyat Aceh – makin lama makin banyak – diliputi ketakutan”.

Bagi rakyat Aceh, terpenting ialah agar keadaan dan kondisi yang mengerikan tersebut segera berakhir, bagaimana pun caranya. Apakah dengan otonomi seluas-luasnya, yaitu Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), atau melalui referendum seperti yang dilakukan SIRA (2001), atau merdeka sekalipun. Demikian pula, tentang siapa yang melakukannya apakah pemerintah RI, kelompok

mahasiswa dan LSM, atau GAM sekalipun, tidak menjadi masalah. Bagi mereka, penyelesaian konflik Aceh janganlah melalui perang atau melalui pertarungan kekuatan senjata, sebab risikonya bagi rakyat kebanyakan terlalu besar. Sehubungan dengan penolakan terhadap penggunaan senjata dalam rangka menyelesaikan masalah Aceh, beberapa warga dan tokoh masyarakatnya menyatakan sebagai berikut (*Media Indonesia*, 18 Mei 2003):

“...Penumpasan terhadap GAM merupakan langkah sia-sia. Pemerintah Indonesia harus berdialog. Artinya, penumpasan apapun yang dilakukan di Aceh itu tidak bisa menyelesaikan [masalah atau konflik] Aceh, kecuali dialog secara terbuka, independen dan bijak. Itu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan [masalah atau konflik] Aceh” (Teuku Abdurahman Yacob, Aktivis Koalisi HAM)...”

“Penyelesaian masalah Aceh melalui perang adalah cara paling primitif dalam resolusi konflik. Melaksanakan operasi militer justru akan membuat luka di hati masyarakat Aceh semakin mendalam” (M. Nasir Djamil, anggota DPRD NAD)...”

“...Operasi militer justru akan melahirkan persoalan baru, yakni berkecambahnya bibit dendam dan hancurnya basis perekonomian rakyat” (Thamrin Ananda, aktivis mahasiswa dari Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh, FPDRA)...”

Dengan kata lain, rakyat Aceh hanya menginginkan penyelesaian masalah atau konflik Aceh dengan jalan dialog dan perundingan. Penyelesaian konflik melalui dialog sebenarnya merupakan cara yang terbaik karena berasal dari basis kultural masyarakatnya. Menurut Prof. Dr. Umar Kayam (*Tempo*, 8 Agustus 1999) “pendekatan kultural (budaya) untuk masalah Aceh merupakan suatu pendekatan jangka panjang yang menuntut proses dialogis, penuh bahasa kompromi dan *to take and give*. Pendekatan ini harus dimulai dengan menerima sintesis budaya Aceh sebagai modal utama”. Akan tetapi, pendekatan ini memerlukan kesabaran dari

masing-masing pihak yang berkonflik, mendahulukan kesepahaman yang berkualitas antar pihak-pihak tersebut, mempertemukan kesamaan kepentingan untuk mengupayakan lebih dulu kesejahteraan masyarakat Aceh di atas kepentingan pihak-pihak yang berkonflik.

Namun, di samping suara mayoritas rakyat Aceh yang menginginkan penyelesaian masalah Aceh secara damai dan dengan jalan dialog, perlu pula dikedepankan di sini bahwa, menurut suatu hasil penelitian berkenaan dengan *status daerah Aceh* ternyata rakyat Aceh di beberapa daerah (kabupaten/kota) lebih menginginkan Aceh merdeka daripada sekedar menjadi daerah otonomi. Penelitian yang dilakukan oleh YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Sipil Indonesia) bekerjasama dengan Forum LSM Aceh dan AKATIGA pada tahun 2000 itu, setidaknya menunjukkan keinginan rakyat Aceh yang demikian. Hanya saja perlu dikemukakan di sini, sebagaimana disebutkan salah seorang peneliti senior-nya, bahwa “penelitian tersebut dilaksanakan bukan untuk menghasilkan sebuah metode resolusi [konflik], tetapi untuk terlebih dahulu mengatahui “suara-suara rakyat” yang sudah terbenam di dasar akibat dari manuver politik elit, dan dentuman peluru serta terpanggang oleh kobaran api dari berbagai rentetan aksi-aksi bumi hangus....”¹⁴⁶

Upaya-upaya penyelesaian masalah/konflik Aceh memperlihatkan dengan jelas betapa banyaknya perbedaan konsep, pandangan dan strategi yang berasal dari pemerintah RI, GAM dan rakyat Aceh. Upaya penyelesaiannya terbelah antara kepentingan nasional RI, keinginan GAM untuk merdeka, dan kerinduan masyarakat Aceh akan kedamaian, keamanan dan kesejahteraan. Aceh memang merupakan suatu kompleksitas permasalahan yang memerlukan waktu, ketekunan, kesabaran untuk *men-dialog-kannya*

¹⁴⁶ Informasi lengkap tentang hasil penelitian tersebut dapat dibaca dalam buku *Suara dari Aceh Identifikasi Kebutuhan dan Keinginan Rakyat Aceh*, YAPPIKA, Februari 2001.

secara berkelanjutan, guna mendapatkan resolusi yang sebaik-baiknya.

Kendala dan Kegagalan Resolusi Konflik

Dialog sebagai jalan terbaik untuk mencari resolusi konflik Aceh saat ini (konflik antara pemerintah RI dan GAM) sebenarnya baru dimulai sejak tahun 1990-an, setelah DOM dicabut dan Orde Baru tidak berkuasa lagi. Sebelumnya, pada masa pemerintahan Orde Baru tidak pernah ada upaya perundingan ataupun dialog karena suara dialog tenggelam, tidak terdengar, dihambat oleh bunyi senjata yang lebih nyaring, memekakkan telinga dan menakutkan. Hasilnya ternyata bukan hanya nol besar tetapi dengan derajat minus yang sangat banyak di bawah nol. Puncak dari kegagalan pada masa itu ialah ketika diadakan Operasi Jaring Merah (1989-1998) di mana Aceh ditempatkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Singkatnya seperti yang sudah berkali-kali dikemukakan sebelumnya, penggunaan kekuatan bersenjata untuk resolusi konflik Aceh adalah suatu kendala, bahkan kegagalan strategi yang nyata, bukan solusi.

Mungkin timbul pertanyaan, mengapa setelah DOM dicabut pun berbagai upaya resolusi konflik Aceh juga mengalami kegagalan? Padahal sesudah DOM pihak pemerintah RI dan pihak-pihak lainnya sudah mengeluarkan, mencanangkan dan melaksanakan beberapa kebijakan dan program berikut ini:

- (1) Ketetapan MPR RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang GBHN, pembagian daerah dan Daerah Istimewa Aceh;
- (2) Rekomendasi Pansus DPR RI;
- (3) Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh;
- (4) Inpres Nomor 4 Tahun 2001 yang telah diganti dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2001;

- (5) Dialog antara Delegasi Republik Indonesia dengan GAM di Davos;
- (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) yang sudah disahkan oleh DPR RI pada 19 Juli 2001;
- (7) Inpres Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh;
- (8) Dialog/perundingan di Geneva antara Pihak Pemerintah dan GAM yang menghasilkan Jeda Kemanusiaan I dan II serta Moratorium
- (9) Dibentuknya Desk Aceh oleh Menko Polkam;
- (10) Adanya CoHA (*Cessation of Hostilities Agreement*);
- (11) Upaya-upaya lainnya yang digagas dan dilakukan baik oleh pihak Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Departemen-Departemen, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Departemen, organisasi swasta dan masyarakat, organisasi kaum perempuan, LSM dan mahasiswa, dan sebagainya.

Sebenarnya jika dilihat dari segi banyaknya upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk ikut serta menyelesaikan konflik Aceh semestinya masalah tersebut sudah lama berakhir. Kalaupun tidak, ada kecenderungan ke arah penurunan intensitas kejadian konflik, korban konflik, pelanggaran HAM, jumlah masalah yang tertinggal maupun jumlah pengungsi, serta adanya perkembangan yang bertambah kondusif terhadap pemulihan lingkungan kehidupan masyarakatnya. Namun, yang tampak adalah keadaan aspek-aspek tersebut yang selalu berfluktuasi. Bahkan aspek-aspek tertentu keadaannya semakin mengerikan, misalnya dengan terjadinya pembakaran sarana dan prasarana pendidikan.

Persoalannya adalah kurang ada keinkonsistensian dalam cara penanganan konflik Aceh, artinya jumlah program dan aktivitas damai yang ditawarkan relatif berimbang dengan jumlah kegiatan militeristik yang digelar. Sesudah DOM, penggelaran berbagai jenis operasi militer tidak berkurang jumlahnya dan tidak lebih sedikit jumlah program-program sipil yang mengarah kepada perdamaian, pembangunan, pengembangan kesejahteraan rakyat. Salah satu contoh yang paling nyata ialah “Operasi Terpadu” (2003), di mana dampak kegiatan operasi militernya lebih dirasakan oleh masyarakat dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan non-militernya. Oleh karena itu, pertanyaan mengapa berbagai resolusi konflik Aceh pada akhirnya menemui kendala dan kegagalan, salah satu jawabannya yang bersifat umum ialah karena “inkonsistensi” dalam manajemen konflik Aceh.

Apabila dilihat dari segi upaya dan pelaksanaan resolusi konflik secara khusus, dalam pengertian berdasarkan unit-unit program dan kegiatan tertentu, tampak faktor-faktor kendala dan kegagalannya bermacam-macam. Di sini akan diulas beberapa contoh resolusi konflik yang kurang atau sama sekali tidak mencapai sasaran. Pertama, upaya pemerintah RI untuk mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah Aceh secara komprehensif melalui dialog dengan pimpinan GAM di Swedia tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Upaya tersebut diawali pada tanggal 15 Mei 1999, ketika Wakil Pemerintah RI, Hasan Wirayuda, dan wakil GAM, Zaini Abdullah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh (*Joint Understanding on Humanitarian Pause on Aceh*) di sebuah tempat di luar Kota Geneva. Setahun setelah itu, pada tanggal 15 Mei 2000, delegasi Pemerintah RI berunding dengan GAM dan menandatangani Jeda Kemanusiaan. Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2001, Wakil Pemerintah RI dan GAM di Geneva sepakat untuk menandatangani dokumen kesepahaman sementara (*provision of understanding*) yang berisi antara lain GAM merubah taktik perjuangannya dari kekuatan bersenjata menjadi

kekuatan perjuangan politik. Kesepakatan lainnya ialah kedua belah pihak memasuki tahap moratorium untuk menghentikan tembakan-menembak dan sama-sama tidak lagi mengangkat senjata. Kemudian, pada tanggal 10 Februari 2001, para komandan lapangan GAM dan pimpinan operasi dari Polda Aceh mengeluarkan pernyataan bersama dalam rangka menghentikan segala bentuk kekerasan selama 10 hari.

Jeda kemanusiaan I dan II serta Moratorium sebagai hasil beberapa kali dialog ternyata sama sekali tidak merubah keadaan di Aceh.¹⁴⁷ Bukti dari kegagalan itu ialah bahwa di mana-mana masih terjadi pertempuran secara sporadis antara TNI/POLRI di satu pihak dengan GAM di pihak lainnya. Pertempuran ini tidak jarang mengakibatkan korban di kalangan penduduk sipil, pembunuhan, penculikan, pemaksaan, perampasan harta milik rakyat serta pemerasan, baik yang dilakukan oleh GAM, oknum aparat negara yang indisipliner, atau mereka yang disebut OTK (Orang Tak Dikenal). Semua itu membuahkan ketidaktenteraman dan ketakutan bagi warga masyarakat di desa-desa, daerah pedalaman maupun wilayah perkotaan.

Kondisi yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa resolusi konflik secara komprehensif sebenarnya masih pada tataran “kesungguhan,” yang berarti belum ada tindakan nyata untuk melaksanakannya. Mungkin hal ini disebabkan oleh tekad yang tidak sungguh-sungguh, atau bisa juga karena tidak mempunyai konsep yang jelas tentang apa yang harus dilakukan sebagai langkah-langkah implementatif dari hasil kesepakatan Geneva tersebut. Hal ini tampak nyata, karena seringkali hasil kesepakatan yang dicapai tidak direspon secara cepat dan positif oleh semua pihak. Hasil kesepakatan kadang-kadang malah menjadi “subyek wacana”

¹⁴⁷ Lihat antara lain Ismail Hasan Matareum, Ketua Umum FORKA (Forum Keprihatinan untuk Aceh, “Penyelesaian Masalah Aceh”, dalam: Musni Umar ACEH *Win-win Solution*, (Jakarta, Penerbit Forum Kampus Kuning, 2002).

kembali dan berlarut-larut, sehingga menimbulkan sikap pro dan kontra yang kontraproduktif. Akibatnya, kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang konkret di lapangan bagi kepentingan masyarakat menjadi hilang.

Kedua, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2001 yang mengisyaratkan penyelesaian konflik secara komprehensif, yang di dalamnya termasuk pula operasi pemulihan keamanan dan pemberlakuan otonomi, ternyata implementasinya di lapangan tidak efektif. Keadaan Aceh tambah memprihatinkan sejak pemberlakuan Inpres tersebut, karena banyak sekali terjadi tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Kontras mencatat selama April sampai dengan Agustus 2001, terjadi peningkatan intensitas peristiwa kekerasan dan menelan 539 korban, dengan perincian: 79 peristiwa pembunuhan di luar prosedur hukum dengan jumlah korban 203 jiwa, 75 peristiwa penyiksaan dengan jumlah korban mencapai 197 jiwa, 7 peristiwa penghilangan secara paksa dengan jumlah korban 29 orang dan 32 kasus penahanan semena-mena dengan jumlah korban 110 orang. Kontras (Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) juga mencatat, pelanggaran HAM tersebut meliputi pelanggaran atas hak untuk hidup, tidak diberikannya perlindungan bagi warga sipil yang terjebak dalam konflik, campur tangan dalam kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat; penganiayaan, melakukan tindakan semena-mena, dan perampasan hak dan kebebasan lainnya yang dilakukan secara sewenang-wenang.¹⁴⁸

Berdasarkan kenyataan tentang berbagai macam tindak kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut, bisa disimpulkan bahwa pemerintah masih cenderung menempatkan masalah Aceh sebagai problem ketidakstabilan keamanan semata. Penempatan demikian itu sesungguhnya menjadikan makna komprehensif (serba mencakup) dalam pendekatan yang disyaratkan Inpres No. 4 untuk menyelesaikan masalah Aceh patut dipertanyakan kembali. Dengan

¹⁴⁸ Siaran Pers Kontras No. 36/SP-Kontras/VIII/0.

kata lain, sumber kegagalan solusi konflik Inpres Nomor 4 Tahun 2001 ialah kesalahan pelaksanaan dari pendekatan yang diambil. Prioritas pelaksanaan hanya difokuskan pada pendekatan keamanan (*security approach*), sedangkan pendekatan sosial (*social approach*) yang meliputi pendekatan politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya sama sekali tidak berjalan. Apabila dikatakan bahwa dimensi keamanan terasa sangat menonjol karena disebabkan dimensi lain yang berjalan lambat, maka kegagalannya kemudian terletak pada koordinasi pelaksanaan Inpres Nomor 4 tersebut. Begitu pula jika dikatakan bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil dilakukan oleh semua unsur yang terlibat konflik, baik TNI/POLRI maupun GAM) maka persoalannya terletak pada sistem kontrol di lapangan yang tidak efektif atau tidak ada. Padahal kekuatan bersenjata merupakan aktor utama yang harus bertanggung jawab atas keselamatan penduduk sipil.

Ketiga, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2002 yang berisi secara jelas menugaskan dan memberi wewenang kepada instansi dan pejabat tingkat pusat, serta memberi wewenang dan tugas kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), untuk melakukan serangkaian dialog rekonsiliasi dengan semua unsur masyarakat Aceh, tentu saja termasuk di dalamnya pihak GAM. Untuk melaksanakan dialog yang dimaksud, semestinya gubernur mempunyai konsep yang jelas, adil, dan bermartabat untuk penyelesaian masalah menuju Aceh Baru, damai, sejahtera di bawah ampunan dan ridha Allah. Selain itu, bekerjasama dengan Panglima Kodam Iskandar Muda merupakan langkah yang strategis untuk pemulihan keamanan yang harus ditempuh oleh Gubernur.¹⁴⁹

Pemberlakuan Inpres Nomor 1 Tahun 2002 sebenarnya merupakan pengganti dan perbaikan dari dua Inpres sebelumnya, yaitu Inpres Nomor 4 dan 7 Tahun 2001 yang dianggap kurang dan/atau tidak kondusif terhadap masalah konflik Aceh dan

¹⁴⁹ Ismail Hasan Matareum, 2002.

perkembangan masyarakatnya. Dalam masa pelaksanaan kedua Inpres tersebut, nampaknya pihak Gubernur NAD dinilai belum mempunyai konsep yang jelas maupun program kerja dan langkah yang tepat agar amanat yang diberikan oleh kedua Inpres tersebut tercapai. Namun, setelah Inpres Nomor 1 Tahun 2002 diterbitkan pun, ternyata upaya pengembangan wilayah dan perbaikan kehidupan masyarakat Aceh serta tugas rekonsiliasi yang berada dipundak Gubernur NAD juga belum direalisasikan secara maksimal. Kesulitannya, selain disebabkan oleh faktor keamanan yang masih rawan, juga terdapat faktor-faktor kendala lainnya, seperti komunikasi yang kurang lancar antara Gubernur NAD dengan sebagian stafnya, terdapat perbedaan visi pembangunan Aceh dan pengembangan masyarakat di kalangan pejabat di Aceh, penggunaan anggaran yang tidak tepat sehingga tidak berkenaan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat Aceh, serta merebaknya praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang meresahkan masyarakat Aceh.

Menyangkut tugas rekonsiliasi dengan berbagai unsur, kelompok, komponen dalam masyarakat Aceh, sebenarnya sebagian dari upaya-upaya tersebut sudah menunjukkan hasil. Misalnya saja upaya rekonstruksi peranan ulama yang pernah terlalu larut dalam urusan politik kekuasaan, dan upaya membangun kerjasama dengan para cendekiawan baik di Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniri untuk secara bersama-sama merancang Aceh ke depan. Di kalangan masyarakat Aceh di luar Aceh juga telah diupayakan adanya peningkatan komunikasi melalui organisasi-organisasi sosialnya, misalnya pendirian Taman Iskandar Muda yang ruang lingkup kegiatannya meliputi seluruh wilayah Jabodetabek (Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi). Sesuatu yang mungkin masih menjadi kendala ialah melakukan rekonsiliasi dengan pihak GAM.

Keempat, CoHA (*The Cessation of Hostilities Agreement*) atau Kesepakatan Penghentian Permusuhan yang ditandatangani tanggal 9 Desember 2002 di Gedung Henry Dunant Centre di tepi Danau

Geneva Swiss. HDC (Henry Dunant Centre) sekaligus sebagai fasilitatornya. Secara garis besar kesepakatan CoHA ini berisi 9 pasal, yaitu: (1) Tujuan penghentian permusuhan dan segala tindak kekerasan; (2) Komitmen kedua pihak untuk menghentikan permusuhan dan segala tindak kekerasan; (3) Pembentukan Komite Keamanan Bersama (*Joint Security Committee*); (4) Pembentukan zona damai; (5) Penetapan kerangka waktu (tiga bulan pertama sebagai indikator keseriusan komitmen); (6) Pelaksanaan forum *All Inclusive Dialogue*; (7) Pemberian informasi publik dan komunikasi kepada masyarakat Aceh; (8) Pembentukan Dewan Bersama (*Joint Council*) untuk memecahkan segala persoalan dan perselisihan dalam implementasi perjanjian; (9) Tata cara melakukan amandemen atau pengakhiran atas kesepakatan yang telah ditetapkan (jika *Joint Council* tidak sanggup menyelesaikan permasalahan, maka salah satu pihak berhak menarik diri dari perjanjian).¹⁵⁰

Masa-masa awal setelah penandatanganan kesepakatan itu dapat dikatakan telah terjadi luapan kegembiraan pada berbagai komponen masyarakat, tidak hanya di Aceh tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia. Sambutan positif pun berdatangan dari berbagai unsur, mulai dari Presiden RI, Menko Polkam, Panglima TNI, Panglima Kodam Iskandar Muda, Gubernur NAD, Kapolda Aceh, dan segenap unsur pemerintahan dan masyarakat lainnya. Sambutan kegembiraan juga diberikan oleh beberapa negara antara lain dari Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Di balik semua itu sebenarnya ada juga pihak-pihak tertentu yang masih mempunyai pertanyaan terhadap CoHA. Anggota Presidium Kontras, Usman Hamid, misalnya mempertanyakan tentang tidak dimasukkannya aspirasi rakyat Aceh agar pelanggaran HAM dibawa ke pengadilan. Diakuinya bahwa dia sudah mendengar tentang rencana pemerintah untuk memberikan amnesti dan

¹⁵⁰ Sumber: Disarikan dari naskah Perjanjian Penghentian Permusuhan RI-GAM oleh Litbang MI (*Media Indonesia*), *Media Indonesia*, 10 Desember 2002.

rehabilitasi bagi para anggota Aceh Merdeka, namun menurut dia, sebaiknya pemberian amnesti dan rehabilitasi itu dibarengi dengan upaya nyata pengungkapan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh. Sehubungan dengan masalah HAM, Todung Mulya Lubis menyatakan ketidakyakinannya tentang keberhasilan penyelesaian politik Aceh jika tanpa penyelesaian kasus HAM.¹⁵¹

Sementara itu Afan Gaffar, guru besar ilmu politik pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa kesepakatan RI dan GAM dalam CoHA baru merupakan titik awal sebuah penghentian permusuhan yang belum bisa disebut sebagai perjanjian perdamaian. Menurutnya, yang lebih penting ialah implementasinya di lapangan karena penandatanganan itu perlu diikuti langkah-langkah konkrit. Bahkan dikatakannya bahwa kewaspadaan terhadap sikap GAM penting, karena seringkali mereka “lempar batu sembunyi tangan”. Hal semacam itu akan cenderung dilakukan GAM selama senjata masih bertebaran di Aceh.¹⁵² Tentu saja semua kekhawatiran seperti itu sangat beralasan, karena belajar dari pengalaman sebelumnya, sudah seringkali langkah-langkah yang diambil untuk penyelesaian konflik atau masalah Aceh tidak tuntas. Demikian pula keberadaan pihak-pihak tertentu yang karena kepentingan pribadi atau kelompoknya berusaha mementahkan kembali upaya-upaya ke arah perdamaian perlu diwaspadai.

Sesungguhnya ada beberapa hal yang sangat krusial dan terbukti menjadi kendala dalam pelaksanaan CoHA kemudian, yaitu: (1) GAM tidak bersedia mengakui keberadaan Propinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam); (2) keberadaan sayap militer GAM yang bersenjata; (3) tekad GAM yang akan tetap mengupayakan kemerdekaan penuh bagi Aceh; (4) tidak tuntasnya penyelesaian berbagai masalah sejak konflik terjadi, seperti pelanggaran HAM (baik yang dilakukan pihak Indonesia, maupun oleh pihak GAM); (5)

¹⁵¹ *Koran Tempo*, 11 Desember 2002.

¹⁵² *Suara Pembaruan*, 10 Desember 2002.

timbulnya rasa tidak sabar pihak-pihak tertentu menyaksikan proses implementasi hasil-hasil CoHA yang dianggap sangat lambat; (6) sikap mengedepankan pernyataan-pernyataan yang saling berbenturan antara pejabat pihak RI dan GAM; (7) penderitaan rakyat kurang mendapat perhatian, padahal mereka justru yang menjadi korban utama dari konflik yang terjadi; dan lain-lain.

Memang pada akhirnya CoHA harus menjadi kenangan perdamaian sementara saja bagi rakyat Aceh. Berbagai alasan yang dikemukakan sebagai latar belakang kegagalan CoHA, mulai dari ketidakmampuan fasilitator HDC mengawasi implementasi perjanjian-perjanjian yang disepakati, keberhasilan GAM membangun jaringan baru bagi kegiatannya di seluruh daerah tingkat II Aceh, sampai kepada keyakinan pihak RI bahwa CoHA tidak bertindak netral dalam posisinya sebagai fasilitator dalam upaya mencapai perdamaian di Aceh. Ketidakberhasilan CoHA, yang pada awalnya diharapkan sebagai landasan untuk *take-off* bagi perdamaian yang langgeng di Aceh, sebenarnya hanya mengulangi kegagalan berbagai perundingan, dan perjanjian sebelumnya.

Secara umum bisa disimpulkan bahwa, kegagalan berbagai upaya dan strategi penyelesaian masalah dan konflik Aceh adalah disebabkan oleh beberapa faktor, berikut: (1) penanganan yang serba tanggung atas berbagai perjanjian antara pihak RI dan GAM; (2) adanya anggapan bahwa persoalan sejarah masa lalu mengenai Aceh belum selesai; (3) masalah Aceh sudah cenderung diposisikan dari masalah konflik vertikal menjadi konflik horizontal (konflik etnik); (4) sikap tidak konsisten dalam menangani semua akibat konflik di Aceh; (5) politisasi masalah Aceh oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus; (6) semua upaya dan strategi penyelesaian konflik yang sudah digelar terbukti tidak membebaskan rakyat Aceh dari kemiskinan, ketidakberdayaan, kesulitan hidup, justru sebaliknya yang terjadi ialah merusaknya ketenteraman dan kenyamanan mereka.

Implikasi Konflik

Konflik Aceh yang melibatkan antara pihak pemerintah RI dan GAM dan sudah berlangsung sejak tahun 1976 membawa implikasi yang sangat serius dipandang dari bermacam-macam aspek. Masalah yang diawali oleh rasa kecewa beberapa warga masyarakat Aceh yang kemudian menjadi tokoh-tokoh GAM -- bahwa Aceh dan masyarakatnya tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah Indonesia, padahal di masa kemerdekaan rakyat Aceh menjadi "daerah modal" bagi Indonesia yang baru merdeka -- pada akhirnya mengkristalkan organisasi tersebut sebagai alat perlawanan terhadap negara Republik Indonesia. Alasan kurang perhatian pun menggelinding tambah melebar sehingga akhirnya berubah dalam bentuk keinginan agar Aceh merdeka sebagai negara sendiri dan lepas dari pangkuan RI. Dengan adanya pernyataan kemerdekaan tanggal 4 Desember 1976, kemelut itupun semakin kompleks, karena alasan kemerdekaan yang dideklarasikan pada hari itu dicari pula pembenarannya dari catatan-catatan sejarah masa-masa kerajaan di Aceh, bahwa pada dasarnya Aceh memang tidak pernah menjadi bagian dari negara Indonesia yang diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tahun 1949.

Alasan GAM pun semakin bertambah karena Belanda juga mendapatkan cap sebagai pihak yang salah memasukkan Aceh sebagai bagian dari Indonesia yang berdaulat. Akan tetapi, bila ditelusuri secara lebih teliti, akan timbul pertanyaan, mengapa langsung menyatakan kemerdekaan, padahal sebelumnya sebagian di antara tokoh-tokoh perintis GAM kalau tidak mau disebut semuanya, adalah juga yang, turut memperjuangkan dan meneriakkan "Indonesia merdeka"?. Mengapa pula ketika GAM mendeklarasikan kemerdekaan, pemerintah (ORBA) Indonesia ketika itu langsung meresponnya dengan kekuatan bersenjata, tidak mendahulukan dialog atau perundingan? Dan, ketika GAM sudah berurat berakar di masyarakat Aceh seperti sekarang, semakin banyak pula unsur yang terlibat di dalamnya, baik sebagai penengah,

pendukung pihak-pihak yang berkonflik, fasilitator, atau apapun namanya, maka untuk semuanya akan bertambah sering pula pertanyaan “mengapa” dilontarkan.

Barangkali semua itu merupakan bagian dari implikasi konflik Aceh yang sudah berlarut-larut. Implikasinya terhadap NKRI tentu akan bertambah banyak selama persoalan konfliknya sendiri tidak diselesaikan, sesegera mungkin. Bagi Indonesia, konflik Aceh adalah suatu persoalan domestik – Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat, bukan hanya persoalan daerah ataupun wilayah Aceh. Oleh karena itu, yang terjadi di Aceh membawa implikasi pula bagi warga negara di seluruh wilayah Indonesia. Apabila berpijak pada “pendapat” seperti itu, maka masalah konflik Aceh tentulah merupakan bagian dari dinamika kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dalam posisi seperti itu, maka kebijakan apapun yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia berlaku pula di wilayah Aceh. Namun, sejak dikeluarkannya UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 22 tentang Otonomi Daerah dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Propinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) yang juga merupakan produk Pemerintah Pusat (negara), maka penanganan Aceh harus mempunyai kekhususan yang sesuai dengan status NAD-nya itu.

Konflik Aceh membawa implikasi terhadap kredibilitas pemerintah RI dalam memperlakukan peristiwa-peristiwa yang sejenis di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam hubungannya dengan konflik Aceh, baik cara dan strategi penanganan konflik itu, berlarut-larut, dan berulang-ulangnya konflik tersebut, banyaknya korban dalam bermacam-macam kategorinya, besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan, termasuk hasil-hasil yang dicapai dalam resolusi konflik serta manfaat yang dirasakan rakyat, adalah indikator-indikator yang menjadi dasar bagi setiap orang yang jeli untuk melihat kredibilitas pemerintah dalam mengelola konflik Aceh. Keberhasilan pemerintah RI (Pusat) mengelola konflik Aceh

tanpa pengorbanan warga masyarakat (rakyat sipil ataupun militer) yang besar, tanpa penghancuran harkat “kemanusiaan” rakyatnya, melalui pendekatan non-militer atau pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), sebenarnya akan lebih menunjukkan kekuatan Pemerintah RI sendiri. Namun, sayangnya kekuatan bersenjata sudah digelar kembali di Aceh, meskipun pendekatan keamanan (*security approach*) seperti itu paling cepat menebar penderitaan di mana-mana.

Bagi GAM, implikasi konflik Aceh yang berlarut-larut, sebagaimana dikatakan oleh beberapa pemimpin dan tokohnya, secara fisik memang melelahkan. Namun, dalam suasana konflik seperti itu mereka semakin yakin akan kebenaran cita-citanya, ujian bagi kekuatan perjuangannya, latihan untuk meningkatkan kecerdasannya dalam mengembangkan cara dan strategi untuk menghadapi pemerintah RI. Dengan kata lain “pengalaman”-lah yang mengajari mereka menjadi lebih cekatan dan lebih taktis dalam membawa misi perjuangannya, sehingga mereka dikenal baik, mungkin malah dicintai oleh rakyat Aceh, serta mendapat simpati dari pihak lain, khususnya masyarakat internasional. Penyerbuan sebuah *dayah* (pesantren) oleh militer Indonesia, misalnya, menyebabkan santrinya sebagian melarikan diri ke Malaysia. Di negara jiran itulah mereka direkrut oleh anggota GAM yang lebih dulu ke sana untuk mendirikan media massa. Suatu contoh proses pencerdasan yang sebenarnya dimulai sendiri oleh militer Indonesia.

Konflik yang berlarut-larut bagi rakyat Aceh memang membawa implikasi yang sangat menyakitkan, seperti pembunuhan, pelecehan, pemiskinan, kesengsaraan, penderitaan, dan lain-lain. Semua hal itu mereka sudah terima dari generasi ke generasi sehingga seringkali menimbulkan keputusan, tapi pada waktu yang sama menyemaikan rasa heroisme dalam masyarakat Aceh. Dalam konflik yang terjadi sekarang bahkan penderitaan untuk generasi masa depan pun sudah dimulai, yaitu melalui pembakaran

sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini berarti terjadi proses pembodohan dalam masyarakat Aceh. Akan tetapi, apakah benar pembakaran tersebut betul-betul merupakan bagian dari proses pembodohan bagi mereka? Untuk sebagian besar dari mereka, hal itu pasti dianggap benar. Namun sesungguhnya, orang Aceh mengenal pendidikan tidak hanya dari sekolah, karena mereka pun bisa menjadi terdidik oleh konflik yang berlarut-larut. Sungguh menyedihkan!!



BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Ada perbedaan sumber konflik antara Peristiwa DI/TII masa Daud Beureueh(1953-1963) dengan munculnya ASNLF Dr. Hasan Tiro (1976-sekarang). Peristiwa DI/TII dipicu oleh penggabungan Propinsi Aceh ke Sumatera Utara, padahal Soekarno telah memberi janji, Aceh akan menjadi wilayah tersendiri yang menegakkan syariat Islam. Otonomi Aceh yang telah diberikan dihapuskan, dan pengikut-pengikut Teungku Daud Bereue'eh dicurigai, ketika mereka melakukan gerakan menuntut otonomi khusus bagi Aceh. Karena kekecewaan politik terhadap pusat itulah, Teungku Daud Beureueh kemudian mendeklarasikan Negara Islam Indonesia.

Sementara itu Hasan Tiro mendeklarasikan ASNLF, dipicu oleh kemarahannya atas penyelenggaraan pemerintahan di bawah orang-orang Jawa. Kelompoknya menuduh adanya kolonialisasi Jawa atas Aceh. Di sisi lain, gerakan ini juga sering dikaitkan dengan persoalan eksplorasi gas alam dan minyak bumi sekitar tahun 1970-an yang diikuti dengan isu penindasan akibat pembangunan tersebut terhadap rakyat Aceh. Di Aceh Utara, Aceh Timur, juga muncul persoalan penggusuran tanah, ganti rugi yang tidak memadai dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Perbedaan kedua dari keduanya adalah bahwa semasa Teungku Daud Bereueuh, gagasannya adalah negara yang dibangun berdasarkan atas syariat Islam, namun koridornya tetap berada dalam bingkai ke-Indonesiaan, atau dengan

kata lain Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia, bukan sebagai sebuah negara yang terpisah dan berdiri sendiri. Sementara Hasan Tiro dengan ASNLFnya, jelas-jelas ingin memisahkan Aceh dari Indonesia sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri.

- b. Pada waktu ASNLF dideklarasikan pada 4 Desember 1976, dukungan terhadap kelompok ini tidak sebesar sekarang, karena waktu itu ASNLF kurang mendapatkan dukungan secara langsung dari masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah adanya trauma dari sisa-sisa peristiwa DI/TII dan akibat penanganan kasus PKI 1965. Daud Beureueh sendiri tidak secara terbuka memberikan dukungan terhadap ASNLF Hasan Tiro, namun juga tidak memberikan fatwa larangan mengenai hal itu. Meski demikian, dukungan secara tidak langsung tetap ada dari sebagian generasi DI/TII maupun keluarganya, karena sebagian intelektual yang mengikuti Hasan Tiro dan bergabung dengan ASNLF adalah keluarga dari pendukung DI/TII yang kecewa atas penanganan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah RI.

Pada waktu setelah deklarasi 1976, dilakukan operasi militer untuk menangani berbagai tindak kejahatan/penyerangan di sekitar lokasi eksplorasi gas alam dan minyak bumi, ASNLF belum mempunyai angkatan perang sebagaimana sekarang, sehingga sebagian pendukungnya melakukan perlawanan di gunung-gunung di sekitar lokasi Pidie dan Aceh Utara. Sebenarnya kelompok ini dengan cepat dapat ditangani, bahkan sebagian intelektualnya terpaksa melarikan diri ke Malaysia, dan kemudian menjadi imigran ke Lybia dan Swedia.

- c. Selama masa 1976-1989, relatif kelompok ini tidak terdengar lagi, kecuali ketika pada 1987-1990 tiba-tiba muncul

beberapa aksi penyerangan dan gangguan keamanan di sekitar lokasi Gas Alam dan Minyak Bumi, yang oleh pihak ABRI disebut sebagai GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan). Menariknya, dari aksi-aksi GPK ini sebagian dipelopori oleh para desertir ABRI dari kesatuan Kopassus, yang secara eksplisit mengikuti gerakan ASNLF yang masih belum tuntas diselesaikan pada kemunculan pertamanya. Dari segi kekuatannya, GPK-GPK ini tidak seberapa (sangat kecil sekitar 30-an orang). Pada bulan Juli 1990 Gubernur Aceh Ibrahim Hasan melaporkan kejadian-kejadian sporadis gangguan keamanan di pusat-pusat industri Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Timur, terutama setelah adanya penyerbuan markas ABRI di sana, agar pusat mengirimkan pasukan ke Aceh. Sejak itulah, dilakukan Operasi Jaring Merah (OJM). Waktu itu tidak pernah dikenal istilah DOM (Daerah Operasi Militer), karena memang nama operasi yang digunakan adalah Operasi Jaring Merah (1990-1998).

- d. Pada masa OJM, terjadi banyak kesalahan, seperti kecurigaan tentang siapa sebenarnya yang dapat disebut sebagai GPK yang mendukung Hasan Tiro di tiga lokasi tersebut, secara jelas tidak bisa ditunjukkan bukti-buktinya. Selama adanya OJM itulah, terjadi tindak kekerasan, penindasan, teror yang luar biasa yang dilakukan oleh ABRI (sebagian besar oleh pos-pos satuan taktis yang berjumlah antara 7-10 orang dan berlokasi di desa-desa atau tempat-tempat tertentu). Penyiksaan, penghilangan orang, pemerkosaan, penculikan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, dijustifikasi oleh tuduhan bahwa hampir semua orang Aceh di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur merupakan GPK atau pengikut pemberontak Hasan Tiro.

Yang patut dicatat di sini adalah, bahwa OJM-lah yang telah memperluas dukungan masyarakat di sekitar lokasi

tumbuhnya ASNLF Hasan Tiro, karena mereka-mereka inilah yang menderita secara langsung akibat tuduhan GPK tersebut. Hampir semua dokumen pada tahun-tahun ini, menyebut mereka sebagai GPK, GBPK, dan lain-lain, yang intinya adalah pengacau; belum ada yang menyebutnya sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Karena luasnya dampak/ekses dari OJM itu, maka korban-korban OJM yang disiksa, keluarganya yang terbunuh, orang tuanya diperkosa, sanak saudaranya mengalami trauma, dan lain-lainnya, secara langsung maupun tidak langsung akhirnya terdorong untuk menjadi simpatisan ASNLF.

- e. Setelah DOM (Daerah Operasi Militer) dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998 di Lhokseumawe oleh Pemerintah RI melalui Panglima ABRI, orang-orang yang sakit hati akibat masa OJM yang kemudian menjadi simpatisan ASNLF ini mulai terdengar lagi dengan istilah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tak mengherankan, apabila pertumbuhan dan dukungan terhadap GAM makin lama makin kuat dan besar, karena memang dipengaruhi oleh rasa dendam para keluarga dan korban OJM selama periode 1990-1998. Faktor lain yang mendorong mereka bergabung dengan GAM adalah karena tidak adanya rasa simpati dari Pemerintah RI bagi para korban, walaupun sejak DOM dicabut, mereka sudah menuntut rasa keadilan (*justice*) yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Mereka menuntut agar para pelanggar HAM berat semasa OJM dibawa ke pengadilan, namun langkah ini selalau ditentang oleh ABRI sehingga tidak ada penegakan hukum secara sungguh-sungguh bagi para korban OJM tersebut.

Respon Pemerintah RI inilah yang semakin memperdalam luka para keluarga dan korban OJM. Akibatnya mereka kemudian menyerang dan membunuh, *cuak-cuak* (para informan ABRI

selama OJM yang merupakan orang Aceh juga). ASNLF yang masih ada di luar -- terutama di Malaysia, kemudian memanfaatkan situasi yang ada untuk menghidupkan kembali gerakannya. Gerakan mereka ini didahului oleh gerakan mahasiswa di Aceh dengan salah satu tuntutan mereka juga merdeka. Namun di antara mereka tidak ada hubungan. Tak mengherankan apabila kemudian dua sisi kepentingan ini, yaitu gerakan politik rakyat Aceh yang kecewa terhadap Pemerintah Pusat dan Gerakan Aceh Merdeka, menemukan titik singgung, baik pada segi wacana maupun strateginya. Terus terang, GAM sangat piawai memanfaatkan situasi gerakan politik rakyat Aceh---terutama gagasan referendum yang diwujudkan pada 8 November 1999 di Banda Aceh. Sejak saat itulah, pertumbuhan GAM sebenarnya sudah tidak dapat dibendung lagi, karena memang sebagian partisannya adalah orang-orang yang kecewa terhadap keadaan dan situasi, bahkan sebagian besar dari mereka adalah para kriminal yang terdaftar sebagai buronan aparat keamanan.

- f. Paska DOM dicabut, terjadi eskalasi gangguan keamanan di Aceh, yang diakibatkan karena adanya kekosongan aparatus negara. ABRI waktu itu (pasukan organik) tidak mampu berbuat apa-apa, apalagi membendung gerakan yang telah tumbuh menyatu antara gerakan politik dengan gerakan reformasi. GAM memanfaatkan situasi demikian dengan propaganda-propaganda politiknya yang mengatakan bahwa Aceh sebentar lagi akan merdeka. Kelompok ini semakin eksis dengan dibentuknya AGAM (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka) pada tahun 1999. Sejak 1999 itulah, GAM membangun gerakan yang lebih luas dengan organisasi yang telah ditata dan lebih modern dibandingkan dengan gerakan mereka di masa sebelumnya.

Praktis sejak 1999 itu, konflik Aceh antara TNI-Polri dengan GAM semakin menajam. Sementara masyarakat di luarnya sebagian menjadi partisan GAM, dan sebagian lagi adalah mereka-mereka yang menghendaki agar ada penyelesaian mengenai konflik Aceh dalam pengertian politik.

- g. Ketika posisi GAM sudah membesar dan hampir menguasai 70 persen wilayah di Aceh, Pemerintah Pusat baru menyadari pentingnya untuk melakukan penyelesaian di Aceh secara terpadu. Kelambanan pemerintah pusat dalam mengambil inisiatif penyelesaian konflik merupakan faktor dominan yang menyebabkan GAM semakin tumbuh besar dan berkembang dan mampu membuat struktur pemerintahan bayangan di hampir 17 wilayah Aceh. Karena itu, ketidakseriusan pemerintah pusat (baik di masa Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati) merupakan dua faktor yang menyebabkan GAM tumbuh dengan cepat dan mampu mengambil hati rakyat Aceh.

Dalam situasi yang demikian itulah, gagasan perdamaian mulai dilakukan, dari Jeda Kemanusiaan I, II, moratorium, hingga CoHA. Dari segi waktunya, sebenarnya terlambat, karena kekuatan GAM sudah membesar dan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, dari hampir seluruh wilayah Aceh sudah mereka dapatkan.

- h. Kegagalan berbagai upaya dan strategi penyelesaian konflik Aceh sekurang-kurangnya disebabkan oleh beberapa faktor: (a). penanganan yang serba tanggung atas berbagai langkah yang akan ditempuh; (b). ketidakseriusan pemerintah Jakarta dalam program-program yang sifatnya menyentuh langsung bagi kesejahteraan rakyat Aceh; umumnya program-program penyelesaian sifatnya amat politis (janji-janji politis) yang tidak pernah ditepati dan ini mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap upaya-upaya

penyelesaian konflik; (c). tajamnya perbedaan visi dan kepentingan di antara para pengambil keputusan politik di Jakarta mengenai langkah-langkah yang dapat meminimalkan konflik; (d) hampir semua strategi penyelesaian konflik yang dilakukan kurang terbukti dapat mengangkat harkat dan martabat orang Aceh dari penderitaan, ketidakberdayaan, kesulitan hidup, bahkan yang terjadi justru sebaliknya, mengakibatkan rusaknya ketentraman dan keamanan hidup mereka dari waktu ke waktu.

Kegagalan-kegagalan pendekatan di masa lalu ini menjadi kendala yang besar bagi penyelesaian konflik Aceh, karena di samping dilakukan dengan setengah-setengah, juga dilakukan dengan cara kekerasan, yang tidak disertai dengan cara mengambil hati rakyat Aceh. Padahal belajar dari berakhirnya peristiwa DI/TII 1963, dengan mendekati hati Daud Beureueh, justru perdamaian bisa tercipta di Aceh, dan perang dapat dihentikan.

- i. Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa operasi militer tidak akan dapat menyelesaikan konflik Aceh. Kenapa? Karena operasi militer berprinsip pada kekerasan dan pembunuhan, dan operasi militer akan menghasilkan generasi-generasi penuh dendam di Aceh, sehingga kita akan kesulitan untuk mengakhirinya dikemudian hari. Ini terlihat dari titik rendahnya humanisme (telah terjadi dehumanisasi) dalam kehidupan rakyat Aceh yang luar biasa dalam dan besar pengaruhnya bagi kehidupan mereka.

Meskipun operasi militer dianggap telah berhasil melumpuhkan sebagian dari kekuatan GAM, mewujudkan kinerja pemerintahan di daerah-daerah hitam dan rawan, namun formula penyelesaian Aceh yang dibutuhkan bukan keamanan atau rasa aman yang sementara. Oleh karena itu, ukuran-ukuran yang sifatnya fisik akan menjerumuskan kita

pada langkah yang salah. Integrasi bangsa sebagai sebuah entitas politik tidak seharusnya diukur dari apel kesetiaan, dan KTP merah putih, tetapi harus diukur dari hakekat integritas sebagai ikatan kelindonesiaan. Apabila kita juga belajar dari operasi-operasi sebelumnya, sebagai apapun pendekatan operasi militer, tetap saja akan menyisakan dendam dan kekecewaan. Karena itu, perlu formula lain sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik Aceh yang terkonsolidasi dan terintegrasi secara bijak dan menyeluruh.

- j. Untuk tujuan itu, yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi implementasi operasi militer dengan membuat kerangka transisional bagi pemerintahan di Aceh, dan dengan mendudukan apa yang dapat dikerjakan oleh TNI-Polri dan Pemerintah Daerah untuk keamanan Aceh, melalui pembagian wilayah kerja yang jelas dan penyusunan program-program non-militer seperti: kemanusiaan, rehabilitas korban, peningkatan kesejahteraan, penegakkan hukum (*justice*), dan implementasi konsep NAD. Tanpa ada *planning* dan program yang jelas untuk mengakhiri konflik dan operasi militer di Aceh, dendam kesumat dan kekecewaan politik akan terus menerus menjadi akar dan pemicu konflik di Aceh di masa depan. Karena itu, penurunan status Darurat Militer di Aceh diperlukan sebagai kerangka transisi kepada upaya normalisasi kehidupan masyarakat di Aceh. Selama itu perlu disusun langkah-langkah dan program-program bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta masyarakat Aceh secara keseluruhan, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh saat ini.

Mengapa ini penting? Karena harus diakui bahwa operasi militer belum sepenuhnya melumpuhkan kekuatan GAM. Sebagian besar anggota GAM masih ada, bahkan sebagian para intelektual dan petingginya masih eksis di luar Aceh.

Karena itu, proteksi internal amat diperlukan. Cara yang paling mudah adalah dengan memisahkan masyarakat Aceh dari GAM, baik sebagai partisannya maupun sebagai pendukungnya. Cara ini tidak mungkin dapat ditempuh apabila tidak ada kesungguhan dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan program-program sosial, ekonomi dan kesejahteraan secara umum; karena ideologi perlawanan yang dibangun oleh GAM adalah ideologi ketidakadilan, kemiskinan, kolonialisme, dan gagasan-gagasan eksploitasi sosial, ekonomi dan politik. Bila pemerintah pusat dan daerah tidak mampu memberikan jaminan perbaikan hidup orang Aceh selama 3-5 tahun ke depan, dengan formula kebijakan politik dan ekonomi serta program-program pembangunan yang terpadu, jelas nyata, maka konflik Aceh akan muncul kembali. Terutama apabila ada momentum atau kekisruhan politik yang ditandai oleh melemahnya pemerintah pusat (termasuk melemahnya aparat keamanan).

2. Rekomendasi: Upaya Penyelesaian Konflik Aceh

Pengalaman sejarah "separatisme" di Aceh menunjukkan bahwa operasi militer tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah, bahkan justru akan menimbulkan regenerasi konflik yang lebih serius. Karena itu, gagasan mencari alternatif bagi resolusi konflik di Aceh paska operasi militer -- karena pada operasi terpadu saat ini yang dominan hanya operasi militer -- perlu dipikirkan secara serius. Kesulitannya terletak pada upaya membangun kepercayaan di antara aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, padahal salah satu prasyarat utama resolusi konflik adalah adanya tingkat kepercayaan yang cukup agar persoalan konflik bersenjata dapat diubah menjadi "dialog perdamaian." Sayangnya, gagalnya CoHA sepertinya telah menutup upaya dialog perdamaian ini. Sementara itu, kebijakan operasi terpadu secara langsung maupun tidak langsung telah melumpuhkan

kekuatan-kekuatan masyarakat dan GAM yang menjadi inisiator perdamaian. Praktis setelah operasi militer ditempuh, kelompok-kelompok yang menjadi inisiator perdamaian di Aceh telah hancur, digantikan oleh kelompok-kelompok baru yang bercirikan rekayasa politis maupun kebutuhan sesaat yang tujuannya jelas untuk mendukung operasi terpadu.

Dengan kondisi seperti itu, upaya penyelesaian konflik Aceh mengalami jalan buntu yang sangat serius. Karena itu, apabila dalam situasi sekarang pihak sipil (baik pemerintahan sipil dan/atau intelektual sosial Indonesia) tidak mampu memberikan alternatif resolusi konflik selain upaya operasi militer, maka konflik Aceh tidak akan pernah terselesaikan.

Gagasan alternatif konflik dapat dimulai apabila operasi militer dihentikan dan digantikan dengan konsep baru sebagai pengganti operasi terpadu. Sebagai upaya resolusi konflik di Aceh, ada dua jenis rekomendasi yang bisa digagas dari hasil penelitian konflik Aceh oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun pertama ini. Rekomendasi tersebut adalah:

A. Rekomendasi Umum

1. Rekonstruksi sosial-kemanusiaan bagi Aceh melalui program-program yang nyata seperti pengentasan kemiskinan, meminimalkan pengangguran, rehabilitasi korban perang, rehabilitasi korban DOM, dan sebagainya
2. *Action plan* tentang pembagian kekayaan daerah -- gas dan minyak serta hasil-hasil industri lainnya -- secara teratur dan terstruktur dengan tahap-tahap yang pasti, termasuk penggunaannya bagi kesejahteraan rakyat Aceh
3. Membuka industri bagi kesejahteraan rakyat Aceh melalui kesempatan bagi mereka untuk berperan. Hal ini penting,

karena industri di Aceh seperti: Exxon Mobil/PT. Arun, PT. AAF, PT. KKA, sepertinya menjadi suatu entitas yang terlepas dari masyarakatnya. Padahal, hampir sebagian besar masyarakat di sekitar industri tergolong penduduk desa miskin. Kemiskinan yang terjadi bukan karena faktor alam, tetapi lebih merupakan kemiskinan struktural. Rekonstruksi industri di Aceh akan cukup membantu bagi penyelesaian konflik jangka panjang.

4. Menekan korupsi yang terjadi selama masa diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Aceh;
5. Membangun daerah Aceh berdasarkan spesifikasi dasar masing-masing wilayah dengan melibatkan unsur masyarakat sebagai subjek pembangunan.
6. Dilibatkannya struktur lokal (adat) terutama para ulama dalam struktur politik, dan struktur pemerintahan. Karena itu, implementasi infrastruktur NAD sebagai bagian dari resolusi konflik harus dilakukan, terutama untuk membangun struktur pemerintahan lokal yang berbasis kultur Aceh, di samping meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan corak dan kebijakan politiknya.

Gagasan-gagasan tersebut di atas perlu disosialisasikan kepada masyarakat Aceh, sehingga mereka dapat menentukan apa yang mereka butuhkan, dan harapan apa yang perlu diwujudkan oleh pemerintah bagi Aceh masa depan. Selama proses kebijakan politik hanya dari elit dan tidak menyentuh akar persoalan di tingkat bawah, maka penyelesaian konflik Aceh akan tambah lama dan sulit.

B. Rekomendasi Khusus (Spesifik): 3 Tawaran Prioritas Program untuk Menyelesaikan Konflik.

Untuk mengakhiri dan/atau menyelesaikan konflik Aceh saat ini Indonesia berada dalam posisi yang amat sulit dan dilematis.

Konflik Aceh sudah terlanjur menjadi besar dengan aktor yang beragam di samping adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara satu dengan lainnya. Selain itu, di antara para aktor tersebut terlihat adanya perbedaan pandangan tentang formula penyelesaian masalah Aceh.

Guna membangun langkah-langkah yang spesifik untuk meminimalisasi konflik dari yang paling keras ke yang lebih lunak, dan mentransformasi perdamaian negatif ke perdamaian positif diperlukan langkah-langkah yang konkret, tegas dan jelas. Oleh karena itu, secara khusus penelitian ini merekomendasikan hal-hal berikut ini:

1. *Perlunya Kebijakan Aceh Recovery*

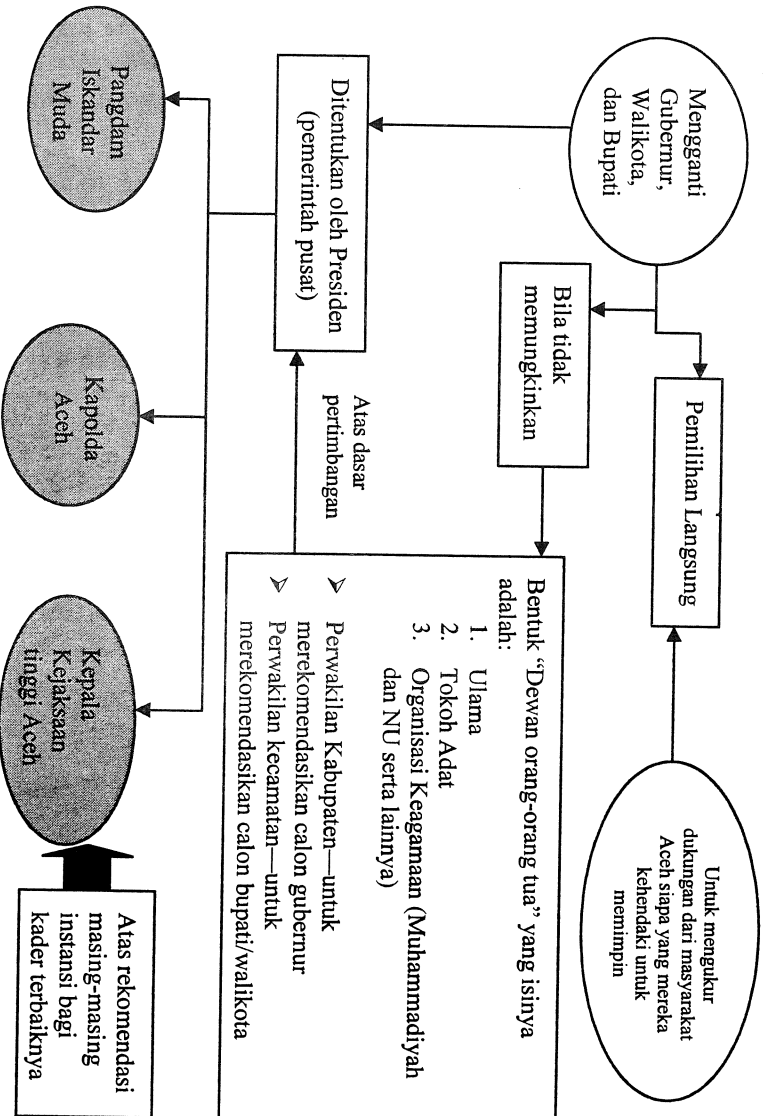
Pemerintah Pusat dan Daerah perlu membuat kebijakan politik yang cocok untuk menuntaskan konflik Aceh yang perkembangannya justru semakin buruk. Selama ini terkesan bahwa ada perbedaan cara pandang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan Politik itu adalah *Aceh Recovery* yang berisikan beberapa kebijakan penting dan mendasar sebagai berikut:

- a. Meninjau ulang struktur dan kepemimpinan pemerintah daerah NAD, karena sebagian besar melihat bahwa gubernur NAD tidak mempunyai program yang jelas mengenai upaya penyelesaian Aceh. Karena itu, perlu dibuat kebijakan mengenai pemerintahan transisional di Aceh yang meliputi restrukturisasi hubungan kekuasaan atas beberapa lembaga penting, yaitu Gubernur dan jabatan-jabatan kekuasaan sipil (bupati dan walikota), TNI dan Polri serta dengan aparat penegak hukum.
- b. Salah satu cara untuk melaksanakan masa transisional itu adalah dengan dikeluarkan kebijakan pemerintah pusat. Inti dari kebijakan adalah: Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati

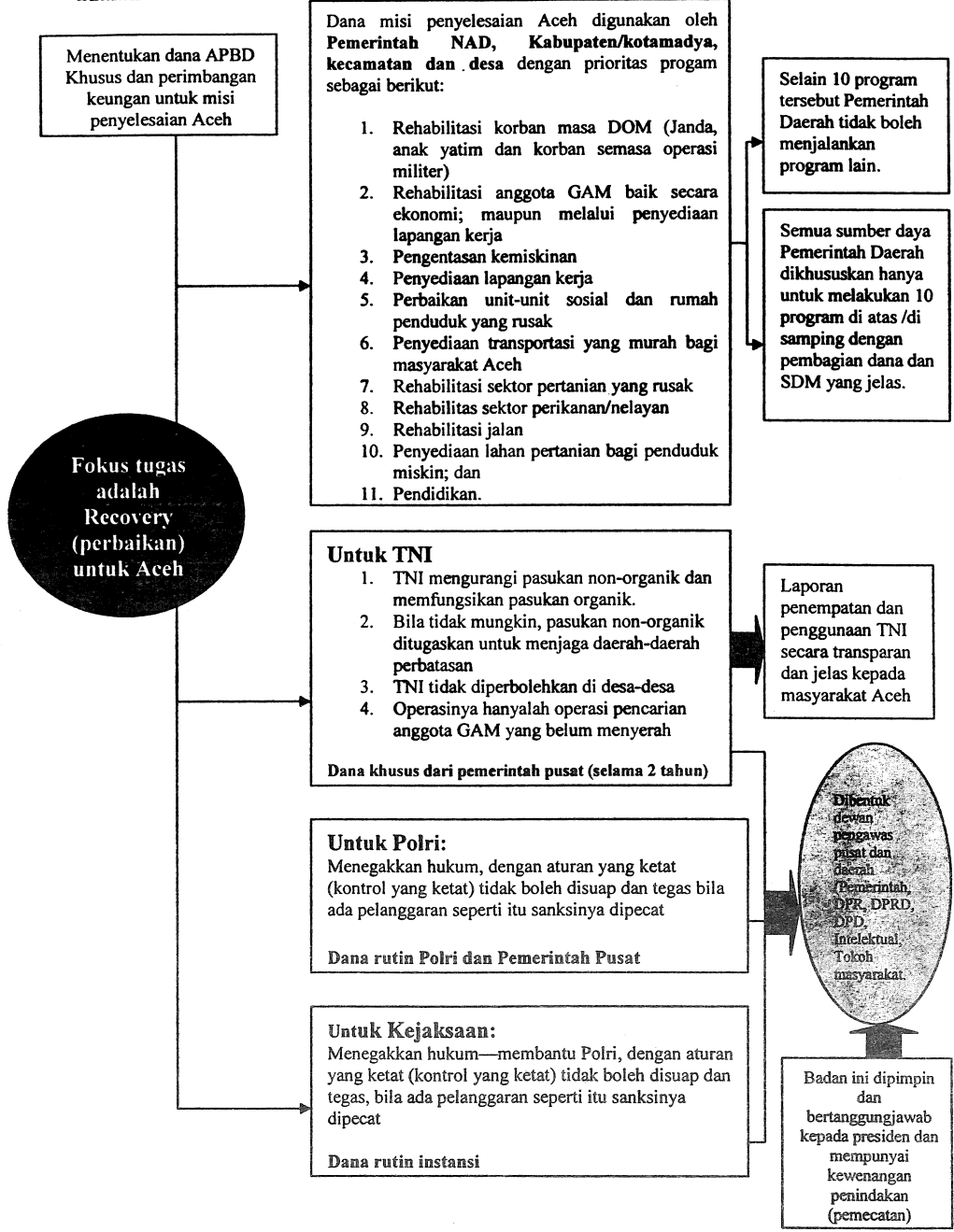
dan Walikota) dipilih secara langsung oleh rakyat Aceh. Mengapa ini penting, agar rakyat Aceh benar-benar menjadi bagian yang integral dengan penguasanya, sehingga ada kedekatan emosional dan kedekatan geografik untuk menjalankan pemerintahan.

- c. Adanya *tool kit* mengenai fungsi-fungsi kekuasaan di Aceh yang untuk sementara (transisional) dibagi peran dan tanggungjawabnya berdasarkan kerangka transisional. Kerangka transisional ini dijalankan selama dua tahun ada tugas dan koordinasi yang jelas antara apa yang harus/perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung di NAD.

Alur Pembagian Tugas Tahap-tahap Aceh Recovery



Bila hal itu sudah ada perubahan: Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah



Fokus tugas adalah Recovery (perbaikan) untuk Aceh

Menentukan dana APBD Khusus dan perimbangan keuangan untuk misi penyelesaian Aceh

Dana misi penyelesaian Aceh digunakan oleh Pemerintah NAD, Kabupaten/kotamadya, kecamatan dan desa dengan prioritas program sebagai berikut:

1. Rehabilitasi korban masa DOM (Janda, anak yatim dan korban semasa operasi militer)
2. Rehabilitasi anggota GAM baik secara ekonomi; maupun melalui penyediaan lapangan kerja
3. Pengentasan kemiskinan
4. Penyediaan lapangan kerja
5. Perbaikan unit-unit sosial dan rumah penduduk yang rusak
6. Penyediaan transportasi yang murah bagi masyarakat Aceh
7. Rehabilitasi sektor pertanian yang rusak
8. Rehabilitasi sektor perikanan/nelayan
9. Rehabilitasi jalan
10. Penyediaan lahan pertanian bagi penduduk miskin; dan
11. Pendidikan.

Selain 10 program tersebut Pemerintah Daerah tidak boleh menjalankan program lain.

Semua sumber daya Pemerintah Daerah dikhususkan hanya 10 program di atas /di samping dengan pembagian dana dan SDM yang jelas.

Untuk TNI

1. TNI mengurangi pasukan non-organik dan memfungsikan pasukan organik.
2. Bila tidak mungkin, pasukan non-organik ditugaskan untuk menjaga daerah-daerah perbatasan
3. TNI tidak diperbolehkan di desa-desa
4. Operasinya hanyalah operasi pencarian anggota GAM yang belum menyerah

Dana khusus dari pemerintah pusat (selama 2 tahun)

Laporan penempatan dan penggunaan TNI secara transparan dan jelas kepada masyarakat Aceh

Untuk Polri:
Menegakkan hukum, dengan aturan yang ketat (kontrol yang ketat) tidak boleh disuap dan tegas bila ada pelanggaran seperti itu sanksinya dipecat

Dana rutin Polri dan Pemerintah Pusat

Untuk Kejaksaan:
Menegakkan hukum—membantu Polri, dengan aturan yang ketat (kontrol yang ketat) tidak boleh disuap dan tegas, bila ada pelanggaran seperti itu sanksinya dipecat

Dana rutin instansi

Dibentuk dewan pengawas pusat dan daerah /Pemerintah, DPR, DPRD, DPD, Intelektual Tokoh masyarakat.

Badan ini dipimpin dan bertanggungjawab kepada presiden dan mempunyai kewenangan penindakan (pemecatan)

2. *Hati-hati dengan Isu Pemecahan Wilayah*

Pemerintah Pusat harus hati-hati dengan isu pemecahan wilayah Aceh. Ini akan menimbulkan persoalan baru karena cenderung menambah luka sejarah dan menjadi bumerang bagi masa depan Aceh. Isu ini sangat sensitif, karena memang secara historis dan atas dasar pengalaman sosio-budaya masyarakat Aceh, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan.

3. *Program Pembangunan Berdimensi Resolusi Konflik: VISI Aceh 2020*

Bila masa transisional sudah selesai dilakukan dan tahap-tahap penyelesaian program prioritas mencapai hasil, maka perlu dilakukan prioritas program jangka panjang sebagai pijakan untuk membangun Aceh yang damai.

- a Mengkomunikasikan pembagian hasil sumber minyak dan bumi dengan rasionalitas kepentingan masing-masing pihak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan ada tahap-tahap yang jelas (80:20 untuk 10 tahun pertama; 50:50 untuk 15 tahun berikutnya; dan 70:30 untuk selanjutnya). Dengan program yang pasti bahwa dana-dana tersebut digunakan untuk membangun Aceh yang berdimensi damai.
- b Menindak dan mengadili para koruptor di Aceh, baik pemerintah daerah maupun pengusahanya.
- c Program sekolah gratis bagi masyarakat Aceh terutama untuk pendidikan menengah ke bawah; sementara untuk pendidikan tinggi (harus ada subsidi minimal 30 persen).
- d Membuat program untuk penghapusan kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan bagi rakyat yang tidak bersekolah. Visi Aceh 2010 adalah Aceh yang bebas dari rakyat miskin, pengangguran dan minimal berpendidikan SLTP. Memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di

daerah-daerah sekitar industri terutama di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur.

- e Membuat program pengiriman siswa dan mahasiswa yang berprestasi untuk disekolahkan di luar Aceh dengan dana dari Pemerintah Daerah dan ada jaminan bahwa setelah lulus (khusus mahasiswa) akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Daerah.
- f Membangun komunitas-komunitas pesantren tradisional sebagai bagian dari pembangunan keagamaan di Aceh yang dananya disiapkan dan/atau disubsidi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- g Membuat transportasi Aceh Medan yang murah (termasuk dengan membuat jalur kereta api) sehingga ada mobilitas yang tinggi bagi kehidupan masyarakat Aceh.
- h Memfungsikan pelabuhan-pelabuhan di Sabang dan pelabuhan antara Aceh Barat dan Aceh Selatan sebagai pusat perdagangan.
- i Membangun universitas baru dengan nama: Universitas Negeri Hamzah Syamsuri di Perbatasan Pidie dan Aceh Utara sebagai bagian untuk membangun masa depan Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Abdul Rachman Patji, "Zona Industri Lhokseumawe (ZILS): Studi tentang Kesenjangan Sosial Budaya di Aceh Utara," dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. II, No. 1, September 1998, Jakarta: PMB-LIPI, 1998.
- Agus Sudibyo, "Realitas Aceh dan Realitas Media," dalam *KOMPAS*, 11 Juni 2003.
- Ahmad Syafii Ma'arif, "Drama di Tanah Rencong, Dosa Kolektif", dalam Abdul Wachid B.S., Fikar W. Eda, dan Lian Sahar (eds.), *Aceh Mendesah dalam Nafasku. Bunga Rampai Menyemai Bumi Tumpah Darah*, Banda Aceh: Penerbit kaSUHA, 1999.
- Al Chaidar, "Sejarah Pergolakan Rakyat Aceh", dalam *Republika*, 15 Februari 1999.
- Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Madani Press, Oktober 1999.
- Clive J. Christie, *A Modern History of Southeast Asia: decolonization, nationalism, and separatism*. New York: Tauris Academic Studies, I.B. Tauris Publisher, 1996.
- Fikar W. Eda dan S. Satya Dharma, *Sebuah Kesaksian Aceh Menggugat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Daftar Pustaka

- Franz-Magnis Suseno, "Kata Pengantar", dalam Otto Syamsuddin Ishak (Penyunting), *Suara dari Aceh Identifikasi Kebutuhan dan Keinginan Rakyat Aceh*. Jakarta Timur, YAPPIKA, Februari 2001.
- H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.
- Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi untuk Indonesia*. Jakarta: Teplok Press, 1999.
- Hasballah M. Saad, "Aceh dalam Pangkuan Ibu Pertiwi", dalam Musni Umar (ed.), *Aceh Win-win Solution*. Jakarta: Forum Kampus Kuning, 2002.
- Isa Sulaiman, *GAM, Ideologi dan Gerakannya*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Ismail Hasan Metareum, "Penyelesaian Masalah Aceh", dalam Musni Umar (ed.) *Aceh Win-win Solution*. Jakarta, Forum Kampus Kuning, 2002.
- Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, "Menakar Harga Kemarahan Orang Aceh: Etnografi Kekerasan di Indonesia" (Pengantar), dalam Hasanuddin Yusuf Adan, *Tamaddun dan Sejarah Etnografi Kekerasan di Aceh*. Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, Primashopie Press, 2003.
- M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Da'wah, 2001.
- Maruli Tobing, "Jejak Lahirnya Konflik Aceh-GAM", dalam *Kompas*, 14 Januari 2000.
- Musni Umar, *ACEH Win-win Solution*. Jakarta, Penerbit Forum Kampus Kuning, 2002.
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989).

Daftar Pustaka

- Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik. Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.
- Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi Di Serambi Mekah, Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*. Jakarta: UI Press, 1999.
- Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan, dan Impian*. Jakarta: Grassindo, 2001.
- Soedarsono dan Arif Rusli, "Sejarah Hasan Tiro dan GAM", dalam *Forum Keadilan*, 25 Januari 1999.
- Usman Hasan, "Konflik Aceh yang Multidimensional dan Penyelesaiannya Secara Damai", Musni Umar (ed.) *Aceh Win-win Solution*. Jakarta, Forum Kampus Kuning, 2002.
- Tim Peneliti LIPI, *Bara Dalam Sekam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Tulus Widjanarko dan Asep S. Sambodja, (eds.), *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*. Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1999.
- Yappika, *Suara dari Aceh Identifikasi Kebutuhan dan Keinginan Rakyat Aceh*, YAPPIKA, Februari 2001.

Majalah dan Koran

Acheeh Links, <http://acehnet.tripod.com/why.htm>.

Forum Keadilan, No. 01, Tahun VI, 21 April 1997.

<http://acehnet.tripod.com/price.htm>.

Kabar dari Pijar Online Mon Dec 27 13:40:38 MET 1999.

Kompas, 10 Juni 2003.

Kompas, 13 November 1995.

Kompas, 13 November 1995.

- Kompas*, 24 Juni 1991.
Kompas, 24 Mei 1999.
Kompas, 28 Mei 2003.
Kompas, 7 Mei 1991.
Kontras No. 125 Tahun IV 21-27 Februari 2001.
Kontras, No.36/SP-Kontras/VIII/0.
Koran Tempo, 11 Desember 2002.
Majalah Tiras, No. 7, 13 Maret 1997.
Media Indonesia, 10 Desember 2002.
Republika, 13 Nopember 1999.
Republika, 21 Nopember 2000.
Sinar Harapan, 14 April 2003.
Suara Karya, 8 Januari 1999.
Suara Pembaruan, 10 Desember 2002.
Tempo Interaktif, edisi 23 Agustus 1998.
Tempo, 12-27 April 2003.
Tempointeraktif, 23 Agustus 1998.